FESTIVAL LITERASI SEKOLAH

Gerakan Literasi Nasional

GERAKAN LITERASI SEKOLAH

ISBN 978-602-1385-34-6

Gerakan Literasi Sekolah, Dari Pucuk Hingga Akar: Sebuah Refleksi

Billy Antoro

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2017

Gerakan Literasi Sekolah

Dari Pucuk Hingga Akar

Sebuah Refleksi

Billy Antoro

Sekretaris Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2017

Gerakan Literasi Sekolah

Dari Pucuk Hingga Akar

Sebuah Refleksi

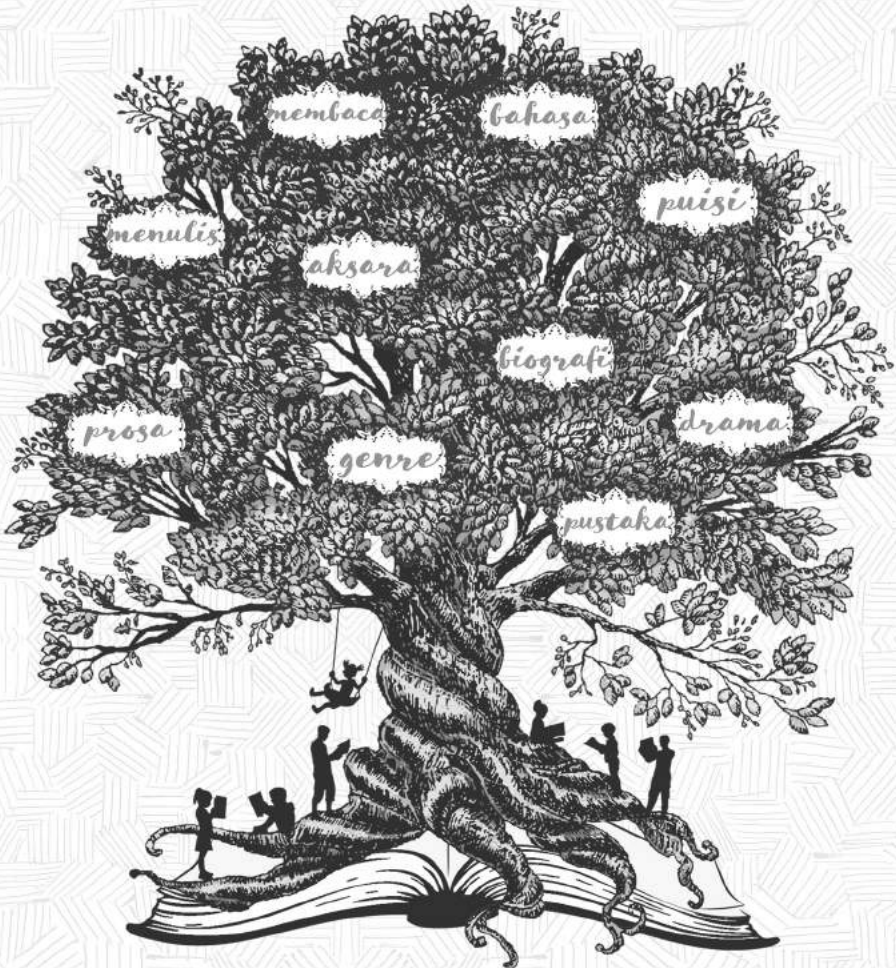

Billy Antoro

Sekretaris Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud

GERAKAN LITERASI SEKOLAH
Dari Pucuk Hingga Akar
Sebuah Refleksi

Penulis: Billy Antoro
Peneliti teks: Satriyo Wibowo
Desainer grafis dan ilustrator: Tri Isti

Cetakan 1: Oktober 2017
ISBN 978-602-1389-34-8

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Alamat:
Bagian Perencanaan dan Penganggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E lantai 5 Kompleks Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telp./Faks: (021) 5725613

Buku ini bebas dikaji, diperbanyak, dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, namun tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil.

© 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak cipta dilindungi Undang-undang.
All rights reserved.

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti merupakan pintu masuk bagi program baru Kemendikbud setelah bertahun-tahun bergelut dalam program pengentasan buta aksara, yaitu literasi. Saya memandang, momen ini adalah angin segar menuju perubahan substansial dalam pembelajaran di sekolah. Selama ini, fokus pembangunan dunia pendidikan lebih banyak tertuju pada perluasan akses pendidikan. Perhatian terhadap kualitas pendidikan sudah tampak, namun masih terasa ada yang kurang.

Bertahun-tahun saya mengidentifikasi bahwa kekurangan itu terletak pada perhatian dalam proses pembelajaran di kelas. Interaksi guru dan siswa, dalam proses belajar mengajar, seharusnya mendapat porsi besar dalam kebijakan di dunia pendidikan. Sebab dari dalam kelaslah perubahan itu dimulai, kemudian merambah ke lingkungan keluarga, dan memengaruhi kehidupan masyarakat.

Sebenarnya "sinyal" itu sudah muncul dari sekian survei internasional yang dimulai sejak abad 21. *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS), *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Programme for International Student Assessment* (PISA), yang mengukur tingkat literasi siswa di sejumlah negara, mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Negara-negara maju menggunakan pengukuran literasi sebagai batu pijakan bagi proses perbaikan di bidang pendidikan dan pembangunan SDM.

Maka, ketika Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti terbit, yang memberi ruang bagi munculnya program literasi, kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyambutnya dengan suka cita. Ini merupakan angin segar yang harus segera dihirup dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kami kemudian melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Paradigma baru abad 21 yang mengutamakan kolaborasi, bukan kompetisi, menjadi sarana menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan secara bersama-sama. Gerakan yang menjadi ciri pengembangan literasi menjadi energi tersendiri yang mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, praktisi, akademisi, pegiat literasi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk duduk satu meja merumuskan kehendak bersama.

Di tahun ke-3 Gerakan Literasi Sekolah (2015 – 2017) berjalan, kami disibukkan dengan banyak sekali kegiatan yang menghimpun sekian jumlah kalangan dalam satu meja. Kami berdiskusi, berbagi informasi, dan menetapkan strategi pencapaian yang tidak hanya melibatkan sekolah, namun juga keluarga dan masyarakat. Bagaimanapun, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) akan berjalan optimal jika melibatkan unsur keluarga dan masyarakat. Literasi, akhirnya, menjadi jembatan bagi implementasi tripusat pendidikan.

Buku ini merangkum sekaligus menginformasikan secara singkat dan padat beragam kegiatan yang telah dilakukan Ditjen Dikdasmen seputar pelaksanaan GLS. Jarang sekali ada buku yang mengupas proses di balik sebuah kebijakan dan memotretnya dari dekat, mengungkap kegelisahan dan harapan para pelaku dengan menjaga kredibilitas dan transparansi. Dapat dikatakan, buku ini membuka "dapur" Ditjen Dikdasmen menjelang dan setelah program GLS muncul.

Diharapkan, buku ini mampu menyamakan persepsi semua pemangku kepentingan dalam memahami dan akhirnya terlibat gerakan literasi yang digalang Kemendikbud. Gerakan literasi tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian buku ini. Juga kepada Ibu-Bapak guru yang berkenan berbagi pengetahuan dan praktik baik literasinya demi menambah bobot buku ini.

Kami sadar, upaya ini belum maksimal. Pastilah ada kekurangan yang meliputi penerbitan buku. Untuk itu, kami mohon masukannya demi perbaikan buku di masa mendatang. Selamat membaca dan salam literasi!

Jakarta, Oktober 2017
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D.
NIP 195905121983111001

Terima Kasih

Buku ini ditulis berdasarkan kebutuhan banyak kalangan, mulai sekolah, masyarakat, orang tua, hingga Pemerintah Daerah, untuk mengetahui konsep dan contoh praktik baik pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Oleh karena itu, buku ini disusun berdasarkan ranah pemangku kepentingan di atas.

Tapi buku ini tidak menjelaskan konsep dan teori akademis GLS, biarlah akademisi Satgas GLS yang akan membuatkan bukunya nanti. Guru, kepala sekolah, dan masyarakat kini butuh contoh konkret dan pemecahan masalah seputar pelaksanaan literasi. Jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah meramu praktik baik yang sudah berjalan di sekolah dan menyinkronkannya dengan kebijakan yang tengah berjalan dengan bahasa populer. Maka ucapan terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada semua pihak, baik guru, kepala sekolah, maupun penggiat literasi yang berkenan berbagi pengalaman praktik literasi kepada saya untuk ditulis di buku ini.

Ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, Ph.D., inspirator yang konsisten membidani lahirnya GLS. Selanjutnya Dr. Thamrin Kasman, Sekretaris Ditjen Dikdasmen, yang kali pertama 'menarik' saya kepada urusan GLS pada akhir 2015. Pimpinan saya di Bagian Perencanaan dan Penganggaran Pak Yudistira yang selalu menasihati untuk berpikir sederhana, Mas Satriyo Wibowo 'pimpinan dan sahabat' yang senantiasa memotivasi untuk mempelajari banyak hal baru, dan Pak Katman teman diskusi hebat di sela kesibukan kerja.

Ucapan terima kasih selanjutnya saya tujukan kepada rekan-rekan Satuan Tugas GLS. Mereka teman diskusi sekaligus guru saya dalam GLS, di antaranya Bu Pangesti Wiedarti, Mas Wien Muldian, Mbak Sofie Dewayani, Bu Roosie Setiawan, Bu Pratiwi Retnan-

ingdyah, Bu Kisyani, serta teman-teman Satgas direktorat antara lain Bu Dewi Utama dan Mbak Susan (SD), Bu Ninik dan Mbak Sulastri (SMP), Bu Nur dan Bu Endang (SMK), Pak Nilam dan Pak Sutrianto (SMA), Pak Yusuf dan Pak Yasep (PKLK), juga teman-teman Satgas GLS 2016 dan 2017.

Beberapa teman sekantor perlu juga disebut di sini, di antaranya Pak Mustofik, Mas Gagan, Bung Adib, Pak Darman, Bu Karti, Pak Mukhidin, Mas Margo, Pak Mashuri, Mas Ekky, Mas Riyan, Mbak Amanda, Mas Apit, Bu Sulis, Mas Gunawan, Mas Yusuf, Mas Adam, dan Mas Namel yang banyak membantu dalam kegiatan kepanitiaan acara GLS. Juga kepada rekan sejawat yang tak mungkin disebutkan satu per satu di sini.

Beberapa bab buku ini dikoreksi oleh Mbak Sofie, terima kasih atas masukan-masukan berharganya. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi membuat buku literasi. Kepada ilustrator buku ini, Isti, terima kasih atas kerja sama yang apik. Semoga kita bisa terus berkolaborasi membuat buku-buku baru yang inspiratif.

Kepada istri saya Winy Purtini dan putri saya Kirana Aisha Izzatunnisa, terima kasih tak terhingga atas izinnya melepas saya bepergian 'keliling' negeri dan pulang kantor malam-malam. Butuh energi ekstra merampungkan buku ini dan kalian merelakan waktu kebersamaan kita. Kepada kalian jua buku ini saya persembahkan.

Tak ada yang sempurna cipta karya manusia, begitu pula buku ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan konten dan penulisan di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Terima Kasih vi
Daftar Isi ix

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Gerakan Literasi Sekolah 7
Persoalan Mendasar 9
Dari Aksara ke Literasi 14
Buku Panduan 16
Semiloka Literasi Sekolah 17
Penjenjangan Buku 18
Penyempurnaan Panduan GLS 22
Pembentukan Satgas GLS 24
Sosialisasi 25
Dukungan Anggaran 28
Gerakan Literasi Nasional 30

Bab III 15 Menit Membaca 33
Buku yang dibaca 35
Waktu yang pas 37
Cara membaca 39
Tahap-tahap pelaksanaan 41
Guru teladan membaca 43
Lokasi membaca 45
Jurnal 45
Menciptakan suasana menyenangkan 47
Menulis agar membaca 50

Bab IV Sekolah Literat 53
Sekolah literat, seperti apa? 55
Tim Literasi Sekolah 56
Pelibatan siswa 58
Guru (jangan) malas membaca 59
Kepala sekolah sebagai *driver* 62
Membuat sudut baca 63

Buku untuk sudut baca 65
Perpustakaan vs Pojok Literasi 67
Lingkungan kaya literasi 69
Ancaman "Tuhan Sembilan Senti" 72

Bab V Mendatangkan Buku ke Sekolah 81
Jumlah buku 84
Potensi pasar 86
Peta persebaran penerbit 90
Mendatangkan buku 92
Seleksi Buku 94
Terlalu detail 97
Buku digital 100
Toko buku daring 102
Layanan *self publishing* 103

Bab VI Peran Orang Tua 107
Setelah membaca 109
Menghadapi monster: televisi 115
Dampak gawai 125
Membacakan buku 128
Membuat perpustakaan di rumah 133

Bab VII Pemerintah Daerah 137
Publikasi dan Soskor 140
Penguatan Pelaku/Pegiat Literasi 142
Penyediaan bahan bacaan 144
Penguatan kelembagaan 147
Pelibatan Publik 149
Gerakan literasi di Serdang Bedagai 151
Kolaborasi 158

Bab VIII Penutup 161

Catatan Kaki 165
Daftar Pustaka 195
Profil 200

BAB I
Pendahuluan

Buahnya pendidikan yaitu matangnya jiwa, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci dan manfaat bagi orang lain.
(*Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia*)

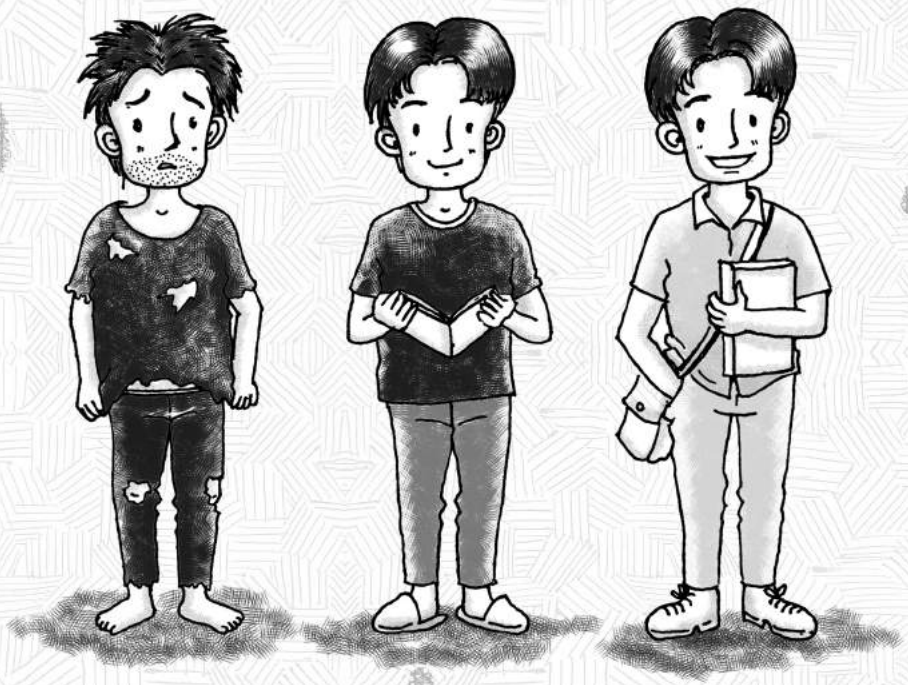

Pada suatu sore di Kota Bandung, dari sebuah kamar yang dihuni lelaki keras kepala pecandu narkoba, sesenggukan tangis mengalun dan menghampiri pendengaran sang bunda di balik pintu. Nico, mahasiswa yang tengah terancam dikeluarkan (*drop out*) dari kampusnya itu, kemudian melakukan hal ajaib di luar dugaan orang tua yang telah putus asa terhadapnya: menyelesaikan skripsi dan menuntaskan rehabilitasi ketergantungan obat.

Di tempat lain, seorang dokter gigi yang menunggu penerimaan Pegawai Negeri Sipil, tiba-tiba mengubah pikirannya. Ia tidak lagi mau tergantung pada pemerintah. Ia berusaha mandiri dan bekerja keras sehingga berhasil membangun mimpinya yaitu memiliki tempat praktik sendiri.[1]

Kedua orang itu, juga banyak yang lainnya, tiba-tiba berubah bukan lantaran terkena sihir Harry Potter. Atau baru bertemu psikiater, ahli agama, bahkan motivator hebat. Mereka berubah karena melakukan sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja: membaca buku.

Bagaimana bisa buku mengubah pikiran dan perilaku banyak orang? Sebegitu hebatkah buku sehingga setelah dibaca, seorang konsumen narkoba insaf dan bertekad menyelesaikan skripsi yang telah lama ditinggalkan, dan seorang lulusan perguruan tinggi memilih berwirausaha daripada menjadi PNS.

Andrea Hirata, penulis buku *Laskar Pelangi* itu, bukanlah seorang motivator, ahli agama, bahkan psikiater. Ia hanya pegawai biasa sebuah BUMN yang sedikit sekali membaca buku sastra. Namun, ketulusannya membuat buku tersebut—yang awalnya tidak diniatkan untuk diterbitkan—guna dipersembahkan kepada guru sekolah tercintanya, menarik minat masyarakat luas untuk membaca dan mengubah pola pikir serta menggerakkan perilaku hebat. Buku itu bahkan menarik minat akademisi untuk mencermati dan menjadi kajian penelitian banyak mahasiswa pascasarjana (tesis, disertasi).

Andrea Hirata. Foto: detik.com

Mungkin pengalaman Paulo Freire dalam bersentuhan dengan buku dapat menjelaskan fenomena itu. Freire, tokoh pendidikan yang pernah menjadi Menteri Pendidikan Brazil, mengatakan bahwa buku bagus memungkinkan pembaca untuk memahami fenomena dunia. Buku bagus yang membuatnya kagum adalah buku yang mampu membantunya mengerti kenyataan, sesuatu yang konkret.[2]

Teks *Laskar Pelangi* menggambarkan peristiwa puluhan tahun lalu di sebuah daerah miskin di Pulau Belitung, namun masyarakat membacanya sebagai fenomena kekinian yang riil dihadapinya. Teks tentang masa lalu, setelah melalui proses transformasi di kepala pembaca, berubah menjadi teks kontekstual. Inilah, barangkali, yang menjelaskan mengapa buku *Laskar Pelangi*, yang ditulis dengan nilai estetika tinggi, mampu mengubah pola pikir orang.

Hiruk-pikuk masyarakat Indonesia yang disebabkan buku juga terjadi setahun sebelumnya. Novel *Ayat-ayat Cinta* karya Habiburrahman El Shirazy yang terbit pada Desember 2004 laku keras. Pemutaran film bergenre religius ini juga tidak kalah heboh. Layar bioskop selalu penuh. Bahkan, muncul fenomena, di antara beragam jenis penonton yang memenuhi gedung bioskop, penonton dari kalangan ibu-ibu pengajian tergolong banyak. Sehingga muncul ungkapan 'gara-gara Ayat-Ayat Cinta, bioskop menjadi majelis taklim'.[3]

Fenomena atensi masyarakat terhadap buku yang menyita ruang publik dan media massa negeri ini sebenarnya dimulai tahun 2000 ketika novel serial pertama Harry Potter (*Harry Potter dan Batu Bertuah*) karya J.K. Rowling terbit. Hingga cetakan serial terakhirnya edisi ke-7 pada 2008 dan filmnya berjudul sama tayang mulai 2001 hingga 2011, novel tentang dunia sihir ini menyentak kesadaran publik bahwa "ternyata" anak-anak hingga orang dewasa doyan membaca buku setebal ratusan hingga seribu halaman. Terdengar nyaring anak-anak usia remaja mengunyah ratusan halaman buku dalam hitungan hari lalu mengulang membacanya berulang kali.

Antusiasme masyarakat Indonesia pada buku mendorong para pegiat literasi yang berhimpun dalam Forum Indonesia Membaca menyelenggarakan perayaan Hari Buku Sedunia (*World Book Day*) mulai 2006. Acara ini mempertemukan pengarang, penerbit, distributor, organisasi perbukuan, komunitas literasi, dan pengelola Taman Bacaan Masyarakat dalam kegiatan bersama, di mana tiap tahun mengangkat fokus yang berbeda. Di dalamnya digelar pelatihan, bincang buku, pameran, bursa buku murah, dan wisata edukasi.

Kegiatan literasi lainnya kemudian menyebar ke berbagai daerah, melibatkan semakin banyak pemangku kepentingan, dan menjadi ajang tahunan yang menggairahkan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, digelar *Makassar International Writers Festival* sejak 2011. Di Yogyakarta ada *Borobudur Writers dan Cultural Festival* sejak 2012.

Sedangkan di Bali, ada UBUD *Writers & Readers Festival*, yang lebih dulu hadir sejak 2004.

Keramaian literasi di sejumlah titik di negeri ini ternyata tidak mampu mendongkrak secara signifikan konsumsi buku masyarakat. Toko buku tidak lagi seramai ketika *Harry Potter*, *Ayat-Ayat Cinta*, dan *Laskar Pelangi* terbit. Hanya beberapa judul buku, yang ditulis secara konsisten oleh penulis yang menjaga kualitas karyanya, yang terus bertengger di rak buku berlabel *best seller*. Penjualan buku mengalami fluktuasi. Imbasnya, penerbit bermodal besar terus bertahan, penerbit bermodal kecil bertumbangan. Gerakan kolaboratif para aktivis literasi dan perbukuan pun terdengar senyap, disinyalir lantaran kurang didukung masif oleh pemerintah dan media nasional.

Minat baca masyarakat yang rendah dituding pula sebagai penyebabnya. Sejumlah media massa nasional melansir survei Unesco pada 2012 menunjukkan indeks membaca masyarakat Indonesia adalah 0,001. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca serius.[4]

Hasil tes *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2012 mengenai literasi matematika, membaca, dan sains yang menempatkan Indonesia di urutan 64 dari 65 negara disurvei, makin mengokohkan asumsi tentang rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Terlebih, skor literasi membaca siswa Indonesia (berusia 15 tahun) itu hanya 396, jauh di bawah standar rata-rata 496.

Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*—WEF) pada 2015 mengeluarkan laporan mengenai kecakapan yang harus dikuasai untuk menghadapi abad ke-21. Keterampilan itu mencakup literasi, kompetensi, dan karakter. Dokumen WEF itu kemudian mendorong literasi menjadi isu nasional.

Pemerintah yang sejak puluhan tahun berkonsentrasi pada pengentasan buta aksara (baca-tulis-hitung), mulai mengubah fokus setelah penuntasan buta aksara pada 2015 melebihi target. Fokus itu bukan lagi sekadar membuat anak bisa calistung, melainkan

mendorong anak memahami materi yang dibacanya. Fokus ini sesuai dengan pengertian literasi yang digunakan dalam survei PISA.

Perubahan fokus kebijakan pendidikan yang mengarah pada kecakapan abad ke-21 (literasi, kompetensi, dan karakter) diformulasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud ini kemudian menginisiasi lahirnya Gerakan Indonesia Membaca dan Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan Indonesia Membaca melingkupi gerakan literasi di ranah masyarakat dan keluarga, sementara Gerakan Literasi Sekolah mencakup gerakan literasi di lingkungan sekolah.

Permendikbud yang ditandatangani oleh Anies Baswedan ini memberi arah tersendiri dalam proses mencapai tujuan, yang kemudian membedakannya dengan implementasi kebijakan pendidikan sebelumnya. Jika sebelumnya kebijakan pendidikan kuat mengesankan pemerintah sebagai pemain utama, kini pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bersama dalam sebuah gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

BAB II

Gerakan Literasi Sekolah

Pelajarilah syair karena di dalam syair terdapat keindahan-keindahan yang kau cari, keburukan-keburukan yang kau hindari, hikmah orang-orang bijak dan menunjukkan akhlak terpuji.
(*Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin II*)

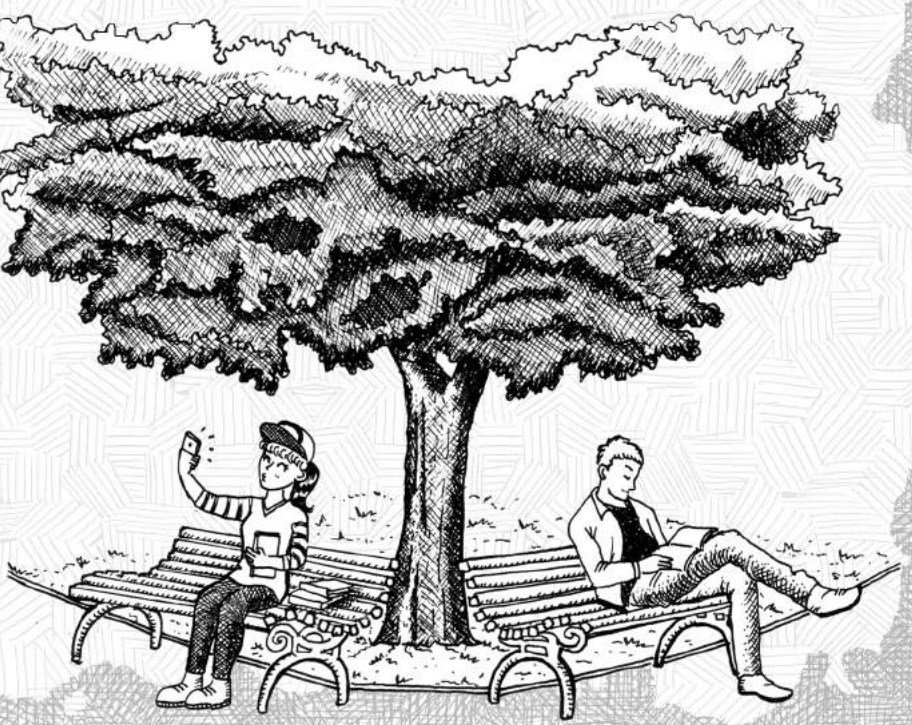

Mendikbud Anies Baswedan menggelar Rapat Koordinasi Penumbuhan Budi Pekerti di Gedung Ki Hadjar Dewantara lantai 3, Senayan, Jakarta. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan se-Indonesia hadir. Anies memaparkan program terbarunya: Penumbuhan Budi Pekerti. Sebanyak 23 slide *powerpoint* dipaparkan dengan penuh semangat, diselingi beberapa lantunan musik bernapas nasionalisme. Itu terjadi pada 10 Juli 2015.

Tiga hari kemudian, Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti terbit. Permendikbud ini lahir sebagai tanggapan terhadap dorongan masyarakat agar terjadi perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama terkait dekadensi moral yang merebak di kalangan peserta didik; tawuran pelajar, seks bebas, gaya hidup permisif.

Uniknya, Permendikbud ini dijabarkan sangat detail. Di dalamnya termuat berbagai kegiatan yang dilakukan siswa dan guru, baik yang bersifat wajib maupun contoh atau pilihan. Intinya, perilaku baik yang disebutkan dalam Permendikud dijadikan pembiasaan di sekolah.

Anies Baswedan. Foto: Billy

Berbagai kegiatan pembiasaan yang dimunculkan dalam Permendikbud tersebut sebenarnya bukanlah barang baru. Mereka pernah dilakukan rutin di sekolah. Tetapi sekian lama tak lagi tampak. Kegiatan itu diantaranya upacara bendera setiap Senin, olahraga bersama sekali seminggu (biasanya hari Jumat), dan menyanyikan lagu nasional di kelas.

Di antara sekian perilaku baik yang diharapkan menjadi kebiasaan di sekolah kemudian menular di rumah adalah membaca. Hal ini disebutkan dalam lampiran Permendikbud butir F, pembiasaan kegiatan pada butir VI (Mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh) yaitu: "Menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari)."

Munculnya pewajiban membaca merujuk pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Minat baca masyarakat Indonesia, kata Anies, sangat rendah. Itu dapat dilihat dari perilaku masyarakat di berbagai fasilitas umum dan ruang tunggu. Di halte, terminal, stasiun, atau bandara, misalnya, orang lebih banyak memegang gawai ketimbang buku.

Di antara lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat, hanya lingkup sekolah yang dapat diintervensi pemerintah. Dengan menumbuhkan budaya membaca di sekolah, diharapkan kebiasaan membaca menular ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Persoalan Mendasar

Terbitnya Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti tidak lepas dari konteks global. Literasi menjadi subjek pengukuran oleh beragam survei internasional. Indonesia sendiri, sejak 2000, berpartisipasi dalam survei PISA. Sayangnya, di tiap survei 3 tahunan itu, posisi Indonesia selalu berada di posisi terbawah, jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Menurut survei teranyar PISA 2015 yang diumumkan pada 6 Desember 2016, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 72 negara yang disurvei. Survei yang dilakukan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) juga tidak mendongkrak peringkat Indonesia.

Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, geram membaca keluhan dan nada putus asa masyarakat di berbagai media massa atas kondisi ini. "Apa kata yang sering disandangkan pada paparan tentang kegiatan membaca dan kompetensi membaca siswa Indonesia dibanding negara lain? Yaitu: memprihatinkan, buruk, rendah, tertinggal, dll.," katanya[1]. Penyampaian pernyataan prihatin tanpa berpartisipasi mengubah kondisi, baginya, seperti mengolok-olok diri sendiri.

Pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah: pemerintah c.q. Kemendikbud ke mana saja dalam rentang 2000-2015? Apakah tidak ada upaya mendongkrak kompetensi literasi siswa dan guru serta membangun budaya membaca di sekolah?

Sejak lama, masyarakat selalu mengkambinghitamkan kurikulum sebagai biang kerok persoalan dunia pendidikan, termasuk malasnya orang Indonesia membaca buku. Anggapan ini selalu disandingkan dengan slogan: ganti menteri, ganti kebijakan.

Dalam rentang 15 tahun (2000-2015), setidaknya kurikulum telah mengalami empat kali perubahan. *Pertama*, hingga 2004 dipakai Kurikulum 1994. *Kedua*, pada 2004, digunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). *Ketiga*, pada 2006, muncul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). *Keempat*, pada 2013, terbit Kurikulum 2013.

Tiap kurikulum memiliki kelebihan. Tiap kurikulum juga mempunyai kelemahan. Masing-masing memiliki fokus dan titik tekan yang berbeda. Namun, apakah tiap kurikulum mengandung misi untuk membuat siswa dan guru rajin membaca? Apakah pada tiap pergantian kurikulum, jumlah sekolah yang memiliki budaya membaca terus bertambah?

Persoalan berikutnya: manajemen sekolah. Mengikuti pola otonomi daerah yang didengungkan sejak 2001, pola pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diterapkan secara masif pada 2005. Kepala sekolah memiliki otoritas besar untuk mengatur

sekolah. Tidak lagi melulu merujuk Pusat dalam penerapan kebijakan di sekolah. Mereka didorong untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya demi kemajuan sekolah. Apakah kemudian MBS melahirkan sekolah-sekolah yang memiliki budaya membaca?

Permasalahan lainnya: kesejahteraan guru. Sebelum era Reformasi 1998, nasib guru bak warga negara kelas dua: miskin, perlu kerja sampingan agar asap dapur terus mengepul. Lalu, imbas gelombang demonstrasi menuntut peningkatan kesejahteraan, upah guru meningkat drastis. Ada gaji pokok, tunjangan sertifikasi, dan lain-lain. Profesi guru kemudian menjadi primadona, diburu siapa saja. Lantas, ketika guru sejahtera, apakah berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan?

Yang tampak jelas adalah penambahan jumlah barang (properti) di rumah guru, yang tidak ada relevansinya dengan peningkatan kualitas pendidikan. Hanya segelintir guru yang benar-benar memanfaatkan tunjangan untuk meningkatkan kompetensi mendidiknya. Apakah berbagai tunjangan yang diterima membuat guru rajin membaca? Berapa uang yang dihabiskan untuk membeli buku dari tunjangan yang diterima tiap bulan? Berapa guru yang mempunyai perpustakaan di rumah?

Problem selanjutnya: profesionalitas guru. Tiap kali terjadi penyimpangan moral di kalangan peserta didik, media massa kerap menempatkan pendidikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Tudingan lalu mengarah pada guru yang dianggap tidak mampu mendidik alias tidak profesional. Orang tua seolah lepas tangan pada pendidikan keluarga.

Lalu munculah program-program pelatihan, seminar, dan sertifikasi. Kualitas guru terus diperbaiki. Diharapkan, dengan melakukan sertifikasi dan pemberian tunjangan, wajah dunia pendidikan segera berubah. Setelah diamati, ternyata tidak ada perbedaan signifikan antara guru yang sudah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi. Hasil Uji Kompetensi Guru selalu di bawah

target. Artinya, tidak ada relevansi antara kegiatan sertifikasi dan kualitas pendidikan. Apakah setelah mengikuti pelatihan, seminar, dan sertifikasi, jumlah guru yang rajin membaca bertambah?

Metode pembelajaran juga selalu berganti. Mulai dari ceramah hingga demonstrasi. Dari Cara Belajar Siswa Aktif hingga *Contextual Teaching Learning*. Apakah metode pembelajaran yang baik mendorong guru dan siswa rajin membaca?

Perluasan akses pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru, rehabilitasi sekolah dan ruang kelas, dilakukan tiap tahun. Angka Partisipasi Kasar terus meningkat. Begitu pula Angka Partisipasi Murni. Pemerataan pendidikan semakin terasa. Tetapi, apakah perubahan fundamental dalam diri siswa terjadi? Apakah bertambahnya siswa otomatis juga menambah jumlah siswa yang suka membaca?

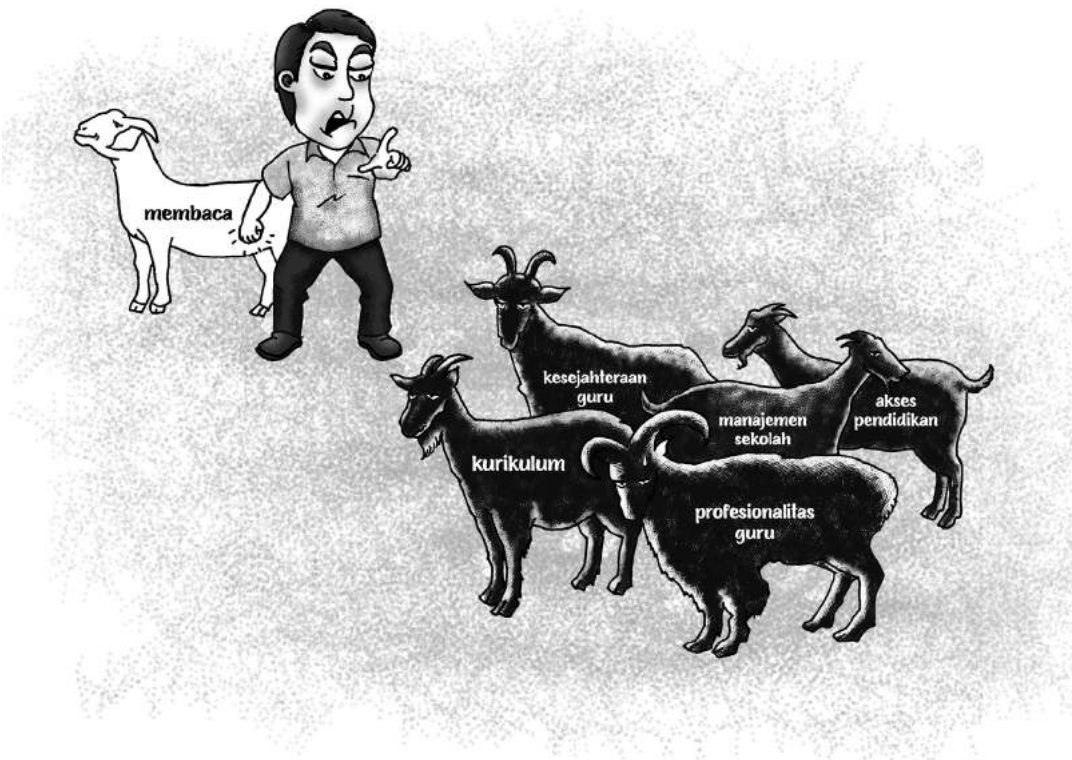

Semua program di atas, yang ditujukan untuk perbaikan mutu pendidikan, ternyata belum membentuk pondasi pendidikan yang kokoh. Kurikulum bagus, guru hebat dan sejahtera, fasilitas lengkap, metode pembelajaran terkini, namun jika siswa dan gurunya masih malas membaca, apa artinya?

Membaca, salah satu aktivitas dalam kegiatan berliterasi, merupakan kunci bagi kemajuan pendidikan. Ia jendela bagi masuknya beragam ilmu pengetahuan. Keberhasilan suatu pendidikan sedianya tidak diukur dari banyaknya anak yang mendapatkan nilai tinggi dalam suatu pelajaran, melainkan banyaknya anak yang gemar membaca di suatu kelas. Tanyalah pada guru, berapa siswa di kelasnya yang gemar membaca, bukan berapa siswa yang mendapat nilai tinggi di mata pelajaran yang diampunya.

Banyak penelitian menyebutkan bahwa kegiatan membaca berbanding lurus dengan kemampuan akademik seorang anak, terlebih jika dijalani dalam suasana menyenangkan. Clark dan Rumbold (*Reading for Pleasure; A Research Overview*, 2006) menyebutkan banyak manfaat mengenai kegiatan membaca untuk kesenangan, di antaranya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis (OECD, 2002), pemahaman teks dan tatabahasa (Cipielewski and Stanovich, 1992; Cox and Guthrie, 2001), kaya perbendaharaan kata (Angelos and McGriff, 2002), sikap membaca yang positif (Guthrie and Alvermann, 1999), rasa percaya diri yang tinggi ((Guthrie and Alvermann, 1999), senang membaca sepanjang hayat (Aarnoutse and van Leeuwe, 1998).

Pendidikan di sekolah pada dasarnya tidak dimaksudkan mencetak anak agar bisa mendapatkan nilai tinggi di akhir pelajaran—ini yang sering dilupakan guru. Tujuan pendidikan adalah membentuk anak berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Kegiatan membaca, yang berujung pada siswa yang gemar membaca, merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Maka selayaknya setiap fase kegiatan belajar-mengajar (KBM) di sekolah didominasi oleh kegiatan membaca (literasi).

"Ruang" inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian Hamid: apakah KBM di semua sekolah sudah berbasis literasi? Jika ingin meningkatkan mutu pendidikan, di titik inilah (ruang kelas) semua harus dimulai. Baginya, integrasi literasi dalam KBM adalah keniscayaan. Tidak bisa tidak.

Dari `Aksara ke Literasi`

Intervensi terhadap literasi sudah lama dilakukan Pemerintah, namun dengan nama dan fokus yang berbeda. Jika kini istilah literasi menjadi kata "seksi" untuk menggambarkan kegiatan baca-tulis-hitung (calistung) dan segala hal yang terkait dengan buku dan akses informasi, dulu kata "seksi" yang sering digunakan adalah "aksara".

Pascakemerdekaan 1945, angka buta aksara (tidak bisa calistung) rakyat Indonesia sangat tinggi. Program keaksaraan dari pemerintah berfokus pada pemberantasan buta aksara dan pembangunan fasilitas pendidikan. Pengentasan buta aksara melalui jalur pendidikan formal dilakukan dengan memberi akses seluas-luasnya kepada anak usia sekolah untuk bersekolah.

Pada 1973, Pemerintah Orde Baru menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Pada tahun-tahun berikutnya, diterbitkan Inpres yang mendukung Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar melalui penganggaran APBN. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan dibangun dalam skala besar. Program ini berhasil menarik banyak anak usia sekolah ke bangku sekolah. Anak yang masuk sekolah diasumsikan akan bisa calistung.

Satu dasawarsa berikutnya, karena jumlah anak usia 7-12 tahun dan angka putus sekolah dasar masih tinggi, pada 2 Mei 1984 Presiden Soeharto mencanangkan program wajib belajar enam tahun[2]. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1994,

Presiden Soeharto mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Cakupan anak wajib sekolah ditambah hingga jenjang SMP/MTs.

Upaya pengentasan buta aksara melalui pendidikan formal dan informal membuahkan hasil. Jumlah masyarakat Indonesia yang bisa calistung terus meningkat. Pada 2002, angka melek aksara masyarakat Indonesia mencapai 89,51%. Angka itu ditargetkan bertambah hingga mencapai 95% pada 2015.

Untuk mencapai target itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Ternyata, penuntasan buta aksara tahun 2015 melebihi target. Penduduk Indonesia yang masih buta aksara sebanyak 3,56% atau 5,7 juta. Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan perubahan pada fokus pemberantasan buta aksara.

Pada Juli 2015, terbit Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatan wajib yang tertera dalam regulasi itu adalah membaca selama 15 menit buku nonpelajaran setiap hari. Regulasi ini dapat dimaknai sebagai perubahan visi pemerintah dari KBM untuk pemberantasan buta aksara kepada KBM untuk peningkatan kemampuan literasi siswa. Kendati demikian, pemberantasan buta aksara terus berjalan.

Permendikbud tersebut juga mendorong munculnya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Gerakan Literasi Bangsa (GLB) di Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Semua program dan gerakan itu diwadahi dalam Gerakan Literasi Nasional (GLN).

Buku Panduan

Sejak Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti terbit, grup *Whatsapp* yang diikuti Hamid selalu ramai dengan pertanyaan: kapan buku panduan terkait literasi sekolah diterbitkan?

Hamid merasa heran dengan pertanyaan yang bertubi-tubi dilontarkan sejumlah kepala dinas pendidikan itu. Di benaknya, ketika Permendikbud itu terbit, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, kepala dinas dipersilakan membuat turunannya berupa petunjuk teknis. Sebab kondisi literasi di tiap daerah berbeda-beda.

Pertanyaan itu tak kunjung mereda. Mereka butuh payung hukum dan penjelasan detail. Akhirnya, Hamid mulai mendorong proses pembuatan buku panduan literasi sekolah.

Proses itu diawali dengan pertemuan perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Dikdasmen[3]. Mereka diminta membuat buku panduan terkait literasi sekolah. Di antara sekian unit kerja, Direktorat PSD lebih dulu memiliki draf buku panduan literasi. Pertemuan pertama menyepakati bahwa diperlukan buku panduan umum dan buku panduan khusus. Panduan umum berisi garis besar petunjuk pelaksanaan literasi sekolah. Sedangkan panduan khusus membahas petunjuk teknis penyelenggaraan literasi di tiap satuan pendidikan. Draf panduan literasi SD dijadikan acuan pembuatan karena

Hamid Muhammad. Foto: Billy

kerangka tulisannya (*outline*) dipandang bagus[4].

Agenda pada pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah merevisi semua panduan. Rapat sering digelar di ruang kerja Dirjen. Hamid sering hadir memberi arahan dan terlibat dalam diskusi. Forum menyepakati, agar panduan lebih kaya, diperlukan masukan dari kalangan internal dan eksternal Kemendikbud.

Semiloka Literasi Sekolah

Semiloka Literasi Sekolah digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 24 – 26 November 2015. Surabaya sengaja dipilih karena kota ini mendeklarasikan diri menjadi Kota Literasi pada 2014. Sarana-prasarana literasi dianggap telah memadai dan dapat dijadikan contoh bagi kabupaten/kota lain di Indonesia.

Acara tiga hari ini diseting agak berbeda. Sebelum acara dimulai, tim menyebar ke sekolah yang telah melaksanakan budaya literasi[5]. Di sana tim direktorat menggali program dan kegiatan literasi yang telah berjalan di sekolah sasaran.

Siangnya, tiap tim mempresentasikan temuannya. Menganalisis kelebihan dan kelemahan program. Semuanya menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan Panduan Umum dan Petunjuk Teknis.

Selasa sore, acara dibuka oleh Hamid Muhammad. Ia menceritakan pengalamannya berkunjung ke berbagai daerah. Katanya, terkait program 15 menit membaca buku nonteks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai (selanjutnya disebut: 15 menit membaca), banyak sekolah yang belum mengetahuinya. Buku bacaan di sebagian daerah masih langka. Perpustakaan sekolah sesak buku pelajaran namun sepi buku nonteks pelajaran. Ia pun berkali-kali bertemu kepala dinas pendidikan dan diminta membuat panduan pelaksanaan serta panduan teknis literasi.

Satu hal menarik yang disampaikannya adalah mengenai penjenjangan buku (*book leveling*). Penempatan buku bacaan fiksi dan nonfiksi (nonteks pelajaran), katanya, harus sesuai dengan jenjang pendidikan. Tidak bisa, misalnya, bahan bacaan siswa SMA ditaruh di perpustakaan SD. Kebutuhan ini belakangan menjadi dasar penyelenggaraan Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku yang dilaksanakan Ditjen Dikdasmen.

Acara dua malam itu selalu berakhir menjelang tengah malam. Gairah melakukan perubahan anak bangsa melalui literasi sekolah begitu membara di benak para peserta.

Di tingkat internal Ditjen Dikdasmen, hubungan para personel yang mengawal literasi sekolah semakin menguat. Unsur birokrat, akademisi, pegiat literasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyatu. Mereka kelak disatukan dalam wadah Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah.

Penjenjangan Buku

Di Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara maju Eropa, dunia perbukuan mengalami kemajuan pesat. Mereka memiliki sistem penjenjangan buku yang memudahkan guru, orang tua, dan siswa untuk memilih buku bacaan yang sesuai, sementara penerbit tahu buku seperti apa yang baik untuk diproduksi. Penelitian terkait teks dan minat baca juga marak.

Buku terbit setelah melewati proses yang panjang. Terutama buku-buku yang diproduksi untuk konsumsi balita, anak, dan remaja. Aspek konten, kebahasaan, dan kegrafikaan betul-betul diperhatikan.

Kebutuhan akan penjenjangan buku berangkat dari kesadaran bahwa kegiatan membaca dapat meningkatkan kefasihan dalam membaca, memahami kosakata, dan mencerna pengetahuan.

Problemnya, setiap orang memiliki kemampuan membaca berbeda. Faktor pengalaman dan lingkungan berpengaruh besar dalam pemahaman seseorang terhadap buku bacaan.

Di negara yang letak geografis dan latar belakang penduduknya begitu beragam seperti Indonesia, pemetaan atas kemampuan membaca anak sangat diperlukan. Seorang anak usia 7 tahun di Pulau Jawa bisa jadi sudah fasih membaca ketimbang anak seusianya di Papua. Seorang siswa kelas VII di Pulau Batam, misalnya, sudah bisa menarasikan grafik ketimbang siswa kelas sama di Pulau Alor.

Di perpustakaan sekolah, bahkan, tak jarang ditemui buku bacaan yang tersimpan tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya. Di toko buku, orang tua tidak tahu mana buku yang sesuai dengan perkembangan usia anaknya.

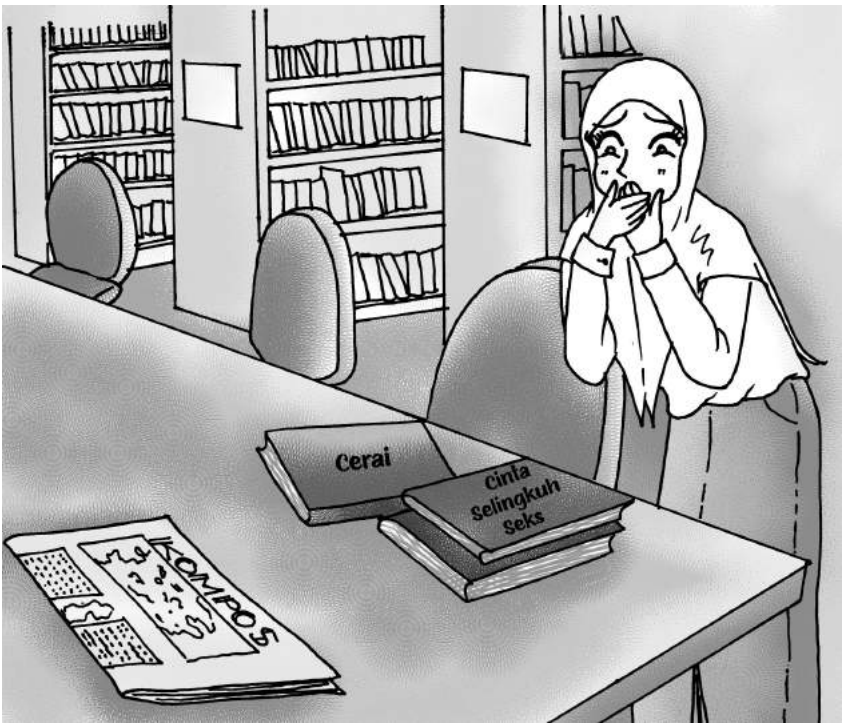

Awalnya disadari bahwa instansi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Penjenjangan Buku adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Namun, dari komunikasi yang dijalin dengan Puskurbuk, Penjenjangan Buku tidak menjadi kegiatan prioritas lembaga di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud itu. Fokus Puskurbuk masih pada penyempurnaan Kurikulum 2013 dan penerbitan Permendikbud tentang pengaturan buku di sekolah.

Akhirnya, atas dasar kebutuhan hadirnya sistem penjenjangan buku dan tanggung jawab pada peserta didik dan satuan pendidikan, Ditjen Dikdasmen berinisiatif untuk menggelar Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku[7].

Kecuali pada Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku (DPPB) I, alur kegiatan DPBB selalu sama: ada diskusi panel yang menghadirkan pakar (biasanya akademisi) dilanjutkan diskusi kelompok. Ada sejumlah catatan menarik dari tiap pelaksanaan acara.

Pada DPPB I[8], penyamaan paradigma pentingnya Penjenjangan Buku dimulai dengan menentukan dasar penjenjangan buku: usia, jenjang pendidikan, atau kemampuan membaca anak. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, diputuskan dasar penjenjangan buku adalah opsi ke-3[9].

Pada DPPB II[10], selain menyempurnakan hasil draf Penjenjangan Buku I, juga hangat dibicarakan mengenai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Permendikbud yang diterbitkan pada 29 Februari 2016 itu mengatur detail buku yang boleh beredar di sekolah dan atribut yang harus disematkan pada buku. Hal ini mengundang kontroversi di kalangan peserta.

Narasumber dari Puskurbuk menjelaskan aturan tersebut. Ringkasnya, Permendikbud itu tidak berlaku surut. Buku yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud tersebut dilarang beredar di sekolah jika terbit setelah Februari 2016[11].

Ketimbang DPPB sebelumnya, peserta pada DPPB III[12] lebih beragam, bahkan diikuti seorang wartawan. Kendati prosesnya masih panjang, namun upaya Kemendikbud menerbitkan sistem penjenjangan buku dianggap perlu dipublikasikan. Pada acara ini, draf Penjenjangan Buku II ditelaah lebih dalam, termasuk terhadap model penjenjangan yang dilakukan oleh YLAI dan Provisi Edukasi.

Acara DPPB IV, yang dihadiri anggota Satgas GLS dan Puskurbuk, tidak menghadirkan narasumber. Acara berupa diskusi kelompok, menyempurnakan dan menyelaraskan draf Penjenjangan Buku III dengan sistem penilaian dan penelaahan yang digunakan Pusat Perbukuan. Peserta diskusi juga bersepakat bahwa sistem Penjenjangan Buku akan diundangkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Maka, naskah akademik perlu pula dibuat untuk mendukung pembuatan Permendikbud.

Dalam perjalanan selanjutnya, Pangesti Wiedarti, Ketua Satgas GLS, menilai draf Penjenjangan Buku IV belum sempurna. Draf masih terlalu umum, belum spesifik. Hal demikian akan membuat penerbit bingung saat menggunakannya. Ia kemudian merencanakan penyelenggaraan DPPB V dengan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) sebagai penyelenggara.

Peserta DPPB V[13] dominan dihadiri para penerbit, terutama editor. Mendikbud Muhadjir Effendy membuka acara dan menyampaikan harapan agar Indonesia dapat segera memiliki sistem Penjenjangan Buku. Tiga kelompok diskusi (konten, bahasa, grafika) memberikan masukan dan koreksi atas draf Penjenjangan Buku IV kemudian menyampaikannya kepada Kepala Puskurbuk Awaludin Tjalla. Penyerahan itu adalah simbol bahwa draf Penjenjangan Buku sepenuhnya di tangan Puskurbuk. Ditjen Dikdasmen telah tunai mengawal prosesnya.

Penyempurnaan Panduan GLS

Nomenklatur 'Gerakan Literasi Sekolah' dirumuskan dalam rapat yang digelar pada akhir tahun 2015. Prosesnya tidak memakan waktu lama. Semua peserta memahami bahwa Mendikbud Anies Baswedan menjadikan 'gerakan' sebagai ciri pembangunan pendidikan. Hal itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 yang menjadi dasar GLS, di mana Pasal 2 ayat (c) menyebutkan bahwa 'Penumbuhan Budi Pekerti bertujuan untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.'

Pada akhir 2015 hingga awal 2016, penyempurnaan Panduan GLS semakin gencar. Penyusunan Panduan Umum dan Petunjuk Teknis GLS tidak selalu melalui rapat-rapat bersama. Frekuensi rapat bersama bisa dihitung dengan jari. Diskusi sering melalui grup *Whatsapp*. Pagi-siang-sore-malam.

Di awal Januari 2016, nomenklatur dan pengemasan dokumen panduan berubah. Awalnya dokumen bernama Panduan Umum dan Petunjuk Teknis. Keduanya dibundel menjadi satu dokumen. Kemudian, setelah melewati sejumlah pertimbangan, nomenklatur 'Panduan Umum' berubah menjadi 'Desain Induk'. Sedangkan 'Petunjuk Teknis' berubah menjadi 'Panduan GLS' per satuan pendidikan.

Hamid Muhammad tidak pernah lepas perhatian. Ia ingin panduan yang dibuat diuji publik. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagai institusi yang mulai 2015 di bawah kewenangan Ditjen Dikdasmen, turut dilibatkan. Guru, kepala sekolah, dan pengawas selaku warga sekolah juga harus dimintai pendapat[14]. Semua masukan dimanfaatkan untuk memperkaya Panduan Umum dan Petunjuk Teknis.

Penyusunan panduan GLS tergolong sangat dinamis. Memakan waktu panjang dan melelahkan. Sebagai dokumen yang akan menjadi pedoman pelaksanaan secara nasional, berbagai aspek harus diperhitungkan dan benar-benar dipertimbangkan.

Satu hal penting yang mewarnai penyempurnaan panduan GLS adalah sinkronisasi terhadap Nawacita Presiden Joko Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Kemendikbud. Hal-hal pokok dalam Kurikulum 2013 juga mendapat perhatian serius terutama dalam penyusunan Panduan GLS per satuan pendidikan.

Penyusunan panduan juga tidak dianggap sebagai sesuatu yang final. Pro-kontra terhadap konten, andaipun ada, dipandang sebagai sesuatu yang lumrah. Kritik yang agak keras menilai Desain Induk terlalu akademis sehingga sulit dipahami guru. Hamid menegaskan dokumen tersebut akan mengalami penyesuaian dan pembaruan dikemudian hari.

Panduan juga tidak diniatkan untuk berdiri sendiri. Ada buku manual yang akan disiapkan mendampingi Desain Induk dan Panduan GLS per satuan pendidikan[15].

Pada pertengahan Maret, Desain Induk GLS dan Panduan GLS di SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB rampung. Untuk mempermudah publik memahaminya, pada tiap dokumen dicantumkan nomor telepon anggota Satgas. Masyarakat dapat menghubungi nomor tersebut untuk konsultasi dan bertanya informasi seputar GLS. Pangesti Wiedarti, Ketua Satgas GLS, menilai pembuatan dokumen publik dalam lima bulan sangatlah sulit. Hanya komitmen dan keseriusan anggota Satgas GLS serta kawalan Dirjen Dikdasmen yang membuat dokumen itu cepat selesai.

Pembentukan Satgas GLS

Untuk memastikan panduan GLS disusun dengan baik dan berjalan sesuai harapan, Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad membentuk Satuan Tugas (Satgas) GLS. Ada empat tugas yang diemban Satgas GLS sesuai SK Dirjen Dikdasmen Nomor 35/D/KEP/TU/2016 yang terbit pada 22 Januari 2016. *Pertama*, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait literasi dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. *Kedua*, mengimplementasikan literasi sekolah sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Literasi Sekolah yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. *Ketiga*, Melakukan promosi literasi sekolah menggunakan berbagai media. *Keempat*, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program literasi sekolah yang telah berjalan.

Anggota Satgas terdiri dari unsur birokrat, akademisi, pegiat literasi, dan lembaga swadaya masyarakat[16]. Keragaman unsur ini mengisyaratkan komitmen dalam menjalankan program-program pendidikan melalui jalur gerakan.

Dalam perjalanannya, kegiatan yang dilakukan beberapa personel di luar Ditjen Dikdasmen turut mendukung pelaksanaan GLS. Sofie Dewayani, misalnya, melakukan pelatihan kepada guru SD kelas rendah di Bandung yang merupakan kegiatan rutin yayasannya. Ia juga membuat dan menerbitkan buku-buku cerita anak, beberapa di antaranya mendapatkan penghargaan di luar negeri.

Roosie Setiawan, yang selama bertahun-tahun berkampanye tentang pentingnya *read aloud* (membaca nyaring) kepada orang tua dan guru melalui pelatihan-pelatihan dan radio, kini terus bergerilya mengampanyekan *read aloud* di kalangan guru.

Wien Muldian, Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta yang merupakan aktivis perbukuan sebelum jadi PNS di Kemendikbud, masih membangun jejaring dengan aktivis dan relawan literasi

di berbagai daerah. Luasnya jaringan dan kokohnya jalinan emosi dengan para pegiat Taman Bacaan Masyarakat memudahkan GLS dalam pelibatan pegiat literasi di daerah.

Pratiwi Retnaningdyah dan Kisyani merintis Pusat Studi Literasi (PSL) di Unesa. Keberadaan PSL sangat penting dalam mendorong mahasiswa dan dosen melakukan penelitian-penelitian terkait literasi sekolah. Diharapkan ke depan Perguruan Tinggi menjadi penyangga bagi kegiatan literasi di berbagai daerah, di antaranya melakukan pendampingan terhadap sekolah.

Pangesti Wiedarti, dengan beragam keterlibatan dalam sejumlah program bersama Badan Bahasa, Puskurbuk, dan Pendidikan Tinggi, mampu menjalin kesinambungan dan elaborasi antara GLS dengan Kurikulum 2013 serta pengembangan kerja sama antarlembaga.

Di lingkungan Ditjen Dikdasmen, GLS dimasukkan ke dalam sejumlah program kegiatan, baik berupa sosialisasi maupun bimbingan teknis. Disamping Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah, GLS merupakan program andalan yang wajib disosialisasikan dalam berbagai kegiatan.

Sosialisasi

Sosialisasi GLS ke publik tidak dimulai saat buku panduannya selesai dibuat—Maret 2016. Sosialisasi dilakukan dua bulan sebelumnya, tepatnya pada 27 Januari 2016.

Pada tanggal itu, di Gedung Ki Hadjar Dewantara lantai 3 Kompleks Kemendikbud Senayan Jakarta, DKI Jakarta mendeklarasikan diri sebagai provinsi literasi. Mendikbud Anies Baswedan direncanakan hadir membuka acara. Salah satu rangkaian acara adalah penyerahan Panduan GLS secara simbolis dari Dirjen Dikdasmen kepada Mendikbud. Kendati kemudian Mendikbud

tidak dapat hadir dan diwakili oleh Sekretaris Jenderal, buku Desain Induk GLS dan Panduan GLS tiap satuan pendidikan diserahkan secara institusional dari Ditjen Dikdasmen kepada Kemendikbud[17].

Sosialisasi berikutnya saat acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, pada 21 – 23 Februari 2016. Saat itu, karena dirasa Desain Induk dan panduan lain belum sempurna tata letaknya (*lay out*), sosialisasi dilakukan melalui penerbitan Buku Saku GLS. Buku ini merupakan intisari Desain Induk. Selain itu, *standing banner* GLS diletakkan di sejumlah sudut gedung lokasi acara.

Desain Induk dan Panduan GLS tiap satuan pendidikan dicetak dan disosialisasikan secara utuh ketika penyelenggaraan *Workshop* GLS. Acara yang mengundang 34 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, 33 Kepala LPMP, dan 514 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia ini digelar dalam lima angkatan[18].

Ada beberapa hal unik dalam *workshop* ini. *Pertama*, dalam tiap acara, selain menampilkan narasumber internal, diundang pula narasumber dari luar Kementerian, yaitu guru/kepala sekolah pelaksana GLS dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota percontohan literasi[19].

Kedua, pada sesi terakhir digelar diskusi kelompok dan presentasi. Peserta dibagi dalam enam kelompok. Tiap kelompok merumuskan rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pusat dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS. Diskusi seperti ini mengadopsi model diskusi yang diterapkan pada RNPK.

Setidaknya ada dua hal pokok dukungan GLS yang ditekankan kepada para peserta sekembali ke daerah masing-masing. *Pertama*, pengalokasian dana dalam APBD. *Kedua*, pembuatan regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota/Bupati dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan. Setelah kembali ke daerah masing-masing, beberapa Dinas Pendidikan mengabarkan tengah menyusun Peraturan Wali Kota/Bupati dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan yang

dibingkai dalam deklarasi kabupaten/kota literasi.

Sosialisasi GLS yang tergolong strategis juga dilakukan pada saat pelatihan instruktur Kurikulum 2013, mulai dari Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, Instruktur Provinsi, Instruktur Kabupaten/Kota, hingga Guru Sasaran. Program GLS masuk sebagai materi umum dengan durasi 2 jam pelajaran (90 menit).

Sekolah rujukan mendapatkan porsi perhatian yang lebih. Setiap direktorat menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap sekolah rujukan yang tersebar se-Indonesia. Mereka mendapatkan sosialisasi, pelatihan, dan kucuran dana agar GLS dapat langsung diterapkan di sekolah masing-masing.

Sekolah rujukan dipilih karena amanat yang ditanggungnya. Mereka wajib mengimbaskan program Pemerintah kepada sekolah-sekolah di sekitarnya.

Pada semester II, sosialisasi GLS dilakukan dalam kegiatan yang sangat beragam, baik dalam bentuk bimbingan teknis, festival dan lomba, maupun stan pameran. Undangan dari berbagai instansi dan lembaga juga berdatangan dalam bentuk seminar dan pelatihan, di antaranya organisasi guru, asosiasi penerbit, dinas pendidikan, dan perguruan tinggi. Undangan yang bersifat kebijakan biasanya dipenuhi oleh Dirjen Dikdasmen atau Sekretaris Ditjen. Sedangkan undangan untuk mengisi pelatihan dan hal teknis lainnya digawangi anggota Satgas GLS. Hal ini mengindikasikan antusiasme berbagai pemangku kepentingan terhadap GLS begitu tinggi.

Di akhir tahun, sejumlah rektor dan kementerian diundang[20]. Program GLS membutuhkan dukungan luas agar bisa berjalan optimal. Dari perguruan tinggi, bentuk dukungan yang diharapkan antara lain pendirian Pusat Studi Literasi, penelitian skripsi/tesis/disertasi mengenai literasi, dan Kuliah Kerja Nyata bertema literasi. Dari Kementerian Perhubungan diharapkan menyediakan area baca di tiap stasiun dan bandar udara. Kementerian Agama diharapkan menduplikasi program GLS menjadi Gerakan Literasi Madrasah.

Kementerian Keuangan, melalui Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP), diharapkan membuka beasiswa S-2 dan S-3 dalam dan luar negeri untuk program studi literasi. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri diharapkan membuat penghargaan Adiliterasi, yaitu anugerah yang diberikan kepada daerah yang berkontribusi membangun gerakan literasi[21].

Dukungan Anggaran

Hamid Muhammad paham betul dana pembelian buku menjadi salah satu hal krusial dalam pengadaan buku. Ia berupaya agar kebijakan pendanaan di tingkat Pusat diarahkan untuk mendukung implementasi GLS.

Pertama, melalui penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika hingga 2014 sekolah hanya boleh menggunakan BOS untuk membeli buku pelajaran, maka pada 2015 ketentuan tersebut diubah. Dengan dana BOS, kini sekolah dapat membeli buku nonteks pelajaran, yaitu buku pengayaan dan referensi. Tak hanya itu, untuk pengembangan perpustakaan, sekolah dapat berlangganan majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik luring (*offline*) maupun daring (*online*)[22].

Kedua, melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Permendikbud Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 telah menyebut jenis koleksi perpustakaan yaitu buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidikan. Namun, proporsi anggaran pengadaan buku tidak disebutkan.

Baru pada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, proporsi pengadaan buku

pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik disebutkan yaitu ±50% dari alokasi DAK. Angka ini lebih besar ketimbang proporsi untuk media pendidikan sebesar ±30% dan proporsi untuk peralatan pendidikan sebesar ±20%[23].

Selain BOS dan DAK, bantuan kepada sekolah dalam jumlah terbatas juga dilakukan oleh sejumlah direktorat. Bantuan tersebut digunakan untuk pengadaan sarana-prasarana literasi di sekolah seperti pembelian buku, sudut baca, penyelenggaraan lomba, dan pojok literasi. Sekolah sasaran penerima bantuan pemerintah rata-rata adalah sekolah rujukan. Hal ini dilakukan mengingat sekolah rujukan memiliki tanggung jawab untuk mengimbaskan program-program terbaru pemerintah kepada sekolah di sekitarnya. Pemberian bantuan selalu diiringi dengan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai praktik baik literasi.

Pemberian bantuan diniatkan sebagai stimulan kepada sekolah agar dapat menjadi contoh ideal pelaksanaan GLS. Diharapkan kemudian sekolah dapat berkreasi dan berinovasi serta menularkannya ke sekolah lain.

Tapi, di kalangan Satgas GLS sendiri, muncul kritik terkait pemberian bantuan pemerintah. Pemberian bantuan dikhawatirkan justru memanjakan sekolah sehingga program GLS berhenti ketika bantuan dihentikan. Kekhawatiran lain yaitu kukuhnya anggapan bahwa pengguliran program identik dengan pemberian bantuan dana.

Peniadaan bantuan dipandang justru akan membuat sekolah lebih kreatif. Mereka akan menggunakan berbagai sumber daya di sekitarnya untuk menjalankan program literasi. Pelibatan publik juga dirasa bisa lebih luas jika berada dalam kondisi semangat meluap tetapi dana terbatas.

Gerakan Literasi Nasional

Gerakan Literasi Nasional (GLN) resmi ditetapkan pada tanggal merah. Jumat pagi, 25 Maret 2016, Mendikbud Anies Baswedan menggelar rapat terbatas di Gedung Ki Hadjar Dewantara, Senayan, Jakarta. Sejumlah pejabat hadir. Tujuan pertemuan yaitu sinkronisasi program literasi yang telah dijalankan oleh unit-unit utama di lingkungan Kemendikbud.

Setelah Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti terbit, sejumlah unit utama gencar melakukan sosialisasi dan menjalankan program literasi. Ditjen Dikdasmen dengan Gerakan Literasi Sekolah. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat dengan Gerakan Indonesia Membaca. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Gerakan Literasi Bangsa. Sementara unit utama lain bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Agar terjadi sinergi dan menghindari tumpang tindih program, diperlukan satu wadah yang mengkoordinasi semua gerakan itu. Maka lahirlah GLN. Anies menunjuk Harris Iskandar, Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, menjadi koordinatornya. Alasannya, jangkauan PAUD dan Dikmas (masyarakat) relatif tidak terstruktur ketimbang jangkauan Ditjen Dikdasmen (sekolah), sehingga perhatiannya perlu diintensifkan.

Dalam rapat ini, Anies menetapkan pola gerakan literasi yang akan dijalankan Kemendikbud, yakni menggunakan metode duplikasi. Sasaran dalam jumlah terbatas ditentukan, ditingkatkan kualitas infrastruktur dan kegiatannya menjadi yang terbaik, kemudian ditularkan ke sasaran atau daerah sekitarnya. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas.

Gerakan literasi yang mencakup sekolah, keluarga, dan masyarakat diawali dengan penumbuhan minat baca. Sebab, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Sumber daya manusia

yang ada dikerahkan untuk melakukan kampanye minat baca. Pegiat literasi digandeng. Partisipasi publik diwadahi.

Kegagalan gerakan penumbuhan minat baca di masyarakat selama ini, menurut Harris, lantaran menggunakan pendekatan struktural, bukan fungsional. Perpustakaan daerah, misalnya, dibuka pada pagi hari dan ditutup sore hari mengikuti jam kerja Pegawai Negeri Sipil. Semestinya pegiat taman bacaan masyarakat, yang telah teruji komitmennya dalam penyelenggaraan kegiatan literasi, dilibatkan dalam pengelolaan perpustakaan.

Dengan melibatkan pegiat literasi, atmosfer perpustakaan akan lebih hidup. Perpustakaan tak lagi sekadar tempat membaca dan meminjam buku. Lebih dari itu, ia menjadi pusat belajar dan interaksi masyarakat yang ingin maju melalui beragam kegiatan literasi, di antaranya bedah buku, diskusi tentang buku, dan festival.

Penggantian Anies Baswedan dari jabatan Mendikbud pada akhir Juli 2016 turut memengaruhi kepemimpinan GLN. Mendikbud Muhadjir Effendy memercayakan GLN kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sering pula disebut Badan Bahasa) Prof. Dadang Sunendar. Di bawah kepemimpinan Dadang Sunendar, GLN merangkul semua unit utama Kemendikbud secara lebih intens.

Ilza Mayuni (mantan Sekretaris Badan Bahasa) yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), turut berperan penting dalam menjalankan roda GLN. Bersama Ananto Kusuma Seta, Staf Ahli Menteri bidang Inovasi dan Daya Saing, ia menggelar sejumlah diskusi kelompok terpumpun (*focus discussion group*) membahas buku-buku panduan GLN. Tiap kegiatan melibatkan semua pemangku kepentingan seperti akademisi, birokrat, pegiat literasi, lembaga swadaya masyarakat, dan kementerian/lembaga di luar Kemendikbud.

BAB III

15 Menit Membaca

Ruangan tanpa buku seperti tubuh tanpa jiwa.
(*Marcus Tullius Cicero, Filsuf Romawi Kuno*)

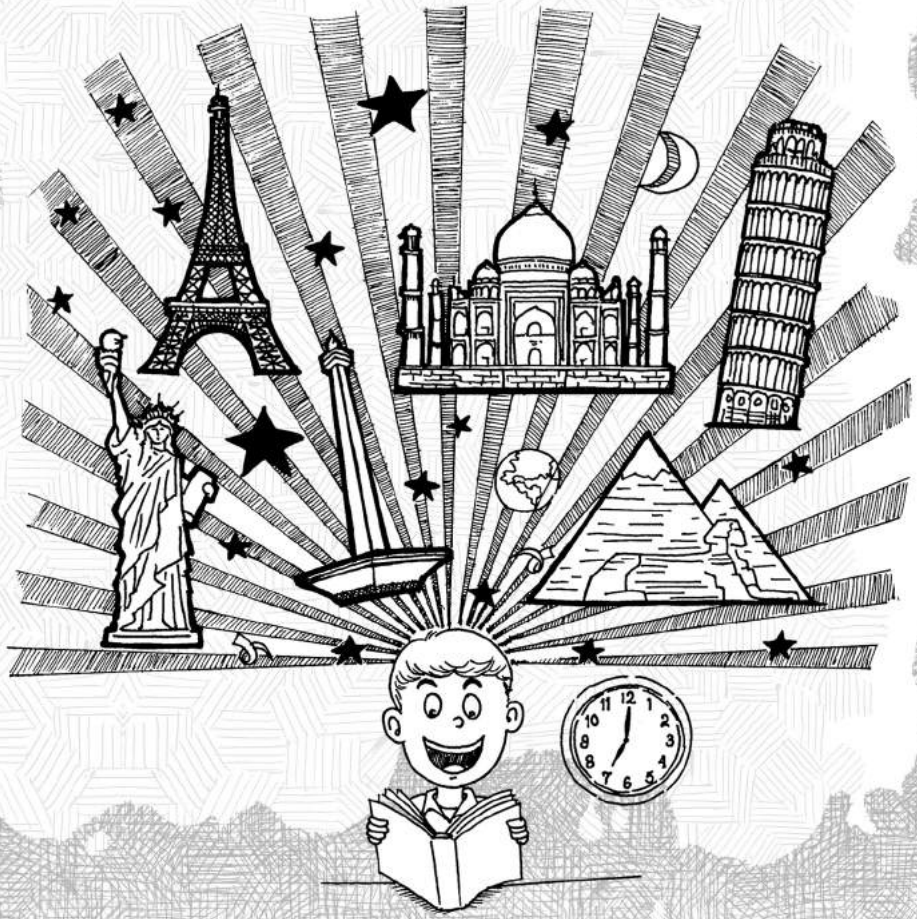

Mungkin ada yang bertanya, mengapa waktu membaca ditetapkan 15 menit, tidak 10, 20, 30 menit, atau 1 jam? Adakah landasan ilmiahnya?

Janice L. Pilgreen (*The SSR Handbook*, 2000) menilai persoalan pokok yang dihadapi guru agar siswanya gemar membaca tidak terletak pada durasi waktu membaca, melainkan frekuensi kegiatan membaca. Berapapun waktu yang dihabiskan siswa dalam satu kegiatan membaca bukanlah soal. Yang terpenting, siswa melakukan kegiatan membaca secara berulang-ulang dan setiap hari.

Kunci utama menjadikan siswa gemar membaca, kata Pilgreen, adalah meletakkan membaca sebagai kegiatan reguler siswa. Tidak ada jaminan semua siswa punya waktu membaca di luar sekolah. Di rumah, mereka bisa saja sibuk bermain, bekerja membantu orang tua, atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya dengan melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan kegiatan membaca. Lebih buruk lagi ketika mereka tidak punya teladan membaca di sekitarnya.

Maka sekolah, bagaimanapun kondisinya, harus memberi waktu khusus kepada siswa untuk melakukan aktivitas membaca. Ada waktu resmi, yang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah, khusus untuk membaca.

Alokasi 15 menit untuk membaca sebagaimana tertera dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, tidak perlu juga dimaknai sebagai durasi ideal untuk membaca. Lima belas menit adalah waktu minimal untuk membaca.

Dengan paradigma tersebut, sekolah bebas menambah durasi membaca siswa. Guru di jam pelajaran pertama, misalnya, bisa menambah durasi membaca siswa dengan "memakan" alokasi jam mengajarnya.

Kegiatan membaca secara reguler bertujuan untuk menanamkan kebiasaan membaca dalam diri siswa. Sehingga tidak relevan anggapan bahwa membaca cukup dilakukan sekian kali dalam seminggu asal jumlah waktu membacanya panjang. Lebih baik durasi membaca pendek namun sering dan berkala daripada durasi panjang tetapi jarang dilakukan.

Buku yang dibaca

Buku yang dibaca siswa ketika program 15 menit membaca berjalan adalah buku nonteks pelajaran (berupa buku referensi atau buku pengayaan), bukan buku pelajaran. Kenapa? Sebab siswa pasti membaca buku pelajaran sepanjang kegiatan belajar-mengajar di kelas. Harus ada waktu yang diberikan kepada mereka untuk membaca buku selain buku pelajaran.

Ada jawaban lain yang lebih pragmatis: buku pelajaran hanya sedikit sekali yang mampu menjawab persoalan dan kebutuhan hidup siswa. Banyak hal yang harus diketahui siswa yang ilmunya tidak diberikan di sekolah.

Seorang siswa yang ingin memaksimalkan potensi dirinya, misalnya, tidak bisa mendapatkan pengetahuan tentangnya dalam pelajaran IPA, IPS, apalagi matematika. Ia harus membaca buku tentang motivasi dan pengembangan diri.

Jika mereka suka sepak bola, sulit menemukan guru yang bisa menjawab pertanyaannya tentang cara membuat tendangan pisang atau mengapa Liga Spanyol didominasi oleh pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona. Hobinya memancing, membuat robot, bicara di depan massa, meyakinkan orang lain, memecahkan masalah, menghadapi teman yang angkuh, menjalani masa pubertas, dan beragam hal nonfiksi di luar kurikulum sekolah, butuh siraman pengetahuan.

Kesukaan pada sesuatu yang imajinatif, mengasah kreativitas, membangkitkan emosi, dan pelbagai hal abstrak lainnya, tidak akan tersalurkan jika hanya menekuri buku pelajaran. Siswa harus membaca buku fiksi jika ingin merasakan dan mengalami sesuatu di luar pikiran kognitifnya.

Buku fiksi, antara lain berbentuk novel, cerita pendek (cerpen), puisi, dan naskah drama, diyakini dapat membentuk karakter manusia. Penelitian Robin Dunbar, guru besar antropologi-biologi di Universitas Oxford Inggris, sebagaimana dikutip Conrad William

Watson, mengatakan cerita fiksi seperti epos dan mitos memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk corak khas suatu bangsa[1]. Sementara dongeng dan cerita rakyat mewariskan kebajikan atau menanamkan nilai luhur yang lain.

Penelitian Dunbar juga menyingkap pengaruh cerita fiksi terhadap otak manusia: menonton film atau drama fiksi dapat memicu pelepasan endorfin, senyawa kimia yang menimbulkan perasaan senang dan meningkatkan ikatan dengan orang sekitar. Proses kimiawi tersebut dapat mendukung kerapatan anggota komunitas atau kohesivitas sosial.

Bahkan, kitab agama seperti Al-Qur'an, memuat banyak cerita tentang kisah umat terdahulu dan peristiwa masa mendatang. Dari kisah-kisah masa lalu yang sarat makna dan hikmah, serta kejadian niscaya di masa depan, diharapkan para penganutnya memikirkan dan dapat mengambil pelajaran. Tuhan sangat paham bahwa manusia suka cerita sehingga wahyu yang diturunkan sebagian besar dalam bentuk cerita.

Jim Trelease, jurnalis dan pendidik asal Amerika Serikat, menyatakan literatur fiksi memberi arti bagi kehidupan manusia yang merupakan tujuan sejati dari semua pendidikan. Ia membawa anak pada situasi paling dekat dengan hati manusia dan memberikan arti kehidupan yang paling jelas. (*Read-Aloud Handbook*, 2008).

Problemnya, di sekolah, siswa tidak menerima pelajaran sastra (di mana bahan bacaannya lebih banyak tentang cerita fiksi) dan agama secara memadai. Sastra yang dapat mengembangkan kepekaan terhadap orang dan lingkungan sekitar seperti berada di atas menara: tidak tergapai dan sulit dipahami.

Di sisi lain, Watson mengkritik, cerita-cerita tentang Nabi yang diajarkan di sekolah terasa kering dan tidak hidup. Siswa hanya diminta menghafal cerita, bukan menyerap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cerita. Sehingga guru didorong untuk melakukan terobosan, mengandalkan kreativitas dan pengalamannya untuk menanamkan kebajikan lewat kegiatan bercerita tanpa terkesan berkhotbah.

Melalui GLS, di mana siswa didekatkan dengan beragam bahan bacaan, imajinasi mereka dapat terbangun. "Pergaulan" pikiran dan hati mereka menjadi lebih luas dan terbuka. Mereka mengenal banyak hal di luar jangkauan kehidupan keseharian, bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya.

Dengan membaca buku fiksi yang ditulis oleh sastrawan dunia, pikiran siswa dapat berkelana ke berbagai belahan benua. Belajar tentang budaya, bahasa, gaya hidup, dan filosofi kehidupan manusia.

Waktu yang pas

Saat penyelenggaraan *Workshop* GLS, tak sedikit peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala LPMP mempertanyakan waktu pelaksanaan 15 menit membaca sebelum jam pertama dimulai. Kenapa harus sebelum masuk sekolah? Bagaimana kalau di tengah atau di akhir KBM?

Pertanyaan ini bukan tanpa sebab. Kondisi tiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang sudah menjalankan program 15 menit membaca al-Qur'an sebelum pelajaran pertama di mulai. Apakah dengan program baru pemerintah, program yang sudah lama berjalan harus dihapus? Tentu saja tidak!

Di SMAN 4 Pekanbaru, Riau, program 15 menit membaca buku nonteks pelajaran dilakukan setelah program 15 menit membaca al-Qur'an (bagi yang beragama Islam) berakhir. Pukul 07.00 – 07.15 WIB, siswa beragama Islam membaca al-Qur'an dan siswa beragama lain membaca kitab agamanya masing-masing. Pukul 07.15 – 07.30, semua siswa membaca buku nonteks pelajaran. Memang, konsekuensinya, waktu datang ke sekolah dimajukan lebih awal.

Suasana 15 menit membaca di SMAN 4 Pekanbaru, Riau. Foto: Billy

Atau bisa saja program ini dijalankan sebelum atau setelah jam istirahat. Atau pula setelah jam pelajaran terakhir selesai. Keputusan ini diambil biasanya karena sekolah agak berat memajukan waktu datang siswa ke sekolah.

Di SMA Negeri 1 Balen Bojonegoro, Jawa Timur, khusus untuk jam pertama pelajaran, durasi waktunya 60 menit. Lima belas menit pertama digunakan untuk kegiatan membaca. Empat puluh lima menit berikutnya untuk kegiatan mata pelajaran.[2]

Kegiatan literasi yang didengungkan Kemendikbud pada pertengahan 2015 sama sekali bukan program baru. Keberaksaraan atau kegiatan membaca sebenarnya selalu dibawa oleh setiap Mendikbud. Tapi sebagai sebuah kebijakan yang diatur dalam Permendikbud, baru kali ini dilakukan.

Satgas GLS sendiri, dalam tiap acara sosialisasi, termasuk melalui infografis yang disebarluaskan ke publik, tidak memaksakan bahwa program 15 menit membaca harus dilakukan sebelum jam pertama dimulai. Kepala sekolah dipersilakan mengatur waktu pelaksanaannya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Peletakan kegiatan membaca sebelum jam pertama dimulai dipandang untuk

mempermudah pengaturan KBM.

Terlebih, dalam Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti, kegiatan wajib yang dilakukan sebelum hari pembelajaran dimulai tak hanya 15 menit membaca. Kegiatan itu antara lain membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan/atau lagu satu lagu wajib nasional, olahraga minimal sekali seminggu, dan upacara bendera tiap Senin.

Di manapun peletakannya (di awal, tengah, atau akhir KBM), program 15 menit membaca janganlah dianggap sebagai beban. Program ini hendaknya dipandang dan dilaksanakan sebagai kegiatan menyenangkan. Bukankah menyimak cerita pujangga, pendongeng, profesor, pengusaha, guru, dan orang-orang hebat lainnya adalah kegiatan yang menyenangkan? Rasanya, 15 menit bertemu mereka sangatlah kurang. Kepala sekolah dan guru yang mampu mengondisikan suasana batin siswa bahwa membaca adalah aktivitas menyenangkan akan menuai kepuasan atas program ini.

Cara membaca

Di sejumlah sekolah yang pernah saya kunjungi, kegiatan 15 menit membaca diisi dengan sesuatu yang monoton: siswa membaca buku di kursinya sementara sang guru berdiri mengawasi. Apakah tidak ada cara lain yang lebih mengasyikkan?

Saya pernah berbincang dengan seorang kepala SD swasta favorit. Ia menerapkan program 15 menit membaca hanya dengan metode membaca mandiri (*dependent reading*). Semua kelas di sekolahnya yang saya sambangi, dari kelas I hingga VI, tak satupun yang menerapkan metode membaca yang berbeda.

Pertanyaannya kemudian, adakah metode membaca lain selain membaca mandiri? Jawabannya: ada! Setidaknya ada tiga metode lain selain membaca mandiri, yaitu membaca nyaring (*read aloud*), membaca bersama (*shared reading*), dan membaca terpandu (*guided reading*)[3].

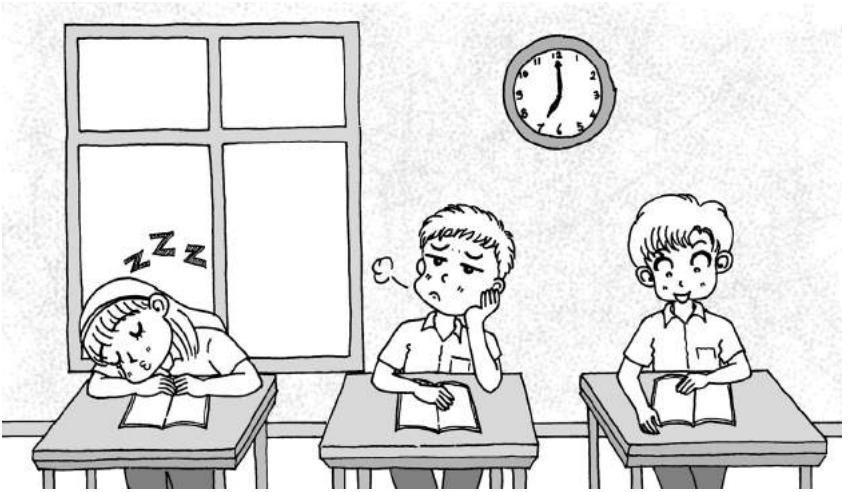

Pada membaca nyaring atau *read aloud*, guru membacakan buku dengan suara lantang sementara siswa menyimak. Di tengah kegiatan membaca, ia bisa mengajak siswa untuk menerka isi cerita. Usai membacakan buku, ia bisa melontarkan pertanyaan kepada siswa tentang isi buku; tokoh-tokohnya, pesan cerita, dll. Intinya, ada dialog dan interaksi yang menghubungkan antara guru, siswa, dan isi cerita.

Di SD Negeri Purworejo, Sleman, D.I. Yogyakarta, guru membaca buku sambil menunjukkan ekspresi sementara murid-murid duduk di atas tikar. Menurut Sri Maryati, kepala sekolah, anak-anak kelas rendah yaitu kelas I, II, dan III sangat tertarik mengikuti sesi ini[4]. Mereka bisa belajar tentang kosa kata, pelafalan, dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, membaca bersama (*shared reading*). Di sini guru membacakan kata atau kalimat dalam buku dengan suara nyaring. Kemudian, guru dan siswa membaca bersama-sama kalimat yang tadi dibacakan. Melalui metode ini, guru dapat mencontohkan bagaimana membaca buku secara baik dan menyenangkan, yaitu dengan mengatur tempo dan irama suara. Sementara siswa dapat meniru pelafalan kata/kalimat dan memahami maknanya melalui

tempo dan irama suara serta ekspresi guru.

Agar mudah terbaca siswa, guru dapat menggunakan buku berukuran besar (*big book*). Biasanya, buku besar berupa buku bacaan anak dan ensiklopedia.

Di SDN Purworejo, salah satu modifikasi metode membaca ini adalah membaca berpasangan. Guru membentuk kelompok kecil, terdiri dari 2-3 siswa, kemudian mereka membaca secara bergantian. Upayakan siswa dalam satu kelompok memiliki kemampuan membaca yang hampir sama. Jangan sampai anak yang kemampuan membacanya lambat dicampur dengan anak dengan kemampuan membaca yang bagus. Sebab, jika demikian, peningkatan kemampuan membaca masing-masing anak akan terganggu.

Ketiga, membaca mandiri (*independent reading*). Di sini, masing-masing anak membaca sendiri buku pilihannya. Mereka bisa membaca dalam hati, bisa pula membaca dengan bersuara. Perlu diperhatikan, guru perlu menyepakati lebih dulu dengan siswa, apakah akan membaca dalam hati atau bersuara. Dikhawatirkan, jika di antara siswa ada yang membaca dalam hati dan bersuara, biasanya siswa yang membaca dalam hati akan terganggu konsentrasi membacanya.

Apapun metode membaca yang dipakai, inti dari kegiatan membaca adalah membangun suasana nyaman dan menyenangkan ketika berinteraksi dengan buku. Guru dapat berdiskusi dengan siswa mengenai metode yang akan dipakai.

Tahap-tahap pelaksanaan

Pada buku Desain Induk GLS yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, implementasi GLS dibagi dalam tiga tahap: pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Masing-masing tahap memiliki indikator pencapaian.

Buku Desain Induk GLS

Pada kegiatan 15 menit membaca, ditahap pembiasaan, guru tidak perlu bertanya apapun tentang isi buku yang dibaca siswa alias tanpa tagihan. Fase ini bertujuan membiasakan siswa untuk membaca. Jika siswa yang tidak terbiasa membaca diharuskan membaca lalu ditanya ini-itu tentang isi buku, dikhawatirkan hal demikian membuatnya tertekan. Kondisi tertekan akan membuatnya benci pada kegiatan membaca.

Pada tahap pembiasaan, guru sebagai teladan membaca benar-benar diperlukan. Tunjukkan kegiatan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menghibur. Perlihatkan ekspresi gembira dan bersemangat saat memegang dan membaca buku di hadapan siswa. Dengan begitu, minat siswa pada kegiatan membaca perlahan akan tumbuh.

Sebagai variasi, bisa saja guru bertanya kepada siswa tentang isi buku 2-3 minggu sekali. Beberapa pertanyaan ringan bisa dilontarkan seperti "Kenapa kamu suka baca buku itu" dan "Pengetahuan apa yang kamu dapat setelah membaca buku". Bisa juga guru menawarkan siswa untuk maju ke depan kelas menyampaikan cerita bukunya.

Pada tahap pengembangan, siswa didorong untuk menuliskan ringkasan cerita/buku dan respon mereka dalam sebuah buku khusus. Di banyak sekolah yang saya pernah kunjungi, buku khusus itu dinamakan jurnal. Rata-rata jurnal berisi tabel dengan isian kolom berupa tanggal, judul, penulis, jumlah halaman selesai

baca, dan ringkasan. Guru memeriksa jurnal dalam periode waktu tertentu.

Pada tahap pembelajaran, ketika siswa sudah terbiasa dengan rutinitas 15 menit membaca, guru mengajak siswa mengulas isi buku yang mereka baca. Suasana dialog dan diskusi terbuka dibangun. Siswa dipersilakan mengeksplorasi hasil bacaannya untuk didiskusikan bersama. Guru dapat menggunakan situasi pembelajaran ini ke dalam penilaian akademik.

Ketika penahapan ini diterapkan di sekolah, guru lebih tahu pada tahap mana kondisi siswanya berada: pembiasaan, pengembangan, atau pembelajaran. Bisa saja dari fase pembiasaan, ia melangkah ke fase pengembangan sebentar lalu berlanjut ke fase pembelajaran. Tak perlu menunggu, misalnya, satu tahun sebuah fase berjalan.

Guru teladan membaca

Saat siswa membaca, sebaiknya di mana posisi guru? Sri Maryati, Kepala SD Negeri Purworejo, Sleman, D.I. Yogyakarta, mewajibkan guru berada di kelas saat program 15 menit membaca berjalan. Termasuk guru olahraga dan agama.

Di kelas, guru tidak sekadar mengawasi aktivitas membaca siswa. Mereka juga memegang buku, ikut membaca. Atmosfer kegiatan belajar-mengajar segera terlihat jelas: siswa dan guru berada dalam posisi setara, yaitu sama-sama menimba ilmu dari buku.

Jika dikaitkan dengan metode membaca, hal di atas berlaku untuk cara membaca mandiri. Pada cara membaca nyaring, membaca terpandu, dan membaca bersama, guru dapat berperan lebih dalam: menjadi teladan membaca. Mereka mencontohkan bagaimana menikmati sebuah buku bacaan seperti mengunyah semangkuk mie—semua anak menyukai mie instan, bukan?

Ketika menerapkan ketiga metode membaca di atas, guru mengerahkan seluruh potensi, ekspresi, dan kemampuannya. Hal ini memang membutuhkan keterampilan luar biasa agar tampak sempurna. Namun guru tak perlu mengejar kesempurnaan sebab siswa hanya butuh perilaku yang dicontohkan, bukan yang ideal.

Untuk bisa menjadi teladan membaca, guru bisa mencari dan mempelajari referensi melimpah tentang kegiatan membaca dari perpustakaan dan internet, kemudian mempraktikkannya di depan kelas. Ia pun terus meningkatkan kemampuan membaca dan membaginya ke siswa, misalnya cara memahami sebuah bacaan dan meringkasnya ke dalam beragam jenis tulisan.

Meskipun kegiatan 15 menit membaca secara implisit dinyatakan dalam Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti ditujukan kepada siswa, guru menjadi komponen pelengkap dan tidak terpisahkan dalam peraturan itu. Kehadirannya di ruang kelas ketika siswa menjalankan "kewajibannya" menjadi wajib. Situasinya seperti halnya kegiatan belajar-mengajar: ada siswa dan guru, saling berinteraksi.

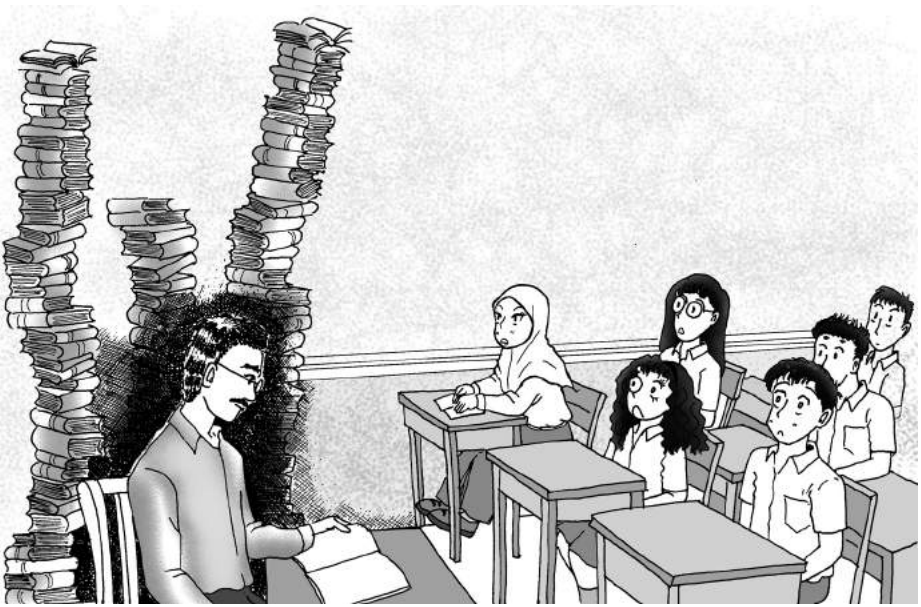

Lokasi membaca

Di manakah lokasi yang tepat untuk membaca buku? Di mana saja, yang penting tempatnya nyaman. Ada baiknya kelas tidak menjadi satu-satunya pilihan. Selain di kelas, pada waktu tertentu, guru bisa mengajak siswa membaca di taman, koridor, atau di perpustakaan sekolah.

Di sejumlah sekolah, biasanya sebulan sekali, siswa dikumpulkan di lapangan upacara. Mereka duduk sambil membaca buku dalam waktu sekian menit. Setelah membaca bersama, beberapa siswa diminta maju untuk mempresentasikan hasil bacaannya. Ada pula yang memberikan penghargaan kepada siswa yang paling banyak menamatkan bacaan buku. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan merasakan semangat kebersamaan dan memiliki pengalaman berharga terkait kegiatan membaca.

Jurnal

Tidak banyak buku yang selesai dibaca dalam waktu 15 menit. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang memudahkan siswa merekam jumlah halaman dan halaman akhir bacaan. Maka dibuatkanlah buku khusus bernama jurnal. Jurnal berisi tabel dengan isian kolom di antaranya judul buku, nama pengarang/penulis, dan jumlah halaman.

Untuk siswa SMP dan SMA, ada baiknya tabel ditambahkan isian kolom komentar. Komentar berisi resume atau pendapat siswa atas materi buku yang dibacanya. Melalui kolom ini, siswa dapat melatih kemampuan memahami dan menganalisis materi bacaan secara teratur. Guru pun dapat memahami dan menilai kemampuan berpikir siswa dari kolom komentar tersebut.

Di SMA Negeri 4 Pekanbaru, jurnal membaca siswa dipantau oleh Tim Literasi Sekolah (TLS). Dari jurnal itu dapat diketahui siswa yang paling banyak membaca buku. Pemiliknya mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah berupa buku.

Di SD Negeri Purworejo, tidak hanya siswa yang memiliki jurnal. Guru pun diwajibkan memiliki dan mengisi jurnal. Sri Maryati memantau langsung jurnal baca guru-gurunya. Dengan begitu, siswa dan guru sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama. Tak sampai di situ, ia pun memiliki buku jurnal dan menjadi teladan membaca bagi para guru.

Pemantauan buku jurnal harus benar-benar dilakukan guru. Saya pernah mendapati jurnal siswa di sebuah SD di mana terdapat delapan judul buku yang dibaca dalam waktu 15 menit. Di lain hari, 12 buku. Bagi saya, ini tidak masuk akal. Setipis-tipisnya buku cerita, butuh waktu untuk membacanya.

Saya kemudian bertanya kepada wali kelasnya. Wali kelas mengaku tidak tahu dan berdalih bahwa ia baru saja menjadi wali di kelas itu.

Dari peristiwa tersebut kekhawatiran saya mulai menemukan bukti: kegiatan 15 menit membaca, oleh sebagian guru, sadar atau tidak sadar, dijalankan untuk mengejar target membaca sebanyak mungkin buku. Anak yang membaca paling banyak buku dianggap hebat. Sekolah memuji dan memberi penghargaan kepada siswa yang paling banyak membaca buku. Tujuan program 15 menit membaca kemudian bergeser, perlahan namun pasti, dari pembiasaan menjadi ritual.

Orientasi siswa dalam membaca kemudian ikut bergeser pula. Mereka membaca sebanyak mungkin judul buku dan mengenyampingkan pemahaman atas buku yang dibacanya. Kegiatan membaca akhirnya tidak lagi mengasyikkan. Yang terasa hanya beban. Lambat laun, bila hal ini terus dibiarkan, siswa akan memandang kegiatan membaca adalah sebuah keterpaksaan.

Pernyataan itu bukan berarti saya anti pemberian apresiasi kepada siswa yang paling banyak membaca buku. Sebaliknya, saya mendukung pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi di bidang literasi. Hanya saja perlu diperhatikan, tujuan pembuatan jurnal semata dalam rangka memudahkan siswa menjalani kebiasaan membaca, bukan mengejar penghargaan dan pujian. Caranya, guru harus memeriksa buku jurnal. Tidak ada salahnya jika sesekali ia menanyakan isi buku kepada siswa.

Judul	Pengarang	Genre	Jumlah Halaman Tercapai	Lama Menyelesaikan Halaman Tercapai
Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Fiksi	12	15 menit
Generasi Langgas	Yoris Sebastian	Nonfiksi	10	15 menit

Contoh format jurnal

Menciptakan suasana menyenangkan

Ari Kpin, komposer, pencipta lagu, dan musisi musikalisasi puisi asal Kota Kembang, suatu hari mengajar di sebuah SD di Bandung. Ia menggantikan saudaranya yang hamil tua. Jika biasanya ia berhadapan dengan mahasiswanya di sejumlah perguruan tinggi, kini ia berhadapan dengan anak-anak yang usianya jauh lebih muda.

Seperti biasa, seperempat jam sebelum bel berbunyi, sekolah itu menyelenggarakan program 15 menit membaca buku nonteks pelajaran. Hari itu anak-anak merasakan sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Diiringi gitar, mereka membaca buku dongeng bersama.

Sambil membaca narasi dongeng, Ari memetik dawai gitar. Saat dialog, ia menyilakan murid-murid membacanya bersama.

Membaca teks secara bergantian sembari diiringi gitar membuat suasana kelas begitu menyenangkan. Murid-murid minta kegiatan itu diulang esok hari.

Bagi Ari, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, guru wajib membuat nyaman suasana kelas. Ini merupakan bagian dari penyiapan psikologi siswa memasuki pembelajaran. Program 15 menit membaca dapat dijadikan pintu masuk dengan menyelenggarakannya secara menyenangkan. Penggunaan alat musik dapat dijadikan pilihan.

Sebelum tampil, Ari menyarankan agar guru membaca buku yang akan dibacakan terlebih dahulu. Tangkap suasana cerita (senang, sedih) buku itu, kemudian ciptakan irama musiknya. Hal ini untuk mengetahui dan memperkirakan bagian mana pada isi buku agar tepat dibawakan.

Semua guru dapat mempraktikkannya. Alat musiknya bisa apa saja selain gitar; bisa seruling atau harmonika. Yang penting guru menguasai alat musik tersebut.

Bagaimana kalau guru tidak menguasai alat musik satupun? Tawarkan kepada siswa yang menguasai alat musik. Siapa tahu di antara mereka ada yang menguasai suatu alat musik. Ajak mereka bekerja sama: guru membaca, siswa mengiringi. Latihan bisa dilakukan di luar jam sekolah.

Bagaimana kalau tidak ada satupun yang menguasai alat musik? Ini pun tidak masalah kalau masih ingin menggunakan instrumen musik sebagai pengiring kegiatan membaca. Minta semua siswa membawa barang apapun di sekitarnya yang bisa mengeluarkan suara; botol air mineral, galon air, kotak kayu, batu kali. Lalu mainkan secara bersamaan di kelas. Memang awalnya sulit menciptakan keselarasan irama, namun itu bukan hal mustahil untuk mewujudkan grup orkestra dadakan di kelas.

Perlu diperhatikan, semua kegiatan dilakukan bersama dan dalam situasi menyenangkan. Biarkan tiap siswa mengekspresikan

diri. Biarkan pula mereka mengeksplorasi kemampuan dalam bekerja sama dengan teman-temannya. Guru hanya mengingatkan dua kunci utama kolaborasi: buku dan musik.

Bisa saja, suatu saat, mereka menghimpun kesepakatan bersama bahwa ada satu hari di mana akan digelar sebuah "pertunjukan besar" di dalam kelas. Bisa berbentuk musikalisasi puisi, dramatisasi cerpen, atau musikalisasi-dramatisasi puisi. Semua berbasis buku. Pertujukan ini melibatkan semua siswa atau bahkan melibatkan siswa dan guru. Ini tidak mustahil.

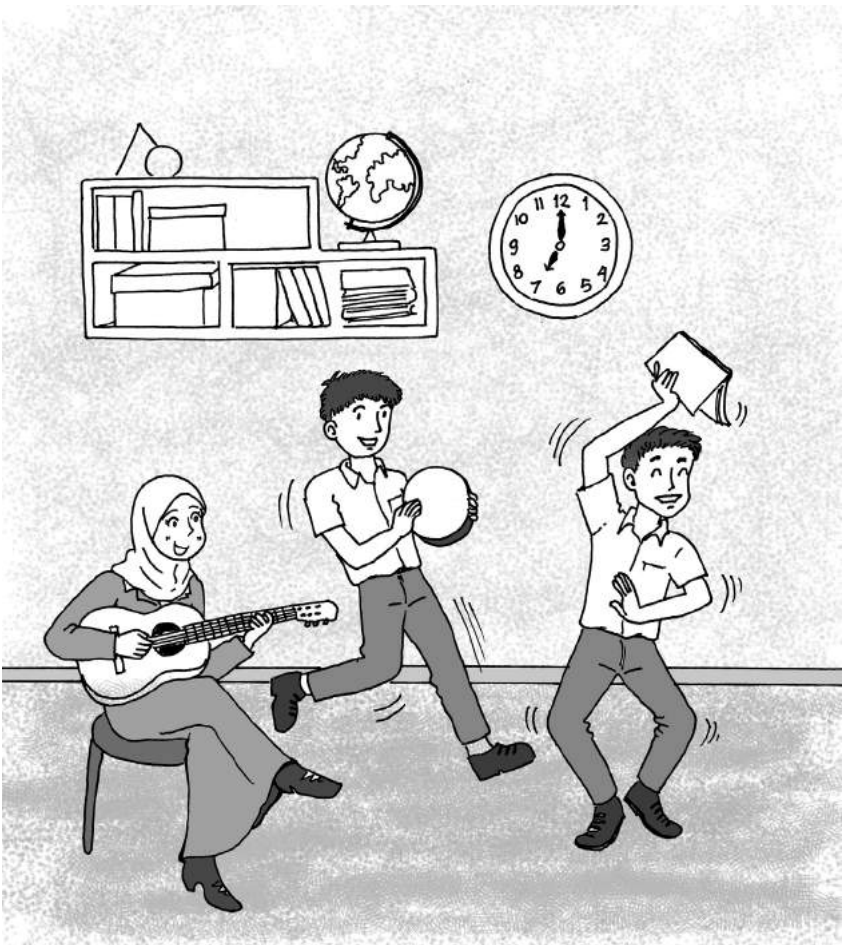

Menulis agar membaca

Memang agak repot jika semua prasarana tidak mendukung. Namun, guru cerdas tidak pernah menyerah pada segala keterbatasan. Mereka selalu punya cara untuk memecahkan masalah. Mari kita belajar pada Fathur Rahman, guru SMP Negeri 4 Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan[5]. Ia adalah sosok guru yang tidak mau menyerah dengan kondisi sekolahnya.

Siswa SMP Negeri 4 Mataraman rata-rata berasal dari keluarga penyadap karet. Keseharian mereka begitu keras. Mereka harus bangun pagi-pagi sekali, sekitar pukul 3 dini hari, dan berangkat ke hutan untuk membantu orang tua. Kembali ke rumah sekitar pukul 7.

Mereka baru tiba di sekolah antara pukul 08.30 hingga 09.00. Padahal jam masuk sekolah pukul 07.30. Artinya, mereka tidak mengikuti pelajaran jam pertama dan kedua.

Ketika kepala sekolah menerapkan program 15 menit membaca, ia segera berpikir ulang. Program baru itu tidak otomatis mengubah 'budaya' yang telah berlangsung lama. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, ia menarik kembali kebijakannya.

Sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia, Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini telah mencoba berbagai cara agar murid-muridnya gemar membaca. Namun apa yang bisa diharapkan dari anak-anak yang kelelahan, mengantuk, dan tak memiliki tradisi membaca di keluarga? Bahkan, sebagian orang tua siswa lebih senang anak-anak mereka membantu pekerjaan menyadap karet ketimbang belajar di sekolah. Ke hutan menghasilkan uang, ke sekolah menghabiskan uang, barangkali itu pikiran mereka.

Namun Fathur Rahman pantang menyerah. Sebagai guru, ia tahu kondisi psikologis siswanya. Anak-anak yang hidup tertekan tidak mungkin dipaksa membaca. Yang diperlukan adalah sebuah penyaluran rasa dan pikiran.

Alih-alih mendorong mereka membaca, Fathur Rahman menugaskan siswa-siswinya menulis. Materi tulisan boleh apa saja; puisi, cerita pendek, atau opini. Hasilnya mencengangkan. Rata-rata siswa menulis mengenai kisah hidupnya; tentang kehidupan sulit jadi anak penyadap karet, suka-duka menyadap karet, hingga kesukaan pada lawan jenis.

Secara struktur, tulisan mereka tidak bagus, tapi isinya cukup membuat Fathur terharu. Ia memberi hadiah kepada siswa yang tulisannya bagus. Kondisi ini mendorong mereka untuk terus menulis.

Dalam benak Fathur, siswa yang sudah menulis karangan tidak mungkin tidak membaca tulisannya sebelum tulisan itu dikumpulkan. Momen 'membaca tulisan sendiri' inilah pintu masuk Fathur untuk menanamkan kecintaan membaca dalam diri siswa.

Memberi penugasan menulis memiliki setidaknya dua keuntungan. *Pertama*, memberi mereka ruang untuk mengemukakan pandangan/isi kepala secara terstruktur. Ini menjadi salah satu hal pokok dalam sebuah pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar menjadi jembatan bagi siswa dalam menghubungkan realitas kehidupan yang dialaminya dan keilmuan yang digelutinya. Dari sini, guru dapat mengetahui problem kehidupan siswa dan membantu mereka memecahkannya. Tidak ada kesenjangan (*gap*) antara kehidupan sosial siswa dan dunia sekolah.

Kedua, 'memaksa' mereka membaca hasil tulisannya sebelum dikumpulkan. Siswa yang tahu bahwa tulisannya akan dibaca guru dan mendapat hadiah jika dinilai baik, akan membaca dulu tulisannya agar tampak bagus dan tiada kesalahan saat berada di tangan gurunya. Situasi yang berulang ini akan menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa bahwa kegiatan menulis tak lepas dari aktivitas membaca. Dengan sendirinya mereka sadar bahwa untuk menghasilkan tulisan yang utuh, lengkap, dan enak dibaca diperlukan pengetahuan di luar pengalaman kesehariannya.

Kurangnya minat membaca dan minimnya koleksi buku nonteks pelajaran, ternyata, dapat direduksi dengan kegiatan menulis. Guru bisa saja menyerah dan terus mengeluh dengan berbagai keterbatasan, atau berinisiatif menghadapi semua kendala bersama siswa. Ini sebuah pilihan.

BAB IV

Sekolah Literat

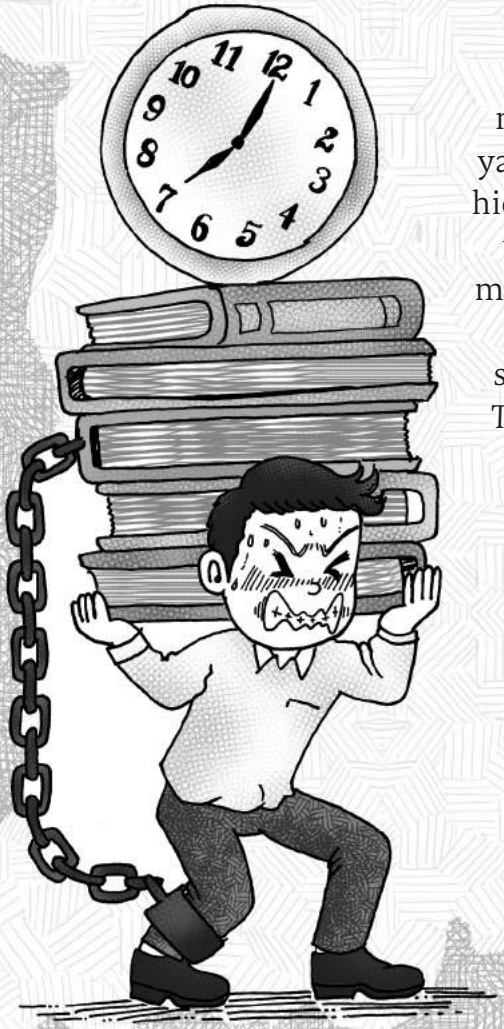

Sekolah seharusnya menciptakan orang-orang yang suka membaca seumur hidup mereka—yaitu lulusan yang terus membaca dan mendidik diri mereka sendiri sepanjang hidup mereka sebagai orang dewasa. (*Jim Trelease, Jurnalis dan Pendidik dari Amerika Serikat*)

Sekolah literat seperti apa? Merujuk pada sejumlah buku panduan GLS yang diterbitkan Kemendikbud, kondisi literat tidak digambarkan sebagai hasil dari budaya membaca. Budaya membaca bukanlah tujuan akhir GLS, melainkan tujuan antara. Tujuan GLS berfokus pada pembentukan karakter dan budi pekerti ekosistem pendidikan.

Sekolah dikatakan literat jika atmosfer dan situasi di dalamnya mendukung perilaku warga sekolah untuk berbudi pekerti. Membaca merupakan salah satu kegiatan yang ditonjolkan karena memberi ruang bagi tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini memang harus dipahami betul. Kalau tidak, pelaksanaan GLS hanya berkutat pada kegiatan membaca.

Setahun pelaksanaan GLS, sepanjang 2016, persepsi mengenai Sekolah Literat mengalami deviasi dari pemahaman yang disosialisasikan Kemendikbud. Bahkan, kemunculan persepsi itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Ada Kepala Sekolah memandang, jika sudah melaksanakan kegiatan 15 menit membaca, GLS sudah berjalan. Ada lagi yang menilai, 15 menit membaca adalah menciptakan situasi di mana siswa membaca buku secara mandiri (*independent reading*).

Imbasnya, program 15 menit membaca tampak seperti sebuah ritual, menggugurkan kewajiban. Tambahan masuk lebih awal 15 menit sebelum jam masuk biasanya terasa berat, terutama dirasakan oleh para guru.

Barangkali ini terjadi karena sosialisasi yang kurang. Sebab, setelah setahun berjalan, ternyata masih ada saja sekolah yang belum tahu program 15 menit membaca—terutama di daerah yang jauh dari pusat kabupaten/kota. Namun, problemnya, banyak ditemukan, sosialisasi yang cukup tidak menjamin munculnya keinginan untuk menjalankannya. Sejumlah sekolah tahu program GLS, namun dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan, guru dan kepala sekolah enggan menjalankannya. Perubahan, memang, bagi sebagian orang, selalu berat dilakukan. Butuh banyak upaya, dorongan, dan tekanan baru mau berubah.

Sekolah literat, seperti`apa?

Di luar definisi teoretis yang dinyatakan dalam sejumlah buku Panduan GLS, sebagian guru mendefinisikan Sekolah Literat dari hasil praktik pengalamannya di lapangan. Pengalaman literasi Siti Sa'ariah Kamila, Wakil Kepala SMPN 1 Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berangkat dari praktik literasi yang dijalaninya. Menurut Mila, panggilan akrabnya, sekolah literat mampu memberi solusi atas permasalahan di sekitarnya. Sehingga literat, baginya, tidak sekadar kegiatan membaca. Literat berarti memberikan kontribusi pada lingkungan sekelilingnya.

Untuk memberikan solusi, diperlukan pengetahuan memadai. Pengetahuan didapat dari aktivitas membaca. Kegiatan membaca dilengkapi dengan kemampuan menganalisis, dirumuskan dalam majelis diskusi, dan diputuskan sebagai kehendak bersama.

Maka, diperlukan sinergitas antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Orang tua, tokoh masyarakat, dan dinas pendidikan juga perlu terlibat untuk mendapatkan efek yang dahsyat.

Langkah awal yang dilakukan adalah sosialisasi. Kepala Sekolah menggelar rapat internal dengan guru, mengenalkan mereka pada pengertian literasi, cakupannya, dan perubahan yang akan dituju. Persamaan persepsi dalam berliterasi harus terbangun.

Sosialisasi berikutnya ditujukan kepada siswa. Bisa melalui majalah dinding (dinding). Bisa pula disampaikan saat upacara bendera. Kepala sekolah dan guru membangun persepsi bahwa dengan berliterasi siswa dapat meningkatkan prestasi.

Orang tua juga merupakan unsur penting subjek sosialisasi. Kerja sama dengan orang tua berpengaruh besar pada keberlangsungan GLS. Sosialisasi literasi dapat disampaikan melalui mading, rapat-rapat yang melibatkan orang tua, dan Komite Sekolah.

Di SMPN 1 Margahayu, sosialisasi ke orang tua dilakukan per kelas. Wali kelas menggelar rapat dengan orang tua siswa yang

dibinanya. Dengan subjek yang terbatas, sosialisasi dapat lebih fokus. Efektif dan efisien dalam berdiskusi dan mengambil keputusan.

Dalam rapat, pihak sekolah menyampaikan kebijakan terbaru terkait program literasi. Misalnya, mulai bulan depan, siswa masuk pukul 06.45 dari biasanya pukul 07.00. Waktu 15 menit digunakan untuk kegiatan membaca.

Selain membangun pemahaman bersama mengenai literasi beserta manfaat yang didapat, target dan bentuk kegiatan perlu dirumuskan. Di forum ini pihak sekolah akan panen usulan dari para orang tua yang beragam latar belakang pendidikan.

Yang perlu diperhatikan pihak sekolah, orang tua dipersilakan mengambil peran dalam program literasi. Terlebih jika peran itu terkait dengan kebutuhan pokok seperti pengadaan buku, sudut baca, dan pojok literasi. Jika ada orang tua yang ingin menyumbang buku, atau rak buku tidak terpakai di rumahnya, dipersilakan saja. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa GLS adalah program bersama. Semua bisa berkontribusi dalam bentuk apapun sesuai kapasitas masing-masing.

Tim Literasi Sekolah

Setelah semua unsur tersosialisasi, langkah selanjutnya adalah membentuk Tim Literasi Sekolah (TLS). Tim ini bertugas memastikan program-program literasi di sekolah berjalan sesuai harapan. Keanggotaan TLS berasal dari beragam unsur seperti Kepala Sekolah, guru, pustakawan, Komite Sekolah, dan siswa. Kepengurusan TLS disahkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Kepala Sekolah.

Di SMPN 1 Margahayu, TLS terdiri dari 8 guru—disebut Guru Penggerak atau Guru Perintis. Pihak sekolah menunjuk Guru Perintis berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya di bidang literasi.

Tiap Guru Perintis memiliki 5 siswa binaan. Sehingga total siswa yang terlibat dalam TLS berjumlah 40 orang. Siswa dipilih tidak berdasarkan asal kelas, melainkan kapasitas literasi. Guru menyaring dan memilih mereka berdasarkan kemampuan literasinya.

Di luar kegiatan belajar-mengajar, tiap Guru Penggerak berkumpul dengan lima siswa binaannya. Mereka berdiskusi mengenai buku; judul buku, alasan memilih buku, isi buku.

Seminggu sekali, sekolah menggelar *Reading Habit* di lapangan. Di sini, setiap tim siswa (1 dari 5 orang ditunjuk sebagai juru bicara) dipersilakan menyampaikan hasil ulasan buku di hadapan warga sekolah. Ia menceritakan judul buku yang sudah dibaca, alasan membaca buku, dan isi buku. Per 3 bulan, sekolah memberikan penghargaan kepada tim yang melakukan presentasi terbaik.

Program tersebut kemudian meningkat. Kepala Sekolah menantang satu siswa membaca 24 buku dalam 10 bulan (*Principle Reading Challenge*). Siswa terbaik yang bisa memenuhinya mendapatkan hadiah, buku, dan sertifikat. Penyerahan sertifikat disaksikan orang tua siswa saat upacara bendera. Prestasi di bidang literasi, di titik ini, dihargai secara sangat memadai.

Di SMAN 4 Pekanbaru, anggota TLS berjumlah 15 guru—disebut juga Satgas Literasi Sekolah. Mereka bertugas melakukan kampanye literasi di berbagai acara yang melibatkan siswa dan orang tua. Mereka juga melakukan koordinasi dengan siswa-siswi yang menjadi Duta Baca dan Duta Literasi.

Salah satu tugas anggota TLS adalah memeriksa resensi siswa yang meminjam buku. Hasil resensi diperiksa dan dihitung. Siswa yang paling banyak membaca dan meresensi buku dalam sebulan mendapat hadiah.

Pelibatan siswa

Sebelum terbang kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau, pada pertengahan Oktober 2016, saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan para Duta Baca dan Duta Literasi SMAN 4 Pekanbaru. Nurhafni, sang kepala sekolah, meminta saya berbagi cerita tentang kegiatan literasi.

Kepada mereka saya katakan bahwa menjadi Duta Baca dan Duta Literasi adalah sebuah pilihan. Dan, pilihan mereka tidak salah. Dengan menjadi Duta Baca atau Duta Literasi, mereka berani memikul tanggung jawab melakukan perubahan baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Di sekolah ini, tiap kelas diharuskan mengirimkan perwakilannya (satu laki-laki dan satu perempuan) untuk menjadi Duta Literasi. Biasanya, siswa yang terpilih adalah mereka yang memang mengajukan diri dan memiliki minat yang tinggi pada literasi.

Tugas Duta Literasi yaitu menjaga rak buku (disebut Pojok Literasi) yang terletak di koridor depan kelas. Mereka bertugas melayani siswa yang ingin membaca dan meminjam buku. Peminjam buku bisa berasal dari kelas sendiri atau kelas lain.

Siswa yang meminjam buku untuk dibawa pulang ke rumah diwajibkan membuat resensi. Resensi dikumpulkan ke Duta Literasi untuk kemudian diteruskan ke Satgas Literasi Sekolah.

Agustina, siswi kelas XI IPA 5, merasa senang menjadi Duta Literasi. Alasannya sederhana: bisa kenal dengan banyak teman dari lain kelas. Ia tidak merasa kerepotan melayani para peminjam dan menunggu pengembalian. Sebab peminjaman buku dilakukan saat jam istirahat. Sama sekali tidak mengganggu waktu belajar.

Sedangkan Duta Baca adalah siswa yang terpilih usai gelaran literasi yang diadakan oleh sebuah penerbit besar di sekolah ini. Tugas mereka yakni menjaga rak buku (disebut juga Pojok Literasi)

yang terletak di sejumlah tempat nyaman siswa biasa berinteraksi, seperti di taman dan dekat saung.

Menurut Nurhafni, pelibatan siswa bertujuan agar mereka belajar bertanggung jawab. Mekanisme pengelolaan buku dari, oleh, dan untuk siswa membuat gerakan literasi lebih berdaya. Siswa tidak merasa terpaksa karena mereka sendiri bisa menjadi pengelola. "Kita ingin minat baca tumbuh alami," kata Nurhafni.

Guru (jangan) malas membaca

Saat menyambangi sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah, seorang kepala SMA rujukan menyampaikan keluhan pada saya. Program 15 menit membaca di sekolahnya berjalan setengah-setengah. Sebagian guru tidak mendukung program wajib itu. Mereka datang tepat saat jam masuk sekolah berbunyi. Artinya, ketika siswa membaca buku selama 15 menit di kelas, guru tidak hadir di tengah siswa.

Problem utama di sekolah itu bukan pada ketiadaan buku, melainkan ketiadaan guru. Guru tidak hadir saat siswa membaca. Kepala sekolah itu mengatakan bahwa sebagian besar guru menganggap literasi hanyalah kegiatan membaca dan itu bukan hal istimewa. Ia pun melihat banyak guru malas membaca.

Paras kepala SMA itu tampak putus asa. Ia merasa kurang dukungan. Memang ia melihat beberapa guru tampak antusias pada GLS, terutama guru Bahasa Indonesia. Namun mereka pun tidak bisa berbuat banyak pada ulah sebagian guru lain.

Saat saya usulkan agar dibuat kelas percontohan literasi dengan merangkul guru-guru yang antusias, ia menatap saya dengan mata berbinar. Saya harap, ide itu diwujudkan. Sebab, sering terjadi di lapangan, orang butuh contoh untuk berubah.

Kondisi guru malas membaca juga terjadi di Pulau Jawa. Saya pernah berbincang dengan dua guru dari dua sekolah berbeda di

pinggiran Jakarta. Keduanya sama-sama guru Bahasa Indonesia.

Problem yang dihadapi kedua sekolah sama: program 15 menit membaca tidak berjalan maksimal karena guru-guru malas membaca. Perilaku itu tampak ketika siswa membaca buku di kelas, guru-guru keluar kelas dan sibuk mengobrol dengan guru lain atau asyik berponsel ria. Sebagian lagi datang setelah kegiatan membaca berakhir. Sekali lagi, guru tidak hadir di kelas ketika siswa membaca buku.

Kepala sekolah tidak dapat berbuat banyak. Kedua guru bahasa Indonesia itu hanya menerapkan kegiatan 15 menit membaca di kelas yang diampu.

Sampai di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa problem tidak terduga saat Pemerintah mewajibkan program 15 menit membaca di awal jam pelajaran muncul dari kalangan guru. Bukan dari unsur siswa, atau lagi ketiadaan buku.

Kegiatan literasi dapat berjalan meskipun siswa malas membaca dan buku tidak ada, asalkan gurunya memiliki minat besar pada literasi. Patut diingat, literasi tidak hanya kegiatan membaca. Guru kreatif dapat menggunakan media apa saja sebagai bahan pembelajaran literasi.

Kondisi sebaliknya dapat terjadi: kegiatan literasi di kelas tidak akan terlaksana walaupun siswa rajin membaca dan buku beratus judul memenuhi kelas, jika guru malas membaca. Kecuali, ada siswa yang berani mengoreksi perilaku gurunya.

Program GLS tidak hanya ditujukan untuk siswa. Program ini juga menuntut guru menjadi teladan dalam membaca. Bagaimana siswa mau dan rajin membaca kalau gurunya sendiri bukan seorang pembaca?

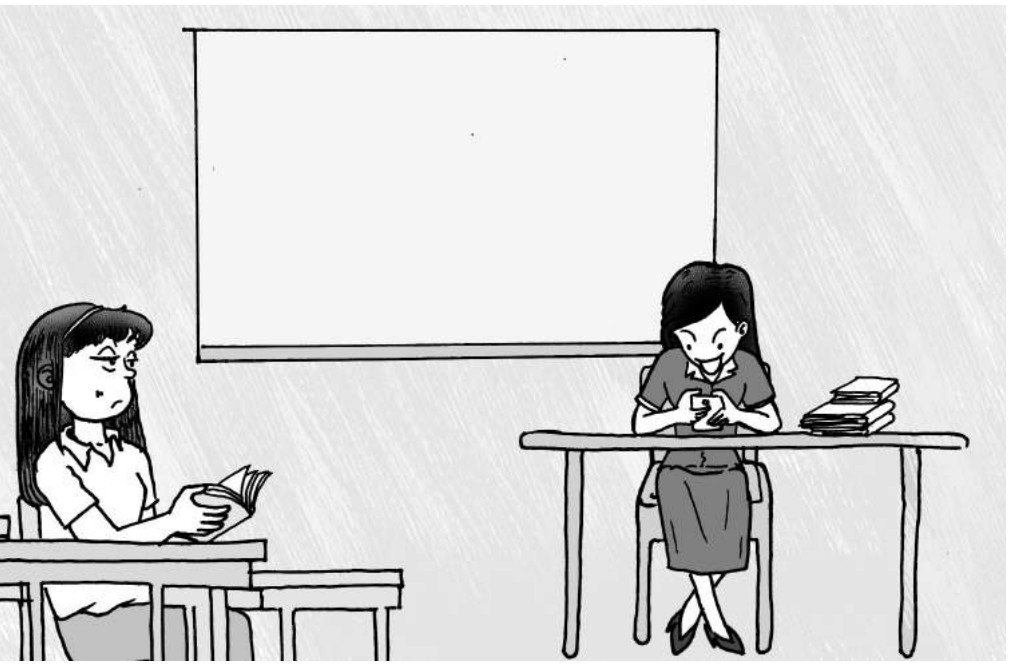

Paul Jennings, jurnalis dan penulis cerita anak termasyhur Australia, berkata, "Tak ada gunanya mencoba menularkan 'virus' membaca ke dalam diri anak-anak jika Anda sendiri tak pernah memilikinya."[1]

Kalau ingin membuat banyak orang batuk, Anda tidak perlu menyuruh mereka batuk. Anda cukup mengunci pintu dan batuklah berulang kali lalu lihat ada berapa di antara mereka yang ikut batuk. Kalau Anda pura-pura batuk, mereka tidak akan tertular.

Ilustrasi itu dapat pula dipakai untuk menularkan 'virus' membaca kepada siswa. Kalau guru ingin murid-muridnya berminat dan rajin membaca, tunjukkan sikap berminat dan rajin baca buku di hadapan mereka. Sikap ini harus dilakukan dengan ikhlas. Sebab, kalau dilakukan dengan berpura-pura, siswa juga akan berpura-pura berminat dan rajin membaca.

Kepala sekolah sebagai driver

Rhenald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia dan ahli manajemen, mengatakan kesadaran muncul dalam diri seseorang karena dua hal: muncul dari dalam diri sendiri atau dipaksa orang lain. Guru yang malas membaca tidak memiliki kesadaran berliterasi. Tidak ada yang bisa memaksa guru memiliki kesadaran berliterasi kecuali kepala sekolah.

Menurut Rhenald, kepala sekolah harus menjadi seorang *driver*. Ia pengendali bagi guru-guru yang bekerja bersamanya membangun generasi bangsa. Kepala sekolah berani bersikap tegas dalam menerapkan aturan.

Sri Maryati, Kepala SD Negeri Purworejo, Sleman, D.I. Yogyakarta, punya cara unik dalam menerapkan program 15 menit membaca. Saat program berlangsung, tidak hanya guru kelas yang harus hadir membaca bersama siswa. Guru mata pelajaran termasuk

pelajaran olahraga dan agama harus berada di dekat siswa. Semua terlibat dalam satu aktivitas pada waktu dan ruang yang sama. Dengan menghadirkan guru di dekat siswa yang sedang membaca, tidak ada pilihan baginya selain ikut membaca.

Mila, Wakil Kepala SMPN 1 Margahayu Kabupaten Bandung, punya strategi sendiri agar teman-teman sejawatnya yang kebanyakan ibu-ibu mau membaca. Buku yang ditaruh di sudut baca ruang guru bertema hal-hal menarik seputar dunia ibu-ibu, di antaranya buku memasak. Sering orang membaca karena alasan pragmatis: saya membaca apa yang saya butuhkan saja.

Kesadaran mengenai literasi memang harus dipaksakan, tentu dengan strategi berbeda-beda sesuai kondisi. Jangan sampai guru-guru merasa digurui dan dipaksa untuk membaca. Perlakuan kepada siswa dan guru tentu berbeda.

Strategi lain yang bisa dicoba adalah dengan memotivasi siswa. Beri tahu mereka bahwa program 15 menit membaca adalah wajib dan guru di jam pertama juga wajib berada bersama mereka saat membaca. Beri tahu pula bahwa kegiatan membaca tidak hanya membaca mandiri. Ada ragam kegiatan membaca yang melibatkan guru seperti membaca nyaring (*read aloud*) dan membaca terpandu. Maka, ketika program 15 menit membaca berlangsung, mereka akan bertanya pada guru tentang variasi lain kegiatan membaca. Mereka juga akan mempertanyakan guru yang dilihatnya tidak ikut membaca.

Membuat sudut baca

Di SMAN 4 Pekanbaru, bagian belakang kelas adalah area 'kekuasaan' siswa. Mereka memiliki kebebasan membentuk, memodifikasi, dan mendekorasi kawasan itu dengan segala sesuatu berbau literasi. Guru dan Kepala Sekolah dilarang intervensi.

Semua kelas seolah berlomba membangun sudut baca

semenarik dan senyaman mungkin. Ada yang menambahkan karpet, bantal duduk, dan taplak meja di sudut bacanya. Ada pula yang menggunakan ban bekas dan tempat botol untuk duduk. Barang-barang bekas dimodifikasi menjadi sesuatu yang menarik.

Poster-poster bertebaran di dinding, ditulis tangan dengan spidol warna-warni. Poster berisi kata-kata mutiara, slogan literasi dan antikorupsi, daftar piket, atau susunan organisasi kelas beserta fotonya.

Bentuk rak buku juga bermacam-macam. Rata-rata dibuat sendiri, baik menggunakan bahan baku yang baru maupun usang. Majalah dinding beraneka rupa bentuk dan isinya, mencerminkan pola pikir dan emosi penghuninya yang dinamis. Mereka juga bebas menentukan warna cat dinding dan bergotong royong menyapukan kuas.

Salah satu Sudut Baca di SMAN 4 Pekanbaru. Foto: Billy

Nurhafni, sang Kepala Sekolah, menyerahkan penataan ruangan kelas kepada siswa. Ia yakin sesama siswa dapat bekerja sama membuat kelas yang nyaman untuk kegiatan belajar-mengajar asal diberi kepercayaan. "Mereka dibiarkan mengekspresikan imajinasinya," katanya.

Penelitian di Papua dan Papua Barat yang tengah dilakukan Unicef menunjukkan manfaat sudut baca di kelas rendah (SD kelas I, II, dan III).[2] Disimpulkan, adanya sudut baca di dalam kelas meningkatkan kemampuan membaca siswa secara signifikan. Anak-anak di kelas yang memiliki sudut baca, mempunyai kemampuan membaca 6 kata per menit daripada siswa di kelas yang tidak punya sudut baca.

Sudut baca bukan untuk menyaingi perpustakaan. Tujuannya sederhana saja: mendekatkan siswa kepada buku. Kadang, dalam rentang kegiatan belajar-mengajar di kelas, ada jeda di mana guru dan siswa tidak bertemu. Misalnya saat pergantian jam pelajaran, guru absen (sakit, dll), atau rapat guru. Jeda waktu ini dapat digunakan siswa untuk membaca buku yang disukai.

Ada analogi menarik untuk menjelaskan mengapa siswa harus didekatkan dengan buku: anak akan memainkan sesuatu yang berada di dekatnya. Anak akan menendang bola jika didekatnya ada bola. Anak akan memainkan gawai (*gadget*) jika tangannya mudah meraih gawai. Anak akan membaca buku bila ada buku didekatnya.

Buku untuk sudut baca

Buku yang diletakkan di rak buku Sudut Baca adalah buku nonteks pelajaran, yaitu buku referensi dan pengayaan. Bentuknya bisa fiksi (novel, cerpen, puisi, dll) ataupun nonfiksi (ensiklopedia, esai, jurnal, dll). Harus dipastikan bahwa buku yang berada di sana diminati dan disukai siswa. Sehingga bisa saja komik menjadi koleksi terbanyak di rak buku karena rata-rata siswa menyukai komik atau cerita bergambar.

Lalu dari mana dana pembelian buku untuk Sudut Baca? Pemerintah menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku teks dan nonteks pelajaran minimal

5% dari dana yang sekolah terima. Kepala Sekolah dapat mengatur besaran dana BOS untuk alokasi pembelian dua jenis buku tersebut sesuai kebutuhan.

Nurhafni mengalokasikan 5% dana BOS untuk membeli buku teks dan nonteks pelajaran. Ia selalu memanggil penerbit ke sekolah tiap akan belanja buku. Ia meminta Kepala Perpustakaan menyeleksi judul buku melalui katalog yang dibawa penerbit. Judul buku yang dibeli tidak boleh sama dengan koleksi yang sudah ada di perpustakaan sekolah.

Belakangan, Nurhafni tidak lagi mengandalkan dana BOS untuk memperbanyak koleksi buku. Ia mengajak orang tua untuk menyumbangkan buku sebagai koleksi Sudut Baca. Setiap kegiatan yang mengundang dan melibatkan orang tua, misalnya penerimaan siswa baru, ia mewajibkan mereka menyumbang satu buku.

Siswa yang lulus pun diminta menyumbang buku. Jika dalam setahun ada 200 siswa yang wisuda, maka akan ada 200 buku tambahan untuk koleksi sekolah.

Buku yang masuk ke sekolah diatur sedemikian rupa. Pertama sebagai koleksi Sudut Baca. Jika siswa di satu kelas telah tuntas membaca semua judul buku di sudut bacanya, buku-buku itu di keluarkan dan menjadi koleksi rak buku Pojok Literasi di luar kelas. Dalam kurun waktu tertentu, buku-buku koleksi Pojok Literasi dipindah ke perpustakaan sekolah.

Meminta partisipasi orang tua dalam menyediakan buku juga dilakukan Sri Maryati. Hal itu dilakukan setelah ia melihat siswa jenuh pada koleksi buku Sudut Baca yang tuntas dibaca dalam waktu sekitar tiga bulan. Ia tidak memaksa dan mewajibkan orang tua menyumbang buku. Ia hanya menyampaikan kebutuhan sekolah pada koleksi buku baru. Sebagian orang tua yang mampu menyumbang buku. Atau ada yang menyumbang uang dan sekolah yang membelikan buku.

Akses terhadap buku masih menjadi kendala yang dihadapi banyak daerah di negeri ini. Indikasi ketersediaan buku di suatu

tempat dapat dilihat dari keberadaan toko buku di daerah itu. Hingga kini, belum semua ibu kota provinsi dan kabupaten/kota memiliki toko buku yang menjual buku nonteks pelajaran.

Abram Badu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, mengajak berbagai kalangan untuk menyumbangkan buku ke sekolah; organisasi kemasyarakatan, dunia industri, orang tua siswa. Upaya ini membuahkan hasil, bahkan di luar dugaannya. Antusiasme orang tua tidak hanya sampai menyumbang buku. Mereka turut membantu sekolah membuat Sudut Baca dan membangun Pojok Literasi.

Pojok Literasi dibangun di lokasi strategis di tengah area sekolah. Tempatnya ditata apik dan nyaman sehingga banyak siswa betah berlama-lama. Sampai di sini, Gerakan Budaya Baca yang dicanangkan Wali Kota Gorontalo dalam penyediaan buku dan Pojok Literasi berhasil.

Tidak diduga, keberadaan Pojok Literasi menimbulkan kecemburuan pengelola dan pustakawan perpustakaan sekolah. Jumlah siswa pengunjung perpustakaan menurun drastis. Mereka lebih senang membaca di Pojok Literasi.

Setelah dijelaskan, protes mereda. Keberadaan Pojok Literasi, kata Abram Badu, adalah untuk memperkuat keberadaan perpustakaan. Keberadaannya juga sebagai alternatif bagi siswa dalam mengakses buku. Tidak ada maksud merongrong peran perpustakaan.

Perpustakaan vs Pojok Literasi

Sebuah Pojok Literasi berdiri apik di tengah area SMAN 3 Gorontalo, di bawah pohon beringin yang rindang. Ia berupa bangunan kayu berbentuk "L", bercat kuning tidak berdinding, beralas karpet merah, dilengkapi dua meja panjang cokelat serta empat rak buku yang

masing-masing memiliki empat alas. Di bagian pojok luar dekat tong sampah berdiri plang bertuliskan "Sudut Literasi Smart".

Saya yakin sekali tempat itu menjadi lokasi "nongkrong" favorit dan menyenangkan bagi siswa. Membaca lalu mendiskusikan isi buku dengan teman, diembus angin semilir dan kicauan burung di rerimbun beringin, Pojok Literasi itu terasa seperti surga bagi para cendekia.

Wajar saja jika perpustakaan dengan segala kesumpekan ruangan dan larangan berdiskusi sepi ditinggal siswa layaknya museum. Di Pojok Literasi seperti itu, mereka bebas membaca, berdiskusi, dan mengungkapkan isi pikiran secara spontan. Tak ada larangan bercanda atau tertawa walaupun bisa saja itu mengganggu teman lain yang tengah membaca.

Maka, tidak ada pilihan lain, kalau tidak ingin ditinggalkan peminat, perpustakaan harus berbenah. Desain bangunan harus memperhatikan ventilasi udara. Siswa tidak betah berlama-lama membaca buku jika ruangan perpustakaan panas, berdebu, dan sumpek.

Manajemen perpustakaan juga harus berorientasi pada kebutuhan siswa. Konsep perpustakaan yang hanya mengurusi kegiatan administratif yaitu melayani peminjaman dan pengembalian buku semata sudah usang. Ketinggalan zaman. Perpustakaan seyogianya menjadi mitra sekolah dalam membentuk karakter dan keterampilan literasi siswa.

Di Surabaya, para pustakawan sekolah memiliki kewajiban lain disamping mengurus pinjam-kembali buku. Mereka melatih siswa berbicara di hadapan teman lain dan mengajari mereka melakukan presentasi.

Dalam program kunjungan kelas ke perpustakaan, setelah membaca buku, satu siswa diminta menceritakan isi buku di hadapan teman-temannya. Siswa diajari beretorika, menyampaikan gagasan secara runtut dan logis.

Gol A Gong, pendiri Taman Bacaan Masyarakat Rumah Dunia, Serang, pernah bicara tentang orang yang berdiri di atas panggung. Orang yang berani berdiri dan bicara di hadapan orang banyak, katanya, adalah pemberani. Tidak semua orang memiliki keberanian semacam ini. Jika sejak dini anak dilatih bicara di depan khalayak, mengungkapkan isi pikiran dan argumen, kelak ia menjadi orang berpengaruh di lingkungan sekitarnya.

Perpustakaan, menurut penulis *Balada Si Roy* itu, selayaknya tidak hanya dijadikan sebagai tempat membaca buku, tetapi tempat untuk mengasah empat keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Kegiatan itu bisa diterapkan dalam bentuk diskusi, peluncuran buku, jumpa penulis, pemutaran film, pameran lukisan, dan lomba-lomba—misalnya membaca puisi, menulis cerpen atau novel, dan menggambar (Gol A Gong dan Agus M. Irkham, 2012).

Saat berkunjung ke sebuah sekolah negeri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya mengagumi perpustakaan sekolah yang terletak di dekat lapangan upacara. Siswa dan orang tua bebas berkunjung dan membaca koleksi bukunya. Seorang pustakawan lulusan Sarjana Perpustakaan siap melayani. Namun sayang, pustakawan itu 'terjebak' pada 'ritual' pinjam-kembali buku. Tidak ada inovasi yang menunjukkan pemberdayaan perpustakaan.

Lingkungan kaya literasi

Sekitar 7 tahun lalu (2010), SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bukan sekolah layak belajar. Tiap hujan pasti banjir. Maklum, kawasan resapan air. Tiap hari bau tak sedap terendus hingga ruang kelas. Tempat pembuangan sampah di seberang sekolah penyebabnya.

Kini, persoalan itu tidak ada lagi. Di tangan dingin Rusmaidah,

sang kepala sekolah, sekolah di Kompleks Polri itu telah berubah total. Predikat 'Local Hero' diterimanya dari PT. Pertamina pada 2015. Di tahun yang sama, sekolahnya meraih Piala Adiwiyata Mandiri dari pemerintah.

Dua bulan usai pencanangan Banjarmasin sebagai Kota Literasi (23 Agustus 2016) di sekolah yang dipimpinnya, saya beruntung dapat berbincang panjang dengannya. Ia mengajak saya berkeliling dan memberitahu rahasia kesuksesannya: ia mengubah sekolah dengan menggunakan berbagai sumber ilmu seperti buku, internet, dan diskusi dengan ahli.

Bagaimana dengan literasi? Pada April 2015, saat menghadiri acara PT. Pertamina (Persero) di Yogyakarta dan menerima predikat 'Local Hero' dari perusahaan plat merah itu, Rusmaidah menginap sekamar dengan penerima penghargaan lain bernama Kiswanti, pegiat literasi dari Tangerang Selatan. Rusmaidah berdiskusi dan terinspirasi oleh Kiswanti[3]. Pulang dari Kota Pelajar, ia kembali ke Banjarmasin dan mulai mengubah sekolahnya.

Di dekat lapangan upacara, dengan bantuan PT. Pertamina (Persero), berdiri perpustakaan di tengah taman. Bentuk rak bukunya unik dan sederhana: berbentuk segi empat dengan rak di empat bagian, berdiri di tengah area baca. Bangunan perpustakaan dominan kayu, terbuka, dan nyaman karena dekat taman. Jadwal kunjungan siswa telah diatur. Orang tua bebas membaca di sana. Seorang pustakawan perempuan bergelar sarjana perpustakaan siap melayani.

Selain perpustakaan di tengah taman, pojok literasi hadir di sejumlah tempat. Selain untuk siswa, orang tua siswa juga mendapat perhatian. Di kantin, tempat mereka biasa menunggu anaknya pulang, berdiri pojok literasi. Di sana, mereka bebas membaca dan diskusi sambil makan.

Pojok literasi di SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin

Beberapa pajangan berupa poster tertempel di dinding sepanjang koridor kelas. Pajangan hasil karya siswa juga berdiri di depan ruang guru, menemani pojok literasi yang kebanyakan berisi buku-buku tentang lingkungan hidup.

Bagi siswa yang ingin membaca dan duduk lesehan sambil diskusi (di perpustakaan umumnya diskusi di larang), disediakan tikar dan meja di bawah pohon rindang. Mereka juga bisa santai sambil mengunyah makanan karena letaknya di dekat kantin.

Itu di luar kelas. Di dalam kelas, sudut baca hadir di semua kelas.

Di tiap sudut sekolah, siswa menemukan bahan bacaan; taman, koridor, toilet. Tidak ada ruang sekecil apapun yang luput dari keberadaan teks. Mereka nyaman membaca dan berdiskusi di mana saja. Inilah lingkungan kaya literat.

Ancaman "Tuhan Sembilan Senti"

Dokumen paling mengancam kehidupan remaja usia sekolah terbit pada 29 Februari 1984. Ini dokumen internal R.J. Reynolds Tobacco Company, sebuah perusahaan rokok raksasa Amerika Serikat. Salah satu isi dokumen internal itu sebagai berikut: "….Perokok remaja adalah satu-satunya sumber perokok pengganti. Jika remaja tidak merokok maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah."[4]

Dokumen itu menguak target di balik kampanye besar-besaran perusahaan rokok selama bertahun-tahun melalui beragam promosi dan iklan di media massa dan ruang publik: remaja. Remaja, yang secara pendidikan berada dalam usia sekolah (6-18 tahun), adalah target konsumen utama perusahaan rokok, bukan orang dewasa! Sebab, orang dewasa sekarang adalah target pasar ketika mereka masih remaja dulu. Mereka adalah "korban" keberhasilan program perusahaan rokok di masa lalu. Perusahaan rokok butuh remaja sebagai pengganti konsumennya yang kini menua, yang bisa berhenti kapan saja dan kapanpun mati karena sakit tidak menular akibat merokok.

Jika anak usia remaja sekarang sudah kecanduan merokok, maka kemungkinan besar mereka akan menghabiskan uang untuk membeli rokok sepanjang hidup (remaja-dewasa-tua) hingga mereka mati. Pundi uang akan terus mengalir ke kas perusahaan rokok hingga berpuluh-puluh tahun dan membuat kaya para pemiliknya, tidak peduli kondisi konsumennya yang berada di bawah ancaman sakit kronis dan kematian sepanjang hidupnya.

Kegigihan perusahan rokok multinasional itu menunjukkan dampak yang mengkhawatirkan. *The Tobacco Atlas* edisi ke-5 (2015) menyebutkan, pada 2014, 5,8 miliar batang rokok dibakar di seluruh dunia. Dari angka itu, jumlah perokok Indonesia menempati ke-4 terbesar setelah Cina, Rusia, dan Amerika Serikat[5].

Peningkatan jumlah perokok tersebut tidak lain lantaran tiadanya perlindungan terhadap remaja dari terjangan iklan rokok di segala sektor kehidupan mereka. Di manapun mata memandang, iklan rokok membentang: televisi di rumah; billboard raksasa di jalan raya; spanduk, pamflet, dan umbul-umbul di sekitar sekolah dan keramaian acara.

Lokasi penjualan rokok pun tidak terbatas. Warung seberang sekolah menjual rokok kepada guru dan siswa: boleh beli ketengan ataupun per bungkus. Saat beli makanan di minimarket, akan ditemui produk rokok dipajang di belakang kasir. Jika ke Rumah Sakit, Puskesmas, dan klinik, mereka akan mendapati warung-warung di sekitarnya menjual rokok. Mudah sekali mendapatkan rokok dengan harga super murah.

Kunci utama kesuksesan penyebaran rokok terletak pada penjualan ketengan. Remaja, yang kondisi finansialnya masih tergantung pada orang tua, dapat membeli rokok secara batangan—jika dibeli per bungkus terhitung mahal dalam kantong seorang pelajar. Dengan menyisihkan sebagian uang jajan yang diberikan orang tua, mereka membeli rokok beberapa batang setiap hari—biaanya tanpa sepengetahuan orang tua.

Film dokumenter yang cukup apik menggambarkan Indonesia sebagai surganya perokok adalah *Vanguard*: *Sex, Lies and Cigarettes*. Dalam tayangan ini, dapat dilihat bagaimana iklan rokok menyesakkan ruang publik (*billboard* raksasa, spanduk, umbul-umbul, pamflet) dari kota hingga desa yang belum tersentuh internet. Anak-anak usia sekolah yang merokok dapat ditemukan dengan mudah.[6]

Keberadaan "teladan merokok" mengepulkan asap pun bisa dilihat di mana-mana. Selangkah keluar dari Rumah Sakit, Puskesmas, dan klinik, remaja akan melihat petugas parkir, satpam, dan keluarga pasien merokok di parkiran dan halamannya. Di fasilitas publik seperti perkantoran, taman, dan halte, mudah sekali terlihat orang-orang mengepulkan asap. Di dalam perkantoran pemerintah dan

swasta, sebagian pejabat sampai *office boy* merokok di tempat terang dan tersembunyi, bahkan di dalam toilet menemani mereka buang hajat. Peraturan Daerah tentang larangan merokok di fasilitas publik sudah ada, tapi hilang dalam kesadaran dan pikiran warganya.

Para remaja seakan tidak diberi kesempatan untuk mengkritisi, mengutip istilah Taufiq Ismail, "Tuhan Sembilan Senti". Orang tua, tetangga, teman, dan tokoh idola yang merokok turut memperkuat ajakan untuk merokok.

Akhirnya, karena "ajakan" untuk merokok begitu kuat, mereka menyerah atas beragam godaan. Tanpa pengetahuan dan pertimbangan akal sehat, mereka mulai membakar rokok, menjadi bagian orang-orang di sekitarnya dan merasa bangga karenanya. Dorongan itu terus menguat hingga mereka menjadi pecandu dan tidak bisa berhenti dari mengonsumsi zat adiktif itu.

Setelah menjadi pecandu rokok, peringatan semengerikan apapun, bahkan diancam kematian sekalipun seperti tertera di bungkus rokok, sulit mereka acuhkan. Bukan karena mereka takut mati, melainkan lantaran tidak bisa berhenti mengisap rokok.[7]

Hingga kini (pertengahan 2017), ancaman wabah tembakau masih mengancam negeri ini. Satu-satunya perjanjian kesehatan global yang digagas Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*—WHO) yaitu Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control*—FCTC) belum diratifikasi oleh pemerintah RI. Padahal perjanjian yang menjadi panduan dan protokol untuk mengurangi suplai dan konsumsi tembakau ini telah diratifikasi oleh 180 negara, mewakili 90% populasi dunia. Kebijakan politik ini menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC.[8]

Di dunia pendidikan sendiri, perlindungan siswa terhadap wabah merokok sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah.[9] Permendikbud ini bertujuan,

"Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok." Peraturan yang ditujukan kepada warga sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan, pihak lain di lingkungan sekolah) ini berisi larangan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Pihak yang melanggar akan ditegur dan diberikan sanksi. Sekolah juga diwajibkan melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Problemnya, sejauh mana penerapan regulasi tersebut? Jika kepala sekolah berani menegur dan memberi sanksi kepada guru yang merokok di lingkungan sekolah, bagaimana jika kepala sekolah yang merokok? Apakah guru berani melaporkannya kepada pihak Dinas Pendidikan? Atau, jika yang merokok di lingkungan sekolah adalah pegawai Dinas Pendidikan atau tamu yang dihormati (pejabat, pengusaha, seniman, budayawan, sastrawan, dll), apakah kepala sekolah dan guru berani menegur mereka?

Sebelum terbit Permendikbud ini, terbit Peraturan Bersama antara Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.[10] Peraturan ini menyebutkan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk "bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan."

Pertanyaannya kemudian, apakah selama ini ada tindakan konkret terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan kepala sekolah yang merokok? Di sekolah atau daerah mana yang sudah melakukan rehabilitasi terhadap warga sekolah yang merokok? Regulasi, tidak dapat dipungkiri, terbentur pada ketidaksediaan aparatur dan warga negara untuk menegakkan peraturan.

Bahaya nikotin tidak hanya menjamah remaja usia sekolah selaku konsumen dan korban paparan asap rokok (perokok pasif). Jauh dari rantai produksi itu (penjualan), remaja usia sekolah yang

terlibat dalam industri tembakau juga menjadi korban yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Pada September 2014 – 2015, *Human Rights Watch* melakukan penelitian terhadap anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau di empat provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tengara Barat. Mereka mewawancarai 132 pekerja anak berusia 8-17 tahun dan 88 orang tua. Penelitian ini mengungkap kisah anak-anak di bawah umur yang mengeluh kesakitan akibat menghirup nikotin dan racun pestisida di perkebunan tembakau hingga keterpaksaan berhenti sekolah lantaran harus membantu orang tua bekerja.[11]

Rokok tidak hanya merusak kesehatan dan membuat buram masa depan remaja usia sekolah. Kegiatan merokok juga mendorong remaja berperilaku negatif, di antaranya buang sampah sembarangan, tidak toleran, dan tidak peduli pada kesehatan diri, keluarganya, dan orang lain.

Perokok identik dengan aktivitas buang sampah sembarangan. Debu dan puntung rokok dibuang di mana saja. Pengendara bermotor yang merokok, misalnya, membuang debu dan puntung rokok di sembarang lokasi dan merugikan orang-orang di sekitarnya. Aktivitas membuang debu dan puntung rokok sembarangan kemudian membentuk kebiasaan individu. Aktivitas buang limbah rokok merembet pada barang lain seperti bungkus makanan, bungkus produk elektronik, dan lain-lain. Alam, bagi mereka, adalah tong sampah raksasa. Di manapun bebas buang sampah.

Maka ketika guru mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) menekankan untuk menjaga kesehatan, bagi pelajar yang merokok, semua itu terasa omong kosong. Tidak ada yang perlu digubris.

Sikap perokok yang kentara intoleran adalah merokok di ruang publik. Peraturan yang melarang merokok di ruang publik seperti sekolah, halte, dan pasar di langgar. Sajak *Tuhan Sembilan Senti* karya sastrawan Taufiq Ismail sangat apik memotret fenomena intoleransi ini. Berikut cuplikannya:

> *Negeri kita ini sungguh nirwana kayangan para dewa-dewa*
> *bagi perokok, tapi tempat cobaan sangat berat bagi orang*
> *yang tak merokok.*

Bisa dibayangkan pelajar, terutama di kota-kota besar, merokok sambil berkendara motor dan asap rokoknya menyergap anak-anak kecil, dewasa, dan orang tua di sekitarnya. Sambil nongkrong, mereka mengisap rokok dan menggoda perempuan yang lewat di dekatnya. Dengan merokok, mereka membentuk

komunitas eksklusif yang mudah disusupi pengedar narkoba. Ya, pintu gerbang konsumsi narkoba adalah aktivitas merokok.

Ketidakpedulian perokok pada diri sendiri merembet pada ketidakpedulian kesehatan terhadap orang-orang terdekat dan tidak dikenalnya. Bagaimana mau peduli pada orang lain kalau terhadap diri sendiri saja tidak peduli?

Di nirwana kayangan bagi perokok ini, fenomena orang tua merokok sambil menggendong bayi dan merokok sembari memboncengi sepeda motor anak-istrinya tidak sulit dicari. "Keteladanan" ini akan dianggap sebagai contoh baik oleh sang anak namun "siksaan yang harus dinikmati" bagi sang istri. Ketidakpedulian tersebut bukan karena perokok tidak punya nurani, melainkan ketidakmampuan diri menahan hasrat untuk terus merokok—akibat kecanduan merokok.

Sikap dan perilaku di atas, jika terus dibiarkan sehingga meluas dan menjadi kebiasaan di kalangan remaja usia sekolah, akan berakibat fatal: melahirkan generasi Indonesia yang tidak peduli kebersihan, kesehatan, dan toleransi. Rasa simpati sekarat. Empati mati.

Dampak aktivitas merokok terhadap perilaku remaja/siswa sangat bertentangan dengan gerakan penumbuhan budi pekerti yang kini digalakkan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dan Dinas Pendidikan, harus benar-benar serius melakukan perlindungan terhadap remaja melalui penegakan regulasi secara masif.

Bonus demografi pada tahun 2020-2030, di mana jumlah masyarakat usia produktif lebih tinggi ketimbang masyarakat usia tidak produktif, akan terancam, jika kondisi ini terus dibiarkan. Masyarakat senantiasa diliputi oleh perilaku tidak sehat (kebersihan dan kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan) dan bayang-bayang kematian akibat penyakit tidak menular (rokok) yang terus meningkat (kanker, diabetes, dll).

Literasi harus berperan memberikan pencerahan dan perubahan, mengawal dan menyelamatkan generasi emas dari rongrongan kesehatan dan kondisi sakit-sakitan. Gerakan literasi mengajak semua pemangku kepentingan untuk memikirkan masa depan generasi bangsa, bersatu melawan gerakan perusakan generasi di sektor kesehatan. Langkah-langkah strategis, berani, dan terencana harus dilakukan.

Langkah-langkah yang bisa dimulai di sekolah, misalnya, memberikan sanksi tegas kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, yang merokok di area sekolah. Kemudian merehabilitasi siswa yang terbukti merokok dengan melibatkan puskesmas, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi ketergantungan rokok hingga siswa itu berhenti merokok. Pihak sekolah dapat mengumpulkan para orang tua, memberikan penyuluhan terkait bahaya merokok, dan mengutarakan harapan untuk tidak merokok di dekat anak.

Kampanye penyadaran akan bahaya konsumsi rokok juga digencarkan, menggunakan cara kreatif dan beragam media yang dekat dengan dunia remaja. Misalnya melalui penyebaran meme, pembuatan film pendek, dan forum diskusi di media sosial. Kampanye dilakukan setiap hari, tanpa putus—menyaingi kerja keras perusahaan rokok yang dengan dana tak terbatas melakukan kampanye ajakan merokok (melalui iklan) setiap hari.

Jumlah komunitas dan relawan yang terdiri atas anak-anak remaja juga perlu ditingkatkan. Mereka terorganisasi, bergerak untuk mengentaskan remaja perokok melalui beragam kegiatan menyenangkan. Pemda, asosiasi dokter, dan LSM berkolaborasi menggelar program bersama. Dengan begitu, lambat laun, jumlah perokok usia remaja akan berkurang drastis dan generasi bangsa kembali sehat untuk memimpin negeri ini.

Jika hal-hal di atas tidak dilakukan, merujuk pada penelitian *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region* edisi ke-3, sebanyak 5,6 juta anak-anak yang hidup hari ini akan mati lebih awal akibat merokok

jika tidak ada sesuatu yang mengurangi jumlah perokok.

Michael Bloomberg, Wali Kota New York, dalam film *Vanguard*: *Sex, Lies and Cigarettes,* berkata, "Rokok, dalam abad ini, akan membunuh satu miliar orang kalau kita tidak bertindak. Itu adalah pembunuh terbesar dan pembunuh yang paling dapat dicegah."

Tindakan pencegahan itu dapat diwujudkan melalui GLS. Program GLS relevan bagi upaya pengentasan konsumen rokok di kalangan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan literasi, dampak merokok bagi kesehatan dan lingkungan sekitar dapat dijadikan bahan diskusi.

Sebelum diskusi, siswa bisa diminta mencari bahan dari beragam sumber, termasuk mewawancarai perokok aktif dan perokok pasif dari kalangan siswa sendiri. Menjadikan keterbukaan berpikir pada berbagai informasi dan upaya mengkritisinya sebagai bagian dari proses pembelajaran akan menuntun siswa menuju kesadaran pada penting dan mahalnya kesehatan bagi kehidupan diri dan orang-orang di sekitarnya.

BAB V
Mendatangkan Buku ke Sekolah

Semakin Anda menengok
pengalaman, semakin menyadari
pentingnya nilai sebuah buku.
(*Paulo Freire, Pendidik dari Brazil*)

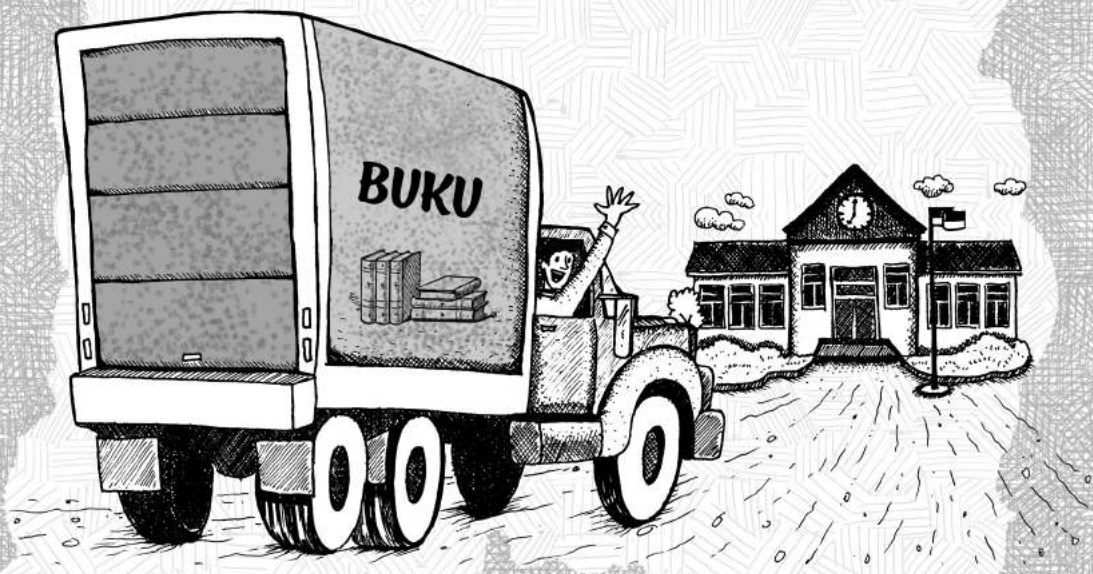

Persoalan buku dan guru di negeri ini ada kemiripan: distribusinya tidak merata. Banyak di satu tempat, sedikit di tempat lain. Padat di suatu daerah, langka di daerah lain.

Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad pernah bercerita tentang ketiadaan buku di suatu kabupaten di Pulau Sumatera. Dinas Pendidikan Kabupaten bingung harus mencari buku di mana. Tidak ada toko buku yang bisa disambangi. Karena yang tersedia adalah buku agama, akhirnya buku tersebut yang dibeli dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Cerita lain datang dari Lanny Anggraini. Direktorat Pembinaan SD, tempatnya bernaung, memberikan Bantuan Pemerintah kepada SD rujukan. Dana bantuan digunakan untuk membeli buku nonteks pelajaran. Berbekal katalog terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, ia dan tim terjun ke lapangan melacak keberadaan sejumlah penerbit yang bukunya lolos seleksi Puskurbuk. Hasilnya mengecewakan.

Dalam pelacakan, lokasi penerbit yang tercantum pada katalog ternyata adalah tempat tukang mie ayam, fotokopi, dan ruko yang sudah tutup. Di pasaran, buku lolos seleksi Puskurbuk juga sulit dicari. Sebabnya, dulu, ketika para penerbit mengirimkan naskahnya untuk dinilai, Puskurbuk tidak melakukan verifikasi terhadap alamat penerbit. Ia hanya fokus pada buku yang dinilai.[1]

Saya pernah menyambangi pusat penjualan buku di Pasar Palasari, Bandung. Berbekal katalog terbitan Puskurbuk tahun 2016[2], saya mencari buku-buku nonteks pelajaran. Dari sekian judul yang dicari, saya hanya dapat beberapa judul. Saya membayangkan, bagaimana dengan sekolah di luar Jawa mencari buku referensi?

Pada pertengahan Juni 2016, saya berkunjung ke sebuah ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi. Di sana belum ada toko buku. Menurut teman pegiat literasi di sana, ia membeli dan memborong buku jika bertandang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia pun biasa memesan buku dengan bantuan jasa ekspedisi.

Minat baca di kota tersebut, katanya, terbilang rendah.

Masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan per hari bisa dihitung dengan jari. Koleksi perpustakaan juga minim, terutama buku-buku keluaran terbaru.

Pada titik ini, ketiadaan buku dan minat baca yang rendah seakan tidak lagi bisa diindentifikasi sebagai penyebab utama. Jika buku tidak ada, orang baca apa? Jika minat orang untuk membaca rendah, siapa yang mau rugi jualan buku? Ini seperti menentukan mana lebih dulu: ayam atau telur.

Pada 2010, sebelum menjabat Mendikbud 4 tahun kemudian, Anies Baswedan menginisiasi munculnya Gerakan Indonesia Mengajar (GIM). Ribuan relawan mahasiswa yang baru lulus kuliah dikirim ke daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk mengajar selama setahun. Kelangkaan guru di daerah 3T sedikit berkurang. Kegiatan tersebut setahun kemudian (2011) 'ditiru' Kemendikbud (Ditjen Pendidikan Tinggi) melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T).

Pada 2012, Anies membuat Kelas Inspirasi. Para profesional diundang untuk mengajar selama satu hari di sekolah dekat rumah. Siswa dan guru mendapat kesempatan menimba pengalaman langsung dari orang-orang sukses.

Mendatangkan orang pintar ke tempat terjauh dan menghadirkan orang sukses ke tempat terdekat, untuk berbagi dan mengajar, adalah terobosan hebat. Paradigma 'semua program butuh dana besar' tumbang, diterjang gerakan bersama memajukan anak bangsa.

Jika persoalan guru sudah memiliki terobosan jawaban (dan masih butuh terobosan lain), persoalan buku juga harus dicarikan terobosan jawabannya. Kelangkaan dan distribusi buku menunggu penyelesaian.

Jumlah buku

Berapa jumlah buku yang dicetak per tahun di negeri ini? Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), jumlah judul buku yang terbit per tahun lebih dari 30 ribu judul. Rata-rata satu judul buku dicetak 3.000 eksemplar[3]. Maka jumlah buku baru yang beredar per tahun sedikitnya mencapai 90 juta eksemplar. Besarkah jumlah tersebut?

Untuk mengetahui besar-tidaknya sebuah pencapaian, kita perlu mencari pembanding. Pembanding itu berasal dari industri perbukuan yang berkembang di luar negeri.

Dalam laporan tahunannya (2015-2016), *Asosiasi Penerbit Internasional* (*International Publishers Association*—IPA) merilis 25 negara yang industri perbukuannya dapat dikatakan sehat.

Top Publishing Markets 2014–2015 by New Titles Produced

Negara	2014	2015	New titles per million inhabitants (2015)	Population (2015)
China	448.000	470.000	335	1.401.586.609
USA		338.986	1.043	325.127.634
UK	220.330	173.000	2.710	63.843.856
France	98.306	106.760	1.643	64.982.894
Germany	87.134	89.506	1.084	82.562.004
Brazil	92.209	88.685	435	203.657.210
Japan	76.465	76.445	603	126.818.019
Spain	78.508	73.233	1.552	47.199.069
Italy	63.922	65.886	1.078	61.142.221
Republic of Korea	47.589	45.213	909	49.750.234
Argentina	28.010	28.966	687	42.154.914
Netherlands	25.793	23.658	1.405	16.844.195
Saudi Arabia	18.745	22.867	765	29.897.741
Denmark	11.340	13.170	2.326	5.661.723
Switzerland	12.711	12.208	1.482	8.238.610
Thailand	11.684	11.334	168	67.400.746
Philippines	7.825	9.480	93	101.802.706
Sweden	6.360	6.739	695	9.693.883
Norway	6.521	6.521	1.268	5.142.842
Belgium	4.452	5.130	459	11.183.411

Georgia	2.964	4.173	969	4.304.540
Finland	6.643	3.493	640	5.460.592
Bosnia and Herz	2.479	2.791	731	3.819.684
Iceland	935	885	2.628	336.728
Kenya		491	11	46.748.617

Sumber: Disarikan dari *International Publishers Association Annual Report* 2015-2016

Jika Indonesia menerbitkan 30 ribu judul per tahun, kenapa Indonesia tidak dimasukkan ke dalam daftar tersebut? Justru negara tetangga, Thailand dan Filipina, dimasukkan, padahal jumlah judul terbit per tahunnya jauh di bawah Indonesia.

Menurut IPA, indikator terpenting dari sehatnya industri penerbitan adalah jumlah judul buku yang terbit per sejuta penduduk. Berdasarkan tabel di atas, judul buku baru yang terbit per satu juta penduduk di Thailand pada 2015 berjumlah 168. Sedangkan di Filipina 93.

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sekitar 255.461.700 jiwa. Jika angka itu dibandingkan dengan jumlah judul buku terbit per tahun, maka judul buku baru yang terbit mencapai 8 buku per satu juta penduduk. Masih kalah jauh dibandingkan dengan Thailand dan Filipina, bahkan oleh Kenya.

Sebagai industri yang berorientasi laba, produksi buku dipengaruhi daya beli dan minat baca masyarakat. Ketiganya saling terkait. Produksi terus berjalan jika ada konsumen. Konsumen membeli karena memiliki minat baca. Jika minat baca masyarakat menurun, otomatis produksi buku akan ikut turun.

Minat baca memang jadi problem tersendiri bagi bangsa ini. Survei *World's Most Literate Nations* yang dibuat Central Connecticut State University, Amerika Serikat, yang dirilis pada awal 2016, meletakkan tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di posisi ke-60 dari 61 negara yang disurvei.

Di tingkat lokal, survei Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)/*Indonesia National Assessment Program* (INAP) yang mengukur literasi matematika, membaca, dan sains siswa kelas IV juga menunjukkan hasil mengecewakan. Pada AKSI 2016, literasi matematika siswa mendapatkan skor 77,13 (kurang), literasi membaca 46,83 (kurang), dan literasi sains 73,61 (kurang). Rendahnya tingkat literasi pada ketiga mata pelajaran ini dengan mudah disimpulkan sebagai akibat minat baca di kalangan siswa rendah.

Bila ingin industri penerbitan tanah air sehat, yang harus dilakukan adalah meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat dan siswa. Sebanyak apapun produksi jumlah buku, sayang sekali kalau hanya segelintir yang membaca. Dalam hal ini, Ikapi dan penerbit berkepentingan untuk mendukung GLS. Salah satu misi GLS adalah menumbuhkan minat baca di kalangan siswa. Jika siswa rajin membaca dan punya jadwal rutin membeli buku, usaha penerbit pastilah turut terdongkrak.

Potensi pasar

Buku termasuk salah satu sarana sangat penting dalam satuan pendidikan. Sifatnya melekat dalam penyelenggaran kegiatan belajar mengajar. Untuk memastikan ketersediaan buku di sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Dalam Permendikbud tersebut, disebutkan secara rinci standar kepemilikan buku tiap jenjang pendidikan berdasarkan jenisnya, yaitu buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain.

Standar Koleksi Buku Perpustakaan

Jenjang	Buku Teks Pelajaran	Buku Panduan Pendidik	Buku Pengayaan	Buku Referensi	Sumber Belajar lain
SD/MI	1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, ditambah 2 eksemplar/mata pelajaran/sekolah. Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota.	1 eksemplar/mata pelajaran/guru mata pelajaran bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	840 judul/sekolah. Terdiri dari 60% non-fiksi dan 40% fiksi. Banyak eksemplar/sekolah minimum: 1.000 untuk 6 rombel, 1.500 untuk 7-12 rombel, 2.000 untuk 13-24 rombel.	10 judul/sekolah. Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang-undang dan peraturan, dan kitab suci.	10 judul/sekolah. Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.
SMP/MTs			870 judul/sekolah. Terdiri dari 70% non-fiksi dan 30% fiksi. Banyak eksemplar/sekolah minimum: 1.000 untuk 3-6 rombel, 1.500 untuk 7-12 rombel, 2.000 untuk 13-18 rombel, 2.500 untuk 19-24 rombel.	20 judul/sekolah. Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang-undang dan peraturan, dan kitab suci.	20 judul/sekolah. Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.
SMA/MA			870 judul/sekolah. Terdiri dari 75% non-fiksi dan 25% fiksi. Banyak eksemplar/sekolah minimum: 1.000 untuk 3-6 rombel, 1.500 untuk 7-12 rombel, 2.000 untuk 13-18 rombel, 2.500 untuk 19-27 rombel.	30 judul/sekolah. Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang-undang dan peraturan, dan kitab suci.	30 judul/sekolah. Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.

Sumber: Permendikbud No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Dari data di atas, kebutuhan atas buku nonteks pelajaran (buku pengayaan dan buku referensi) untuk koleksi perpustakaan sekolah per satuan pendidikan ternyata cukup besar. Untuk jenjang SD/MI, dibutuhkan 840 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi. Untuk jenjang SMP/MTs, dibutuhkan 870 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi. Untuk jenjang SMA/MA, dibutuhkan 870 judul buku dan 30 judul buku referensi. Tiap sekolah harus memiliki minimal 1.000 buku untuk jumlah rombongan belajar (rombel) yang paling sedikit dan 2.500 buku untuk jumlah rombel yang paling banyak.

Guna mengetahui potensi pasar untuk buku nonteks pelajaran, kita dapat menghitungnya dengan mengonfirmasikannya pada jumlah sekolah yang telah berdiri di negeri ini.

Data Pokok Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun Ajaran 2016/2017

Jenjang	Sekolah	Siswa (orang)	Kepala Sekolah + Guru (orang)
TK	88.381	4.605.809	329.102
SD	147.503	25.618.078	1.586.127
SMP	37.763	10.145.416	622.781
SMA	13.144	4.659.542	294.872
SMK	13.236	4.682.913	276.099
SLB	2.070	121.244	24.657
Total	302.097	49.833.002	3.133.638

Sumber: *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun* 2016/2017, *Kemendikbud*

Jumlah Siswa Madrasah Tahun 2016

Jenjang	Sekolah	Siswa (orang)
RA	27.999	1.231.101
MI	24.560	3.565.875
MTs	16.934	3.160.685
MA	7.843	1.294.776
Total	77.336	9.252.437

Sumber: *Kementerian Agama* RI (*emispendis.kemenag.go.id*)

Dari dua jenis tabel di atas, kita dapat menghitung potensi pasar untuk buku nonteks pelajaran per satuan pendidikan.

Jumlah Kebutuhan Buku Nonteks Pelajaran
di Satuan Pendidikan yang Dikelola Kemendikbud

Jenjang	Sekolah	Buku Pengayaan (Eksemplar)	Buku Referensi (Eksemplar)
SD	147.503	147.503.000 s.d. 295.006.000	1.475.030
SMP	37.763	37.763.000 s.d. 94.407.500	755.260
SMA	13.144	13.144.000 s.d. 32.860.000	394.320
Total	198.410	198.410.000 s.d. 422.273.500	2.624.610

Jumlah Kebutuhan Buku Nonteks Pelajaran
di Satuan Pendidikan yang Dikelola Kemenag

Jenjang	Sekolah	Buku Pengayaan (Eksemplar)	Buku Referensi (Eksemplar)
MI	24.560	24.560.000 s.d. 49.120.000	245.600
MTs	16.934	16.934.000 s.d. 42.335.000	338.680
MA	7.843	7.843.000 s.d. 19.607.500	235.290
Total	77.336	49.337.000 s.d. 111.062.500	819.570

Angka itu tentu saja ukuran yang ideal. Sebab, kenyataannya, tidak semua sekolah memiliki koleksi buku nonteks pelajaran sebanyak standar yang telah ditetapkan. Jangankan buku nonteks pelajaran, ketersediaan buku teks pelajaran, terutama di kawasan terluar, tertinggal, dan terpencil (3T), masih kurang—meskipun pengadaan buku teks pelajaran dijamin melalui penyaluran dana BOS.

Pertanyaannya kemudian, dengan angka riil tersebut, mampukah pemerintah dan pihak swasta, dalam hal ini penerbit, menyediakan kebutuhan buku sebanyak itu di satuan pendidikan? Jika belum mampu, apakah usaha yang kini tengah dijalankan menuju pada pencapaian tersebut? Ini menjadi PR besar bagi semua pemangku kepentingan di bidang perbukuan, mulai dari regulasi, pendanaan, pengadaan, dan distribusi buku.

Peta persebaran penerbit

Jumlah siswa Indonesia sekitar 59 juta[4]. Dengan asumsi satu siswa baca satu judul buku nonteks pelajaran, maka 59 juta potensi pasar adalah angka yang sangat besar. Belum lagi tambahan peserta didik dari pendidikan nonformal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, lembaga kursus, dll).

Namun, sekali lagi, potensi itu belum tergarap maksimal. Faktor internal dan eksternal masih menjadi problem; minat baca rendah, daya beli kurang, akses terhadap buku sulit.

Peta persebaran populasi siswa juga menjadi cermin peta keberadaan penerbit buku. Keduanya memiliki kesamaan: penerbit banyak hadir di Pulau Jawa tetapi minim di daerah lain.

Menurut data Ikapi (2015), jumlah penerbit anggota Ikapi pada 2015 sebanyak 1.328 penerbit[5]. Dari angka itu, peta persebaran penerbit tidak merata. Penerbit terkonsentrasi di lima wilayah utama, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Padahal, angka penjualan buku begitu menggiurkan. Pangsa pasar buku umum di Indonesia tahun 2014, menurut Ikapi, adalah Rp14,1 triliun. Jika ditambah pangsa pasar buku pelajaran dan pengadaan buku pada proyek pemerintah Rp3,51 triliun, maka total pangsa pasar buku di Indonesia mencapai Rp17,61 triliun.

Terpusatnya penerbit di pulau Jawa yang berdampak pada timpangnya distribusi di luar Jawa, bagaimanapun, harus dicarikan solusi. Solusi yang bisa diajukan sebagai berikut.

Pertama, pembukaan kantor distribusi/perwakilan pemasaran lebih banyak. Kantor perwakilan menjadi representasi penjualan buku di suatu daerah. Ia berhubungan langsung dengan toko buku besar dan kecil. Menurut Ikapi, dari 711 penerbit aktif, baru 148 penerbit (21%) yang memiliki kantor perwakilan.

Pembukaan kantor perwakilan diprioritaskan di luar Jawa. Diupayakan, setidaknya, minimal ada satu kantor perwakilan penerbit

di tiap kabupaten/kota. Kantor perwakilan tidak hanya berkutat pada transaksi jual-beli secara langsung, tapi juga melihat potensi lain yang bisa dikembangkan, seperti kerja sama penyelenggaraan pameran buku dan layanan penjualan buku secara daring (*online*).

Kedua, menyelenggarakan pameran buku secara berkala dan menjadikannya sebagai program periodik. Penyelenggaraan dapat dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi dengan komunitas dan pegiat literasi serta pengelola taman bacaan masyarakat. Selain menggelar peluncuran dan diskusi buku, di sekitar arena pameran didirikan stan untuk promosi para pegiat dan komunitas literasi. Penerbit tidak perlu sungkan menggandeng Pemda seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Agenda pameran buku juga harus dipetakan. Melalui pemetaan, masyarakat akan tahu kapan harus belanja di pameran buku.

Ketiga, menyediakan galeri penjualan di lingkungan kantor perwakilan. Buku dipajang dan dijual kepada masyarakat. Pengawasan galeri lebih mudah karena berada di lingkungan kantor. Lebih bagus jika galeri kemudian dikembangkan menjadi tempat diskusi dan promosi buku yang melibatkan komunitas dan pegiat literasi.

Keempat, menawarkan diri kepada penyelenggara acara di sekolah atau kampus untuk mengisi bazar buku. Bazar buku digelar bersamaan dengan kegiatan besar sekolah/kampus, misalnya pentas seni, festival literasi, atau perayaan hari besar agama/nasional. Pemberian diskon yang menggiurkan akan membuat pengunjung acara antusias untuk membeli.

Dulu, bersama teman-teman, saya mengelola penjualan buku di kampus. Kami menyediakan rak buku di ruang sekretariat penerbitan kampus. Dengan sistem konsinyasi, kami menjual buku dengan diskon lumayan besar dari sejumlah penerbit besar yang

menitipkan bukunya—penulis buku indie juga dapat menitipkan bukunya di sini. Seringkali orang enggan beli buku bukan karena tidak punya uang, melainkan kurang waktu untuk menyambangi toko buku. Mendekatkan penjualan buku kepada 'orang-orang sibuk' itu merupakan langkah strategis untuk memacu penjualan.

Tantangan lain yang perlu dipikirkan adalah distribusi buku hingga ke kawasan terpencil dan perbatasan. Thamrin Kasman, Sekretaris Ditjen Dikdasmen, berharap muncul strategi jitu mengenai mekanisme mobilisasi buku dari gudang ke toko buku, perpustakaan, dan ruang kelas. Jika bank dan kantor pos ada di pelosok desa, katanya, toko buku juga bisa bersanding dengan keduanya.[6]

Terbukanya akses bagi masyarakat di daerah 3T, komunitas adat terpencil, dan yang mengalami bencana adalah amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Undang-undang yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017 itu bahkan menekankan bahwa akses terhadap buku adalah hak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Perlu kerja sama dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah agar buku bermutu dan murah dapat diakses secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.[7]

Mendatangkan buku

Bagaimana mendatangkan sekian judul buku nonteks pelajaran ke sekolah? Ada beberapa cara yang telah ditetapkan. *Pertama*, gunakan dana BOS. Ketentuannya, minimal 5% dana BOS digunakan untuk membeli buku teks dan nonteks pelajaran. *Kedua*, mengusulkannya kepada dinas pendidikan/kantor Kemenag kabupaten/kota. *Ketiga*, membeli buku murah, misalnya membeli buku di ajang pameran buku yang selalu banjir diskon. *Keempat*, mengunduh buku elektronik yang hak ciptanya milik pemerintah.[8]

Kelangkaan buku dan ketiadaan toko buku di suatu daerah bukanlah kiamat. Sebab, di kawasan perkotaanpun, di mana berdiri toko buku, mendatangkan buku ke sekolah tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pihak sekolah harus kreatif dan inovatif dalam mengelola beragam potensi di sekitarnya.

Kepala sekolah di sejumlah daerah melibatkan partisipasi orang tua dalam pengadaan buku di sekolahnya. Sifatnya sukarela, bukan pewajiban.

Di Riau, Nurhafni, Kepala SMAN 4 Pekanbaru, selalu meminta orang tua membawa buku di setiap acara yang melibatkan mereka. Buku itu disumbangkan untuk koleksi sudut baca kelas, pojok literasi, dan perpustakaan. Siswa yang lulus juga diminta menyumbang buku. Jika ada pertemuan alumni, sekolah hanya mengharapkan sumbangan buku dari kegiatan itu.

Di Yogyakarta, Sri Maryati, Kepala SD Negeri Purworejo, Sleman, menerima sumbangan buku orang tua tiap awal tahun pelajaran baru. Sekolah mengumpulkan seluruh wali murid dan menyampaikan kebutuhan atas buku kepada mereka. Beberapa wali murid mampu menyumbang sejumlah buku, namun sebagian orang tua merasa kesulitan menyumbang buku. Ada pula yang menyerahkan uang kepada sekolah untuk dibelikan buku. Buku itu kemudian didistribusikan ke sudut-sudut baca kelas[9].

Di Gorontalo, Abram Badu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, melihat para orang tua antusias menyumbangkan buku ke sekolah anaknya. Di antara mereka, ada pengusaha yang menyumbang buku kepada sekolah.

Keterlibatan orang tua dalam pengadaan buku di sekolah sangatlah penting. Latar belakang dan keragaman jenis pekerjaan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam berbagai cara. Bisa saja di antara mereka ada yang berprofesi sebagai pemimpin perusahaan, bekerja di penerbitan/percetakan, atau penulis, yang dengan profesi tersebut dapat membantu mendatangkan buku ke sekolah.

Selain sumber internal, potensi eksternal juga dapat diandalkan. Sekolah, misalnya, dapat mengirimkan proposal permohonan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*—CSR) kepada perusahaan yang berdiri di wilayahnya (atau di wilayah lain yang jauh). Bentuk bantuan yang diharapkan adalah penyediaan buku nonteks pelajaran untuk koleksi sudut baca dan perpustakaan sekolah.

Penerbit buku juga berpotensi menyumbangkan buku koleksinya, baik buku terbitan terbaru maupun buku yang mangkrak di gudang. Hubungan dengan penerbit agar tetap dijaga karena kerja sama lain bisa dijajaki, antara lain peluncuran buku dengan mendatangkan penulis ke sekolah, bazar buku, dan bedah buku.

Sekolah ada baiknya mengagendakan kunjungan siswa ke perpustakaan daerah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di sekitarnya secara berkala. Biasanya, koleksi buku di tempat tersebut banyak dan variatif. Sekolah juga bisa menggalang kerja sama dengan pengelola perpustakaan dan TBM untuk menggelar kegiatan yang melibatkan siswa, misalnya *workshop* menulis, bedah buku, dan festival literasi.

Seleksi Buku

Tidak semua buku populer yang laku di pasaran baik untuk dibaca siswa. Sebab, ada buku bertema dewasa, mendapat pujian banyak kritikus, meraih penghargaan internasional, namun tidak baik dibaca siswa karena kontennya sarat aktivitas seksual dan istilah cabul.

Persoalan konten buku tidak hanya dialami buku nonteks pelajaran. Di sejumlah sekolah di berbagai daerah, banyak ditemukan kasus buku teks pelajaran yang tidak sesuai dengan nilai/norma masyarakat.

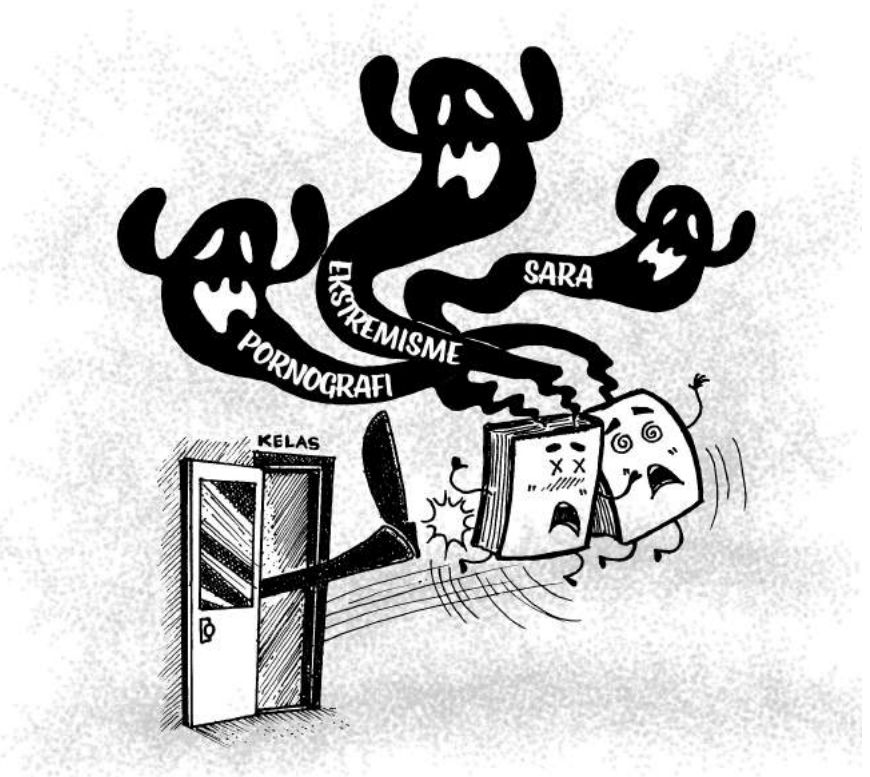

Kisruh konten buku menjadi salah satu pertimbangan Anies Baswedan, pada akhir 2014, mengeluarkan keputusan berupa peninjauan ulang penerapan secara menyeluruh K13 di satuan pendidikan—sebagian sekolah menerapkan K13, sebagian lagi melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selain menilai banyak sekolah belum siap menerapkan K13, Anies memandang seluruh konten buku K13 perlu ditinjau ulang.

Untuk "memagari" siswa dari pengaruh buku berkonten merusak, Kemendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Permendikbud yang ditandatangani Anies Baswedan pada 29 Februari 2016 ini mensyaratkan dua kewajiban yang harus dimiliki

sebuah buku teks dan nonteks pelajaran yang boleh beredar di sekolah. *Pertama*, memenuhi unsur nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstremisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. *Kedua*, memenuhi kriteria penilaian sebagai buku yang layak digunakan oleh satuan pendidikan. Kriteria itu mencakup kulit buku, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Satuan pendidikan yang tidak mengindahkan peraturan ini akan mendapatkan sanksi berupa: (1) rekomendasi penurunan peringkat akreditasi, (2) penangguhan bantuan pendidikan, (3) pemberhentian bantuan pendidikan, atau (4) rekomendasi atau pencabutan izin operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan. Penulis dan penerbit yang melanggar juga dikenakan sanksi.

Lalu, siapa pihak yang ditugaskan menyeleksi buku yang masuk ke sekolah? Permendikbud itu tidak menyebut secara spesifik. Hanya disebutkan yang memilih, menyediakan, dan mengevaluasi buku yang dipakai di sekolah adalah satuan pendidikan itu sendiri (pasal 9).

Pada buku *Panduan Pemilihan Buku Nonteks Pelajaran untuk Satuan Pendidikan* terbitan Puskurbuk (buku ditulis oleh Sofie Dewayani, Mei 2016), tidak disebutkan pula secara spesifik pihak yang melakukan seleksi terhadap buku yang masuk ke sekolah. Buku ini, yang dimaksudkan sebagai pelengkap Permendikbud tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, ditujukan untuk membantu lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, dan satuan pendidikan dalam mengembangkan koleksi buku perpustakaan sekolah/madrasah.

Dalam rambu Gerakan Literasi Sekolah, seleksi buku dapat dilakukan oleh Tim Literasi Sekolah (TLS). Keanggotaan TLS berasal dari unsur guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan (pustakawan,

pengawas sekolah), dan peserta didik. Keanggotaan dapat diperluas dengan melibatkan Komite Sekolah di mana unsur orang tua, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dunia industri tercakup di dalamnya.

Keberagaman latar belakang anggota TLS memudahkan dalam melakukan seleksi buku. Seleksi mengenai tema tertentu dapat dilakukan oleh orang tertentu pula. Misalnya, seleksi terhadap buku fiksi remaja dapat dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia, tokoh masyarakat yang juga penulis/sastrawan, atau orang tua lulusan jurusan psikologi.

Seleksi buku menjadi kegiatan yang sangat penting. Sebab, "donatur" buku begitu beragam, mulai dari orang tua, lembaga pemerintah, LSM, perusahaan, penerbit, lembaga donor asing, hingga perseorangan. Tingkat keterbacaannya tidak semua sesuai dengan usia dan jenjang siswa. Seleksi buku menjamin nilai-nilai positif yang dibangun di sekolah terjaga, tidak terkontaminasi oleh nilai-nilai yang dapat merusak kepribadian dan karakter peserta didik.

Terlalu detail

Buku *Panduan Pemilihan Buku Nonteks Pelajaran untuk Satuan Pendidikan* yang diterbitkan Puskurbuk (2016) menjelaskan detail standar buku yang tercantum dalam Permendikbud itu. Karena bersifat wajib, standar ini sangat penting diketahui pelaku penerbitan baik untuk buku teks pelajaran maupun buku nonteks pelajaran. Pelaku penerbitan yang dimaksud yaitu penulis, editor, ilustrator, penelaah, konsultan, *reviewer*, penilai, dan penerbit.

Buku itu memuat sejumlah detail kaidah baru yang wajib dipatuhi pelaku penerbitan. Detail tersebut di antaranya pencantuman keterangan kanal masukan masyarakat pada halaman penerbitan yang berbunyi: "Dalam rangka meningkatkan mutu buku, masyarakat sebagai pengguna buku diharapkan dapat memberikan

masukan kepada alamat Penulis dan/atau Penerbit dan laman *http://buku.kemdikbud.go.id* atau melalui email *buku@kemdikbud.go.id*".

Selain itu, pada bagian akhir buku, wajib dicantumkan informasi mengenai penulis, editor, ilustrator, penelaah, konsultan, *reviewer*, penilai, dan/atau penerbit. Informasi itu mencakup nama lengkap, gelar akademis, riwayat pendidikan, buku yang ditulis dalam kurun waktu 10 tahun, penelitian yang dilakukan dan/atau dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun, pas foto, bidang keahlian, pekerjaan tetap/profesi dan jabatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, alamat kantor atau alamat rumah, nomor telepon kantor dan/atau telepon genggam, akun *Facebook*, *e-mail*, dan informasi lain yang ingin dicantumkan.

Sedangkan informasi yang harus dicantumkan tentang penerbit meliputi nama perusahaan atau badan usaha; tahun berdiri; tahun penerbitan buku pertama; tanda daftar perusahaan (TDP); alamat, nomor telepon, dan nomor faksimile kantor; nomor pelayanan pelanggan; akun *Facebook*; dan alamat *e-mail*.

Di satu sisi, detail informasi tersebut sangat baik diketahui calon pembeli buku. Data transparan mengenai pelaku penerbitan membuat mereka mengenali latar belakang, kompetensi, dan integritas pelaku penerbitan. Terlebih, buku-buku layak tarik dari peredaran rata-rata sulit dilacak penulis dan penerbitnya. Sehingga, diharapkan, dengan menyertakan informasi tentang pelaku penerbitan, konsumen tidak membeli buku seperti membeli kucing dalam karung.

Di sisi lain, informasi melimpah itu sulit diakomodasi buku-buku spesifik seperti buku bergambar (*picture book*). Buku bergambar yang beredar luas di masyarakat umumnya tidak mencantumkan secara detail informasi pelaku penerbitan. Tambah informasi detail berarti tambah halaman pula. Informasi itu berguna bagi orang tua dalam memilihkan buku namun tidak demikian dengan sang anak.

Sejumlah regulasi baru yang terkandung dalam Permendikbud itu menjadi perbincangan hangat saat Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku II di Bekasi, Jawa Barat.

Salah satu hal paling mengejutkan yang muncul dalam diskusi adalah bahwa buku-buku edukatif, inspirasional, dan laku di pasaran seperti *Laskar Pelangi* tidak bisa masuk ke sekolah sebelum mendapat penilaian dari Puskurbuk. Sebabnya jelas: *Laskar Pelangi* belum dinilai oleh Puskurbuk. Atas fenomena ini, muncul harapan agar Puskurbuk melakukan 'jemput buku', aktif memantau dan menilai buku-buku bagus dan laris di pasaran untuk kemudian dimasukkan dalam katalog referensi sekolah.

Dalam diskusi, terungkap pula bahwa banyak penerbit tidak mengirimkan buku yang laku di pasaran untuk dinilai. Padahal penilaian buku tidak dipungut biaya alias gratis. Penerbit dipandang hanya mengedepankan unsur komersil: ketika buku laris di pasaran, otomatis akan menjadi koleksi perpustakaan daerah termasuk perpustakaan sekolah sehingga tidak perlu dinilai oleh Puskurbuk.

Di lapangan, beragam buku terus 'membanjiri' sekolah. Baik melalui penyaringan maupun tanpa penyaringan oleh Kepala Sekolah dan guru. Dikhawatirkan, buku yang mengandung nilai-nilai tidak terpuji sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 memenuhi rak-rak buku perpustakaan dan sudut baca kelas.

Di sinilah Tim Literasi Sekolah diharapkan berperan. Seleksi buku yang masuk ke sekolah harus dilakukan. Bagaimanapun, siswa berhak mendapatkan buku bacaan yang bagus dan berkualitas, bebas dari unsur pornografi, paham ekstremisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.

Buku digital

Sumber ilmu tidak hanya dalam bentuk cetak. Kini, buku yang dicetak secara elektronik (*e-book*) alias buku digital sudah banyak beredar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sudah mengunggah ratusan judul buku elektronik hasil penilaian Puskurbuk ke laman Buku Sekolah Elektronik (bse.kemdikbud.go.id). Masyarakat dapat mengunduhnya secara gratis.

Sejumlah penerbit besar pun telah mengonversi buku versi cetaknya ke dalam bentuk digital. Tidak hanya itu, mereka juga membuka toko buku digital (*e-book store*), di antaranya eRosda (e-rosda.com) oleh Rosdakarya dan Mizan (Mizan Lumos di Google Play). Menurut Ikapi (2015), jumlah penerbit aktif yang bergerak ke arah buku digital sangat signifikan, mencapai 20%.[10]

Toko daring lain turut hadir meramaikan pasar buku digital. Sebut saja Qbaca (qbaca.com) yang dikembangkan Telkom, Bookmate Indonesia (bookmate.com) yang dikembangkan Indosat Ooredoo, dan Buqu (buqustore.com) yang dikembangkan PT. Buqu Global. Aplikasi dapat diunduh di Google Play dan IOS secara gratis.

Perpustakaan pun mengalami transformasi yang sangat maju, yaitu dengan adanya perpustakaan digital. Pembaca buku, dari wilayah manapun, dapat meminjam buku di perpustakaan ini. Buku dapat diakses dan dibaca melalui telepon seluler.

Pemda DKI Jakarta meluncurkan iJakarta, perpustakaan digital yang memuat ribuan judul buku. Siapapun dapat meminjam beragam jenis buku dengan cara yang sangat mudah. Cukup mendaftar menggunakan nomor telepon dan akun media sosial, koleksi buku digital dapat dipinjam secara gratis. iJakarta dapat diakses melalui laman (*ijakarta.id*) dan ponsel berbasis Android, iOS, dan Windows.

Uniknya, iJakarta menyediakan fitur media sosial yang memungkinkan interaksi antarpembaca. Pembaca dapat memberi komentar atas buku yang dibacanya. Pembaca lain pun dapat mengomentari komentar tersebut sehingga terjadi dialog dan diskusi tentang buku.

Perpustakaan digital lainnya adalah *buqulib.com*. Berbeda dengan IJakarta, peminjaman buku di perpustakaan ini dikenakan biaya yang relatif murah, yaitu Rp3.000/buku. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui ponsel berbasis Android, iOS, dan Windows.

Kepala Sekolah, guru, dan siswa dapat memesan dan membeli buku melalui toko buku daring. Siswa dan guru juga sebaiknya didorong untuk berkunjung dan meminjam buku di perpustakaan digital.

Toko buku daring

Untuk menjangkau konsumen lebih luas dan kemudahan layanan, banyak penerbit memiliki toko daring (*online*). Banyaknya pilihan buku, kemudahan dalam pemesanan, dan potongan harga yang bersaing merupakan fasilitas yang sayang jika dilewatkan.

Di antara sekian banyak toko buku daring, berikut ini 20 toko yang bisa jadi referensi:

No	Nama Penerbit	Alamat Laman
1	Andi	www.andipublisher.com
2	Balai Pustaka	www.balaipustakaonline.com
3	Bentang	www.bentangpustaka.com
4	Diva Press	www.divapress-online.com
5	Elex Media Komputindo	www.elexmedia.id
6	Erlangga	www.erlangga.co.id & www.bukuerlangga.com
7	Gagas Media	www.gagasmedia.net
8	Galang Press	www.galangpress.com
9	Gramedia Pustaka Utama	www.gpu.id
10	Grasindo	www.grasindo.id
11	Indiva	www.indivamediakreasi.com
12	Komunitas Bambu	www.bukukomunitasbambu.com
13	Mizan	www.mizan.com
14	Noura Books	www.nourabooks.co.id
15	Penerbit KPG	www.penerbitkpg.id
16	Pro-U Media	www.proumedia.co.id
17	Puspa Swara	www.puspa-swara.com
18	Republika	bukurepublika.id
19	Robbani Press	www.robbanipress.co.id
20	Serambi	www.serambi.co.id

Jika toko buku di atas hanya menjual produk terbitannya, ada pula toko buku daring yang menjual beragam judul buku terbitan sejumlah penerbit. Berikut ini beberapa di antaranya.

No	Laman	Jenis Buku
1	www.belbuk.com	Lokal
2	www.bukabuku.com	Lokal
3	www.bukukita.com	Lokal
4	www.bukupedia.com	Lokal dan asing
5	www.eurekabookhouse.com	Lokal
6	www.garisbuku.com	Lokal
7	www.grobmart.com	Lokal
8	www.opentrolley.co.id	Asing
9	www.palasarionline.com	Lokal
10	www.parcelbuku.net	Lokal
11	www.periplus.com	Lokal dan asing
12	www.uranusbooks.com	Lokal

Sejumlah toko serba ada (toserba) daring juga ikut menjual buku sebagai salah satu produk dagangannya. Toserba daring itu di antaranya *www.lazada.co.id*, *www.tokopedia.com*, dan *www.bukalapak.com*.

Dengan membuka laman penerbit buku, kita jadi tahu alamat redaksi dan nomor telepon penerbit. Hal ini urgen jika kita ingin bertanya langsung kepada kru redaksi atau mengunjungi lokasi penerbit. Informasi lain yang disuguhi dalam laman biasanya katalog, sinopsis, dan daftar harga buku. Umumnya laman tersebut juga menyajikan informasi penting lain di antaranya cara pengiriman naskah, informasi lomba, dan resensi.

Layanan self publishing

Salah satu cara terbaik untuk merangsang minat dan semangat siswa dalam berliterasi adalah menerbitkan karya mereka dalam bentuk buku. Sejumlah sekolah mengadakan sayembara menulis, atau mengumpulkan karya tulis siswa dan guru, untuk dibukukan. Karya itu berupa cerita pendek, puisi, atau gambar bercerita (komik).

Problemnya, jika karya tersebut ingin diterbitkan di penerbit mayor, hampir dipastikan tidak dapat terlaksana. Sebab, karena sifatnya mengakomodasi beragam karya, dan ditulis oleh pemula, kualitas yang diharapkan penerbit sulit tercapai. Kalaupun diterbitkan, prosesnya memakan waktu lama terutama dari segi editing.

Kondisi demikian dapat diatasi dengan menerbitkan buku melalui penerbit indie. Bisa dipastikan buku dengan konten apapun bisa diterbitkan lewat jalur ini. Asal ada dana, berapapun jumlah halaman, bentuk yang diinginkan, dan desain yang disukai, semua dapat dipenuhi.

Penerbit indie dapat dijangkau dengan sangat mudah. Mereka memiliki situs internet berisi informasi detail mulai proses editing hingga pencetakan. Biasanya, layanan jasa yang ditawarkan menyeluruh, mulai dari editing, tata letak (*lay out*), pembuatan sampul, hingga pencetakan. Kita hanya menyediakan naskah siap edit.

Sebagian penerbit indie juga menawarkan paket-paket penerbitan, mencakup pilihan jenis layanan jasa, jumlah eksemplar cetak, lama pencetakan, dan harga. Ada pula yang mencetak sesuai permintaan (*print on demand*). Penerbit biasanya juga membuka layanan konsultasi pencetakan.

Keuntungan lain menggunakan jasa penerbit indie adalah aspek promosi. Biasanya, penerbit indie mempromosikan buku terbitannya di laman yang dikelolanya.

Berikut ini alamat penerbit indie yang bisa dijadikan referensi.

No	Nama Penerbit	Alamat Laman
1	Mizan	www.mizanstore.com
2	LeutikaPrio	www.leutikaprio.com
3	Indie Publishing	www.indie-publishing.com
4	Halaman Moeka Publishing	www.halamanmoeka.net
5	Diandra Creative	www.diandracreative.com
6	Rasibook	www.rasibook.com
7	Pustakapedia	www.pustakapedia.com
8	Pohon Cahaya	www.penerbit.pohoncahaya.com

BAB VI

Peran Orang Tua

Tak ada gunanya mencoba menularkan
"virus" membaca ke dalam diri anak-anak
jika Anda sendiri tak pernah memilikinya.
(*Paul Jennings, Penulis dari Australia*)

Kegiatan membaca sejak dini dapat menjaga kesehatan otak saat orang mencapai usia lanjut. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah ilmuwan dari Rush University Medical Centre, Chicago, Amerika Serikat[1].

Menurut penelitian tersebut, responden yang sepanjang hidupnya melakukan kegiatan yang merangsang aktivitas otak, mengalami penurunan kognitif 15 persen memori lebih lambat ketimbang mereka yang tidak melakukan kegiataan serupa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada lagi alasan untuk meremehkan efek dari kegiatan sehari-hari seperti membaca dan menulis pada anak-anak, diri sendiri, orang tua, atau kakek-nenek. Melatih otak selama seumur hidup, mulai dari kanak-kanak sampai dewasa, sangat membantu menjaga kesehatan otak saat sudah mencapai usia lanjut.

Selain pada kesehatan, kegiatan membaca juga berdampak pada prestasi anak. Sebuah penelitian di Inggris yang dilakukan oleh Institut Pendidikan Universitas London membuktikan kesimpulan ini[2].

Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang gemar membaca lebih baik menguasai matematika dan mudah memahami kosakata daripada anak-anak yang jarang membaca. Artinya, kegiatan membaca meningkatkan kecerdasan logika dan linguistik seorang anak.

Anak yang gemar membaca akan bertambah terus perbendaharaan katanya. Semakin sering membaca, kemampuan menyerap dan memahami hal baru terus bertambah karena otaknya terlatih mengolah informasi.

Yang digarisbawahi dalam penelitian ini adalah kegiatan membaca dilakukan secara menyenangkan, bukan paksaan. Anak yang menjadikan membaca sebagai kegiatan menyenangkan disinyalir mampu menyerap dan memahami informasi baru dengan mudah.

Anak yang rajin membaca cenderung memahami suatu persoalan secara komprehensif. Menilai dari berbagai sudut pandang. Menyeluruh. Analitis. Terbuka. Sehingga saat menghadapi suatu situasi, permasalahan atau konflik, pikirannya secara otomatis melakukan analisis ilmiah; mencerna, memahami, menilai, dan memutuskan dengan berbagai pertimbangan.

Kebiasaan berpikir ilmiah tersebut, jika diterapkan dalam menjalani pembelajaran di sekolah, tentu akan memengaruhi pencapaian prestasinya. Terlebih buku yang dibacanya adalah buku referensi atau pengayaan yang kaya dengan gambar dan imajinatif. Otak kiri dan kanannya akan bekerja secara seimbang. Dr. Alice Sullivan, penanggung jawab penelitian ini, mengatakan bahwa kemampuan membaca yang kuat akan memungkinkan anak-anak mampu menyerap dan memahami informasi baru dan memengaruhi pencapaian mereka dalam semua mata pelajaran.

Kedua penelitian di atas menegaskan tentang fungsi membaca yaitu menyehatkan otak dan mendukung prestasi anak. Orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi tidak perlu mengirim mereka ke sekolah bonafit dan lembaga bimbingan belajar terkemuka. Cukup biasakan mereka membaca buku sejak dini. Upaya ini jauh lebih murah dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

Setelah membaca

Howard Gardner, ahli pendidikan pencetus teori kecerdasan majemuk (*Multiple Intelligences*), mengatakan manusia memiliki delapan kecerdasan, yaitu linguistik, matematika, spasial, kinestetis, musik, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Semua potensi itu menyatu dalam diri manusia dan tak terpisahkan. Yang perlu dilakukan adalah merangsang semua kecerdasan itu agar bertumbuh dan berkembang baik.

Thomas Armstrong, psikolog dan penulis buku-buku bertema pembelajaran dan pengembangan manusia, mengatakan untuk melesatkan kecerdasan anak diperlukan alat dan aktivitas stimulasi yang tepat[3]. Alat dan aktivitas stimulasi itu dikelompokkan Armstrong dalam empat hal; *Word Smart*, *Number Smart*, *Self Smart*, dan *People Smart*.

Untuk *Word Smart*, alat stimulasi yang dibutuhkan berupa buku anak-anak, majalah yang dapat digunting, huruf alfabet dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mainan blok berbentuk kata-kata. Aktivitas stimulasi yang bisa dilakukan yaitu kegiatan bercerita, membaca bersama, dan melakukan dialog percakapan.

Pada *Number Smart*, alat stimulasinya dapat berupa benda-benda untuk dihitung baik bertuliskan angka, timbangan pengukur berat, gelas ukur, komputer, dan *puzzle*. Aktivitas stimulasinya dapat dengan bermain monopoli atau mengunjungi museum.

Untuk *Self Smart*, alat stimulasinya dapat berupa tempat nyaman untuk anak bermain sendiri, materi untuk hobi khusus, boneka, dan materi untuk permainan peragaan. Aktivitas stimulasi bisa dengan mengajak anak mengungkapkan perasaannya atau aktivitas pengurang stres lainnya.

Sementara *People Smart*, alat stimulasinya bisa berupa kostum drama, istana boneka, dan teater boneka. Aktivitas stimulasinya misalnya bermain bersama di luar rumah, menyambangi acara perayaan keluarga, dan bermainan aneka permainan bersama.

Dari keempat aspek di atas tampak bahwa untuk merangsang kecerdasan majemuk yang dimiliki anak, orang tua perlu mengondisikan mereka pada aktivitas yang melibatkan teks, gambar, dan percakapan. Empat keterampilan yang dikembangkan dalam diri anak yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Seiring perkembangan kepribadian dan karakter anak, mendekatkan buku kepada anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan hal itu dianjurkan untuk dimulai sejak anak dalam

kandungan: orang tua membacakan buku, anak mendengarnya. Aktivitas membacakan buku berlanjut ketika anak beranjak balita, anak-anak, hingga remaja.

Ada idiom baik seperti ini, "Anak memainkan apapun yang didekatnya." Jika di dekatnya ada bola, anak akan menendangnya. Bila di dekatnya ada gawai, anak akan memainkannya. Jika di dekatnya ada televisi, anak akan menontonnya. Seandainya di dekatnya ada buku, anak akan membacanya.

Ungkapan di atas hendak menjawab pertanyaan mengapa banyak anak lebih suka bermain gawai dan menonton televisi ketimbang membaca buku: sejak kecil, oleh orang tua mereka didekatkan kepada gawai dan televisi serta dijauhkan dari buku. Penyimpulan yang sangat sederhana.

Maka, jika ingin punya anak yang rajin membaca, dekatkan mereka pada buku sedini mungkin. Sediakan buku yang sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan membacanya. Taruh di sudut-sudut rumah yang sering dijangkaunya, misalnya di kamar tidurnya, ruang tamu, atau dapur. Sehingga, ke manapun mereka bergerak, selalu buku yang terlihat.

Siswa-siswi juara lomba menulis cerita pendek yang diadakan Kemendikbud pada 2011 – 2015 dekat dengan buku. Buku menjadi sahabat mereka. Kemampuan mereka 'mengunyah' buku pun cukup beragam. Namun, intinya, interaksi dengan buku dilakukan setiap hari baik di rumah maupun di sekolah.

Nurmalitasari Rahadian, Juara I Lomba Menulis Cerita (LMC) tingkat SMP/MTs tahun 2013, membaca enam buku dalam sebulan. Artinya, dalam seminggu, penulis asal Bogor ini selesai membaca 1-2 buku.

Intan Nurhaliza, juara I LMC tingkat SD/MI tahun 2014, senang membaca komik. Tiga buku bisa diselesaikan penulis asal Bekasi ini dalam sehari. Novel tamat dalam lima hari.

Aulal Muna, juara I LMC tingkat SMP/MTs tahun 2014, tidak

menargetkan jumlah buku selesai baca. Namun biasanya, dalam seminggu, ia menamatkan tiga buku.

Yang mengagumkan adalah Kalyana Adzhara, juara I LMC tingkat SD/MTs tahun 2015. Dalam satu hari ia menamatkan satu buku. Bahkan bisa lebih.

Berikut ini kebiasaan membaca para juara LMC tingkat SD/MI tahun 2015. Tabel ini disarikan dari buku antologi cerpen yang memuat karya mereka[4].

No	Nama	Jumlah Buku Dibaca	Keterangan
1	Kalyana Adzhara	250-300 (2014-2015). Tiap minggu baca 5-10 buku.	Ibu tempat berbagi cerita, curhat. Ayah sering membelikan banyak buku, terutama promo buku murah. Ayah mengharuskan Kekey (panggilan akrab Kalyana) buat satu cerita tentang perjalanan selama liburan. Tiap liburan, Kekey selalu memikirkan ide yang harus ditulis sepulang liburan.
2	Bintang Nurul Hidayati	150-200 (2014-2015)	Suka baca buku terbitan lama. Bintang dan Mama beli buku bekas secara daring (*online*) per bulan paling sedikit 10 buku. Salah satu hobi mama adalah membaca dan itu menular pada Bintang. Mama juga jadi teman diskusi.
3	Gita Mawaddah Yuliana	-	Rumah (Demak) dekat perpustakaan mini milik petugas Perpustakaan Daerah. Tiap hari Gita membaca dan meminjam buku di situ. Terinspirasi menulis dari Kepsek yang guru berprestasi tingkat nasional dan guru pembimbing lomba. Mengisi waktu luang bersama teman dengan membaca. Ayah (prajurit TNI) membuatkan perpustakaan kecil. Kebiasaan ayah membaca koran sembari ngopi usai pulang kerja. Ibu mendorong agar Gita selalu membaca.
4	Shofiyyah Lukman	-	Membaca banyak buku saat liburan. Membaca novel yang baru dibeli atau mengulang novel yang sudah berkali-kali dibaca. Buku yang sudah dibaca seratusan lebih. Sering menjumpai kakak belajar di kamar. Terinspirasi dari kakak yang suka menulis. Shofiyyah membaca dan menulis, dilakukan secara berbarengan.
5	Pandan Raditya Arundhati Satya	-	Punya perpustakaan kecil di kamarnya. Suka membaca buku sastra koleksi ayah yang penulis seperti *Bumi Manusia*, *Gadjah Mada*, dan *Semua untuk Hindia*.

6	Khansa Tabina Khairunissa	80-an buku (2014-2015)	Belajar menulis dengan ikut klub menulis. Buku pinjam di perpustakaan milik pendiri klub menulis.
7	Aflahchintya Azka Ardhana	200-an buku (2014-2015) Dapat penghargaan di sekolah sebagai pembaca buku terbanyak dalam setahun.	Kakek-Nenek dan Ayah-Ibu berprofesi guru. Kedua orang tua suka membaca dan menulis. Banyak buku keduanya diterbitkan. Punya perpustakaan mini berisi beragam buku bacaan. Waktu malam diisi dengan bersenda gurau, membaca, menulis, dan menonton film bersama. Sekolah punya program *tolabul'ilm*, yaitu program membaca, menulis, dan bercerita. Program ini dilakukan tiap pagi sebelum memulai jam pelajaran.
8	Reufasha Zahara Suharmoko	-	Mama suka membaca, jadi menular ke Reufasha. Reufasha juga sering dibelikan buku oleh Mama. Sekolah mewajibkan siswa baca minimal satu buku tiap hari. Sekolah juga mewajibkan siswa membuat catatan harian.
9	Al Uyuna Galuh Cantika	-	Memiliki perpustakaan keluarga di dekat ruang tamu yang luas. Koleksinya lebih dari 1.000 judul buku. Ayah seorang penulis.
10	Princeyla Aughea	-	Lebih senang dan betah di rumah karena banyak buku yang bisa dibaca. Membaca di pagi hari karena sekolah siang hari. Kedua kakak penulis. Sekeluarga senang membaca, mengunjungi pameran buku, dan wisata ke toko buku. Sering dibacakan cerita oleh Mama dan kakak sulung (Sherina). Lancar membaca usia 3 tahun karena sering menyimak kakak ke-2 (Queen) belajar membaca di rumah. Inspirasi terbesar dari kedua kakak yang suka membaca dan menulis. Ghea mencontoh kegiatan apapun (membaca, menulis, menerbitkan buku) yang dilakukan kedua kakaknya.

Nb. Kolom 'Jumlah Buku dibaca' kosong bukan berarti mereka tidak membaca, melainkan tidak menuliskannya di buku antologi cerpen.

Pada tabel tersebut kita juga bisa menyimak bagaimana interaksi mereka di rumah dengan buku dan kedua orang tua. Dari sekian upaya penting yang telah disebutkan sebelumnya, keteladanan orang tua sebagai pembaca menjadi hal utama. Rata-rata anak suka membaca karena melihat kebiasaan ayah-ibunya membaca di rumah.

Helena, ibu tiga anak penulis belia yaitu Sherina Salsabila, Queen Aura, dan Princeyla Aughea, menanamkan kecintaan membaca pada anak-anaknya melalui teladan aktivitas membaca majalah, buku, dan novel di rumah. Kebiasaan itu segera menular kepada putri sulungnya, Sherina. "Semakin besar ia semakin haus membaca. Ia senangnya membaca, tidak bermain. Sebagai orang tua, senang. Tinggal dibelikan buku, dia diam. Dibelikan alat menggambar, ia senang," ujar Helena[5]. Abdiansyah, suaminya, juga melakukan hal sama.

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian pula yang dilakukan Sherina. Ia menjadi teladan membaca bagi adik-adiknya. Virus membaca segera menular kepada mereka.

Sherina Salsabila (kanan), Hamid Muhammad, dan Queen Aura, 14 November 2013. Foto: Billy

Sherina tidak berhenti sebagai inspirator membaca bagi mereka. Keterbatasan ekonomi menyulitkan ia dan kedua adiknya mengunyah beragam buku baru. Ia berpikir membuat bahan bacaan sendiri untuk mereka. "Dari situ saya mulai menulis cerpen dan puisi, lalu saya tunjukkan kepada adik dan teman-teman," katanya[6].

Kecintaan pada membaca terus dipupuk oleh keluarga ini. Toko buku menjadi lokasi wisata menyenangkan bagi mereka. "Kalau jalan ke mal, mereka pasti langsung ke toko buku. Kalau ada duit beli, kalau belum ada, akan beli," ujar Abdiansyah[7].

Strategi lain agar anak suka membaca dalam situasi menyenangkan dilakukan orang tua Intan Nurhaliza. Ayah Intan senang membelikan anaknya buku. Jika Intan akan membeli buku lagi, ia mengharuskannya menceritakan buku yang sudah dibaca. Boleh secara lisan maupun tulisan. Jika Intan akan pergi, ke museum misalnya, ia menugaskan Intan membeli dan membaca buku mengenai museum yang akan dikunjungi. "Setelah pulang, tulis pengalaman. Jadi sudah terbiasa untuk menulis," ujarnya.

Yang dilakukan ayah Intan memang tidak sekadar mendorong Intan agar suka membaca. Lebih dari itu, ia mengombinasikan kegiatan membaca dan menulis dalam satu program latihan. Di sela membaca dan menulis pun terdapat kegiatan diskusi, sebab bisa saja ayah Intan bertanya sesuatu untuk mengetahui pemahaman bacaan anaknya. Intan akhirnya tidak hanya berlatih membaca dan menulis, namun juga berbicara dan mengutarakan pikiran. Akhirnya, ia sudah bisa menulis cerita saat duduk di kelas II.

Menghadapi monster: televisi

Lonceng berbunyi nyaring di satu pagi sebuah Sekolah Dasar. Siswa-siswi keluar dari kelas masing-masing, melangkah menuju lapangan upacara lalu berbaris rapi. Di hadapan mereka berdiri sosok orang dewasa mengenakan jas biru—belakangan terlihat berkepala televisi. Lalu siswa-siswi itu bernyanyi. Begini liriknya:

Kita jadi bisa pacaran dan ciuman karena siapa?
Kita jadi tahu masalah artis cerai karena siapa?
Kita pintar dandan dibimbing teve
Kita jadi lebay dididik teve
Teve bak pelita membuat gelap gulita
Jasamu tiada….
Gimana mau maju nontonnya itu

Film pendek itu berjudul: TV, *Jasamu Tiada….* Diunggah di *Youtube* oleh akun Remotivi pada 29 Oktober 2014. Pada kolom keterangan tertera, "Stasiun televisi di Indonesia punya masalah dalam mengenali tanggung jawab sosialnya, terutama terhadap anak-anak. Padahal, anak adalah bagian dari publik yang juga punya hak atas informasi yang sehat."

Tayangan ini kemudian populer di media nasional. Diputar berulang kali di stasiun televisi swasta. Menjadi bahan perbincangan hangat dengan melibatkan praktisi pendidikan. Jelas, dari tayangan tersebut, anak-anak menggugat isi tayangan televisi. Bagi mereka, banyak hal yang disampaikan televisi adalah contoh buruk tidak ramah anak.

Tidak sulit menjawab mengapa anak-anak menjadikan televisi sebagai salah satu referensi pengetahuannya. Sejak balita mereka sudah terpapar televisi karena kedua orang tuanya meletakkan benda itu sebagai hiasan utama ruang keluarga. Mulai mata melek di pagi hari hingga terpejam di malam hari, televisi selalu menyala.

Tayangan yang disukai orang tua pun itu-itu saja: sinetron dan *infotainment* yang durasi penayangan perilaku tercela lebih dominan ketimbang perilaku baik tokoh-tokohnya. Tayangan berita, yang masih menganut rezim '*Bad News is Good News*', gencar memberitakan perilaku menyimpang orang-orang; pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, selingkuh, kawin-cerai, dll.

Anak tidak punya pilihan. Orang tua pun, sebenarnya, tak punya pilihan tayangan. Problemnya, ada kesenjangan antara anak

dan orang tua dalam memahami sebuah perilaku. Orang tua telah memiliki nilai-nilai dasar dalam menilai baik-benar. Tidak dengan anak. Secara tidak sadar, orang tua mempromosikan nilai-nilai dan perilaku buruk kepada anak melalui tayangan televisi yang ditonton tiap hari.

Kritik terhadap pengelola televisi juga sejak lama bergema. Harapan pada tayangan informatif, menghibur, sekaligus edukatif selalu disuarakan banyak pihak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku regulator tak kurang memberi teguran atas tayangan program siaran yang melanggar ketentuan.

Pada 2014, KPI menerima 40 ribu aduan masyarakat yang mengeluhkan isi siaran televisi nasional. Kemudian KPI melayangkan 149 teguran dan tiga sanksi penghentian tayangan kepada stasiun televisi. Namun teguran itu tidak membuat stasiun televisi kapok. Mereka teguh memegang 'ideologinya'.

Ideologi itu adalah *rating*. Melalui lembaga survei, sebuah program siaran dapat diketahui jumlah penontonnya. Jika suatu mata acara memiliki banyak penonton atau ber-*rating* tinggi, bisa dipastikan acara tersebut akan dipertahankan untuk terus tayang. Sebab program itu akan mendatangkan banyak iklan—pengiklan tahu *rating* suatu acara dari stasiun televisi atau lembaga survei. Banyak iklan berarti banyak pemasukan.

Acara yang memiliki *rating* tinggi, anehnya, adalah tayangan yang dipandang dangkal dan sarat unsur hiburan ketimbang edukasi. Sinema elektronik alias sinetron tidak pernah sepi dijadikan target kritik. Sinetron dinilai banyak kalangan menjual gaya hidup glamor, lepas dari realitas, dan pembodohan. Benarkah?

Saya masih ingat adegan sebuah sinetron yang tidak masuk akal. Seekor kucing berhasil mencuri ayam goreng dari piring seorang pelanggan warung nasi yang sedang lengah. Pemilik warung memergokinya lalu menuduh kucing itu sering mencuri makanan di warungnya.

Terprovokasi ucapan ibu pelayan warung, lelaki pemilik ayam goreng lalu beranjak, meninggalkan makanan yang belum habis, lalu mengejar kucing itu sambil meneriakkan sumpah serapah. Hal ini diikuti oleh beberapa pelanggan lain. Massa pengejar kucing terus bertambah di sepanjang perjalanan.

Aksi pengejaran berhenti ketika kucing itu naik sebuah pohon. Orang-orang kembali meneriakkan sumpah serapah. Dari kerumunan menyeruak seorang anak perempuan baik hati. Ia memanjat pohon itu, bermaksud melindungi sang kucing. Orang-orang marah. Mereka melempari kucing dengan benda yang ada di sekitarnya, tak peduli mengenai anak perempuan itu. Setelah puas mencaci kucing dan kenaifan si anak baik hati, orang-orang dewasa dan orang tua itu pergi.

Di dunia nyata, adakah adegan seperti itu? Orang-orang dewasa seperti apa yang mengejar kucing pencuri ayam goreng? Orang-orang macam apa yang melempari anak kecil berhati mulia? Kira-kira pesan apa yang hendak disampaikan dalam adegan tersebut?

Saya baru memahami kemunculan adegan-adegan macam itu ketika bekerja di sebuah rumah produksi (*Production House*) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tepatnya akhir 2008, saya bersama sejumlah rekan 'menuntut ilmu' pada Nucke Rahma, penulis skenario sinetron *Muslimah* dan *Ta'aruf*[8]. Dua sinetron ini tayang tiap hari (*streaping*) selama bulan Ramadan. *Rating* kedua sinetron tinggi.

Menurut Nucke, penulis skenario yang baik mampu membuat dua adegan yang bertolak belakang dalam sinetronnya. *Pertama*, adegan yang didasarkan pada nalar satu tingkat di bawah logika. *Kedua*, adegan yang didasarkan pada nalar satu tingkat di atas logika.

Adegan orang-orang mengejar kucing termasuk nalar satu tingkat di bawah logika. Maksudnya, adegan itu memang sejak awal disadari tidak mungkin terjadi.

Contoh adegan yang berdasar nalar satu tingkat di atas logika banyak terdapat di sinetron *Habibi*—saat itu sinetron ini juga memiliki *rating* tinggi. Habibi, seorang anak penghafal Alquran, selalu berhasil membuat orang jahat yang mendengar lantunan syahdunya seketika insaf dan tobat. Habibi juga fasih membacakan terjemahan ayat yang dibacanya.

Secara nalar, memang benar orang yang mendengar nasihat apalagi bersumber dari kitab suci kemungkinan besar akan insaf dan menyesali perbuatannya. Namun tentu saja hal itu memerlukan proses yang tidak instan. Adegan ini juga mengenyampingkan proses penyelesaian masalah yang didasarkan pada aktivitas realistis.

Tapi toh dua macam adegan itu terus dipakai, menghasilkan tayangan ber-*rating* tinggi. Nucke pernah menunjukkan kepada saya lembaran evaluasi tayangan sinetron yang digarapnya. Lembaran evaluasi itu dikeluarkan oleh sebuah lembaga survei.

Lembaran itu berisi grafik yang menggambarkan fluktuasi *rating* adegan sinetron per detiknya. Sambil membandingkannya dengan rekaman sinetron yang diteliti, sebuah adegan ber-*rating* tinggi atau rendah dapat diketahui terjadi di detik tertentu.

Adegan ber-*rating* tinggi artinya penonton menyukai adegan seperti itu. Diharapkan adegan-adegan tersebut digunakan pada episode berikutnya. Adegan ber-*rating* rendah, sebaliknya, tidak boleh diulangi karena membuat penonton berpindah ke tayangan lain.

Dalam sebuah *workshop*, seorang penulis skenario pernah menyampaikan kegundahannya. Sinetron, katanya, ramai-ramai dicaci sebagai media pembodohan. Sebagai pembuat naskah cerita, kritik itu menjadi beban moral yang berkecamuk dalam dirinya.

Namun ia mempertanyakan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa tayangan yang dituduh menjual mimpi, hidup glamor, dan percintaan selalu mengundang banyak penonton. Artinya, sinetron yang oleh sebagian masyarakat dicaci, sebagian yang lain justru menggemarinya. Buktinya, *rating*-nya tinggi. Iklannya meningkat

tiap episode—beberapa stasiun televisi menyikapinya dengan menambah durasi tayang.

Alih-alih dijauhi, eksistensi sinetron terus berjaya. Melibas kritik yang tidak pernah surut. Sinetron mancanegara kembali menjadi primadona. Jika dulu telenovela dari Amerika Latin menjadi raja, kini bergeser pada sinetron produksi India, Turki, dan Korea. Ratusan miliar rupiah dikeruk dari pendapatan iklan. 'Kesuksesan' itu kemudian diikuti stasiun televisi lain, termasuk sebuah televisi berita, dengan menayangkan sinetron produksi ketiga negara. Indikasi ini menunjukkan bahwa pengusaha media telah sangat yakin menilai masyarakat Indonesia menjadikan sinetron sebagai tontonan utama ketimbang tema tontonan lain.

Sayangnya, tema semua sinetron mancanegara itu tidak jauh beda dengan sinetron lokal, yaitu seputar konflik keluarga dan percintaan. Yang membuat menarik hati penonton dari beragam tayangan yang ada adalah bahwa semua sinetron sudah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia.

KPI pernah bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan sembilan perguruan tinggi di sembilan kota di Indonesia melakukan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Hasilnya, indeks kualitas program siaran 15 televisi nasional hanya 3,25, di bawah standar ketentuan KPI yaitu 4,0. Angka ini memperlihatkan bahwa secara umum kualitas program siaran televisi di bawah standar KPI.[9]

Menurut survei tersebut, program acara sinetron mendapatkan indeks kualitas sebesar 2,51, *infotainment* 2,34, dan *variety show* 2,68. Tampak bahwa kualitas ketiga program acara itu jauh di bawah standar 4 (berkualitas) yang ditetapkan KPI. Yang merisaukan, rata-rata ketiga program itu diputar pada jam tayang utama (*prime time*) ketika masyarakat banyak meluangkan waktu untuk menonton televisi.

Persoalan lain terkait televisi adalah durasi menonton

masyarakat Indonesia yang terhitung tinggi. Warga Jakarta dapat dijadikan representasi pernyataan ini.

Litbang harian *Kompas* melakukan survei tatap muka terhadap warga Jakarta pada akhir Desember 2015. Survei melibatkan 1.436 orang berusia di atas 13 tahun. Hasilnya, 4 dari 5 responden mengaku rutin menonton televisi setiap hari. Lebih dari separuhnya menonton sedikitnya dua jam per hari. Dua dari 10 responden menonton di atas 4 jam per hari. Bila di rata-rata, dalam sehari warga Jakarta menghabiskan 2,5 jam atau 10% waktu mereka di depan televisi.[10]

Program favorit yang ditonton adalah acara hiburan seperti sinetron, *infotainment*, film, dan musik. Sebanyak tiga dari empat perempuan responden merupakan penggemar utama acara ini. Sementara acara olahraga dan politik lebih disukai penonton laki-laki, yakni lebih dari 80% .

Lalu, idealnya, berapa lama waktu aman bagi anak untuk menonton televisi? *American Academy of Pediatrics* (APP), sebuah asosiasi perhimpunan dokter anak profesional di Amerika Serikat, merekomendasikan 10 jam per minggu. Itu artinya sekitar 1,5 jam per hari. Ketentuan ini berlaku bagi anak di atas 2 tahun. Menurut AAP, tidak ada acara menonton televisi bagi anak-anak di bawah 2 tahun (Trelease, 2008).

Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil riset atas 23 studi berkaitan dengan televisi terhadap 87.025 orang anak di Inggris, Jepang, Kanada, dan lima tempat di Amerika Serikat antara tahun 1963 dan 1978. Riset menunjukkan tidak adanya efek merusak terhadap pembelajaran yang diberikan akibat menonton televisi selama sepuluh jam seminggu, tetapi jika menonton lebih dari sepuluh jam, angka pelajaran mulai menurun.

Sementara Dr. Aric Sigman, psikolog Inggris, menyarankan anak berusia di bawah 3 tahun tidak menonton televisi, anak berusia 3 – 7 tahun boleh menonton televisi antara 0,5 – 1 jam per hari, anak berusia 7 – 12 tahun boleh menonton 1 jam per hari, anak berusia 12

– 15 tahun boleh menonton maksimal 1,5 jam per hari, dan remaja di atas 16 tahun boleh menonton selama 2 jam per hari[11].

Rekomendasi Menonton Televisi Dr. Aric Sigman

Usia (tahun)	Saran
< 3	Tidak menonton
3 – 7	30 menit – 1 jam per hari
7 – 12	1 jam per hari
12 – 15	1,5 jam per hari
>16	2 jam per hari

Pembatasan di atas menuntut anak dan orang tua untuk memilah dan memilih acara apa yang akan ditontonnya. Acara-acara yang semata bersifat hiburan sebaiknya dibuang. Beri ruang yang luas bagi acara yang selain menghibur, juga informatif, edukatif, dan imajinatif.

Sigman menegaskan bahwa menonton televisi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kesehatan, mengurangi kemampuan untuk fokus, autisme, dan obesitas. Menonton televisi, di mana-mana, menuntut penontonnya untuk duduk manis dan fokus menyimak.

Susan Frankenberg, dalam bukunya *Read Aloud Magic*, menilai seringnya anak menonton televisi berdampak buruk bagi prestasi akademisnya. Selama 20 tahun mengajar, ia tidak pernah menemukan murid berprestasi tinggi yang kecanduan televisi.

Frankenberg pernah berkunjung ke rumah-rumah berisi anak-anak yang kecanduan televisi. Ia sulit menarik perhatian mereka karena otak mereka menutup diri dari stimulasi dan penuh dengan tontonan yang tidak membutuhkan kegiatan berpikir dalam bentuk apapun. Ia menyamakan kondisi pikiran mereka dengan komputer dalam kondisi '*sleep*' atau '*stanby*', mesinnya hidup tapi tidak bekerja. "Anak itu duduk di sana menerima banyak rangsangan tapi tidak bisa melakukan proses mental apapun," katanya.

Situasi ini kemudian berpindah ke ruang kelas. Saat guru menyampaikan pelajaran di kelas, siswa, yang terlatih berjam-jam menonton televisi, merasa gelisah. Otaknya yang terbiasa menerima masukan tanpa membutuhkan pengeluaran apapun dipaksa untuk berpikir. Ia merasa tidak nyaman. Fokusnya buyar.

Apalagi sebelum berangkat ke sekolah, mereka menonton televisi yang acaranya sarat berita kriminal dan gosip artis. Bisa dibayangkan apa yang ada di dalam pikiran mereka ketika guru menjelaskan pelajaran agama dan budi pekerti serta Pancasila, misalnya, sementara informasi yang lebih dulu masuk ke kepala adalah kisah selingkuh, perceraian, korupsi, dan pembunuhan.

Kendati kritik terhadap keberadaan televisi senantiasa ditujukan pada kontennya, Jim Trealease, pendidik dan jurnalis, memandang lain. Menurutnya, kerusakan akademis terbesar yang dialami anak tidak disebabkan sepenuhnya oleh konten acara televisi, melainkan waktu yang dihabiskan anak-anak untuk menonton televisi. Mereka tidak melakukan aktivitas fisik seperti mengerjakan pekerjaan rumah, membuat gambar, menyalurkan hobi, menjalin persahabatan dengan teman, berkomunikasi dengan teman, dan membaca buku. Terlebih, saat menonton, pikiran menjadi pasif (Trelease, 2008).

Bagaimana dengan anak yang terbiasa menonton televisi dengan durasi lama? Jangan buru-buru distop. Memotong kebiasaan seseorang sama saja mengajaknya berkelahi. Lakukan dengan bijak: kurangi waktu menonton perlahan-lahan. Minta mereka melakukan aktivitas menarik di luar rumah. Atau ajak mereka mengobrol tentang kegiatan di sekolah bersama teman-temannya.

Hal terbaik lainnya yaitu dampingi mereka saat menonton. Ajak berdiskusi mengenai materi tontonan. Beri penjelasan seperlunya pada hal-hal yang tidak mereka mengerti. Jangan pula tampak dominan. Perlu diingat, posisikan diri sebagai teman menonton, bukan seorang penceramah apalagi komentator. Saya

tidak suka menonton televisi bersama ayah karena acara apapun yang ditonton bersama, pasti dikomentari dan komentarnya membuat suara televisi sulit terdengar. Sangat mengganggu.

Di rumah, saya mengambil posisi demikian. Karena sejak kecil terpapar televisi, hingga kini saya senang menonton televisi. Namun karena kesibukan kerja, kegemaran membaca, dan menulis, 'hobi' itu berkurang. Menonton televisi lebih kepada berita aktual. Atau film menarik. Istri saya juga demikian.

Tentu kebiasaan menonton televisi menular ke anak kami. Kami pun tidak bisa melarangnya apalagi di rumah kakek-neneknya yang tiap hari dikunjungi (karena bertetangga), televisi nonstop diputar. Kami sepakat untuk membatasi durasi menonton, membolehkannya menikmati tayangan animasi dan cerita anak yang positif, dan mendampinginya saat acara diputar.

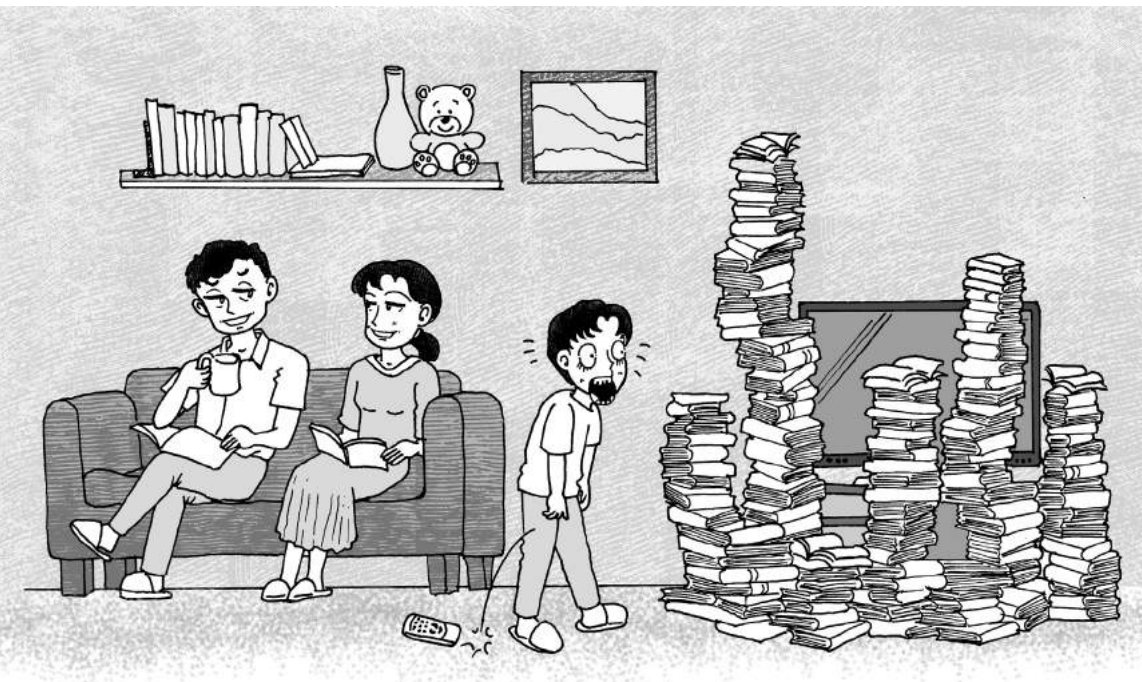

Strategi sastrawan Gol A Gong dan istrinya Tias Tatanka bisa ditiru. Anak-anak mereka doyan menonton televisi. Untuk 'membentengi' mereka dari kecanduan menonton, keduanya meletakkan rak buku di sekitar televisi (Gol A Gong dan Agus M. Irkham, 2012). Strategi 'buku mengepung televisi' efektif menarik ketertarikan mereka dari televisi kepada buku.

Cara seperti ini tentu sebuah pilihan. Abdul Aziz, teman saya, memilih cara lebih ekstrem: tidak memiliki televisi. Sejak awal menikah, ia menjalin komitmen dengan istrinya untuk tidak punya televisi.

Baginya, televisi dapat mengurangi efektivitas interaksi dalam keluarga. Membuat anak malas bergerak. Sehingga, waktu yang biasanya dipakai keluarga lain untuk menonton televisi, digunakannya untuk melakukan aktivitas bersama seperti bermain, membaca, dan kegiatan di luar ruangan.

Azis tidak antitelevisi. Ia menilai televisi ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya. "Saya kampanye untuk berpikir ulang akan keberadaan televisi," katanya. Ia mengandalkan internet dan gawai untuk mengetahui informasi dunia.

Kuncinya adalah aktivitas. Daripada membuang-buang waktu di depan televisi dengan acara sampah, lebih baik melakukan kegiatan berguna yang melibatkan pergerakan tubuh dan olah otak. Itu jauh lebih sehat dan bermanfaat. Anggap saja ini sebentuk perlawanan terhadap stasiun televisi yang terus bermasalah dalam mengenali tanggung jawab sosialnya, terutama terhadap anak-anak.

Dampak gawai

Anak-anak generasi Z (platinum), yaitu yang lahir di atas tahun 2000, adalah anak-anak yang sejak lahir terpapar oleh gawai dan perangkat elektronik lainnya. Lihatlah apa yang dilakukan para ibu generasi Y

atau *Millenial* (lahir dalam kurun 1980 – 2000) saat menyusui anaknya. Sebagian ibu menyusui anaknya sambil memegang gawai (*gadget*) berselancar di dunia maya (buka *Facebook, Twitter, Whatsapp*) atau menonton televisi. Anak yang melihat ibunya tidak fokus memberi ASI bisa saja berpikir bahwa gawai dan televisi merupakan makhluk penting kedua selain payudara ibunya.

Seiring bertambahnya usia, ia makin yakin gawai adalah makhluk terpenting di dunia. Ia melihat ayah-ibunya asyik menggerak-gerakkan tangannya di atas gawai, memperhatikan wajah mereka dalam sekian detik berganti rupa; cemberut, senyum, sedih, tertawa, cemas, bersemangat. Rasa penasarannya semakin membuncah.

Sebelum mampu berjalan, anak itu sudah piawai menggerak-gerakkan jemarinya di atas gawai layar sentuh (*touch screen*) meniru ayah-ibunya—apalagi kalau tidak main *games*? Bertambah usia, keterampilan jemari menari di layar sentuh berkejaran dengan aktivitas menulis di sekolah. Kondisi ini, ternyata, tidak menguntungkan.

Tes *National Assessment Program-Literacy and Numeracy* (NAPLAN) terhadap siswa-siswi di Australia menunjukkan kekhawatiran[12]. Para siswa dari berbagai tingkatan sekolah, setelah diteliti, mengalami kesulitan menulis dengan pensil akibat terlalu sering menggunakan layar sentuh dan *keyboard* komputer.

Apa sebabnya? Ternyata, ketidakmampuan menulis anak-anak itu disebabkan tangan mereka tidak memiliki kekuatan dan keterampilan motorik yang baik untuk memegang pensil dengan benar. "Mereka tidak menggunakan jari mereka," kata Katrina Davies, terapis okupasi pediatri. Penggunaan layar sentuh yang terlalu sering, tambahnya, dapat membuat jari dominan pada anak dan orang dewasa berubah.

Memegang pensil, mestinya, seperti menggunakan genggaman tripod dinamis. Genggaman ini menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk memegang pensil dengan ibu jari

sebagai penyokongnya. Sementara jari manis dan kelingking terselip di bagian bawah genggaman pensil.

Menurut Rhenald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia, keterampilan yang didapat melalui kegiatan latihan berulang-ulang disimpan dalam *muscle memory* (*myelin*). Myelin adalah sel pembungkus saraf yang dapat merekam, menyimpan, dan menggerakkan sel-sel saraf yang lain.

Jika dikorelasikan, memori pada jari yang terampil menari di atas layar sentuh akan sulit digeser oleh memori baru berupa keterampilan memegang pensil/pena. Setidaknya, butuh upaya ekstra agar anak bisa menulis sebagaimana mestinya.

Maka, orang tua yang bangga anaknya pintar main *games*, harus berpikir ulang. Kemungkinan besar anak tersebut akan mengalami persoalan dalam menulis. Lebih jauh, ada persoalan pada kemampuan akademisnya.

Kondisi ini juga dapat terjadi di kalangan orang dewasa. Saya mengalaminya. Dulu, saat kuliah, kebiasaan menulis dengan tangan dan mengetik di atas *keyboard* komputer dapat dikatakan seimbang. Kini, di dunia kerja, di mana kegiatan mengetik dominan dan menulis dengan tangan jarang dilakukan, keterampilan jemari saya untuk menulis di atas kertas menurun drastis. Bahkan kadang saya kesulitan membaca tulisan tangan sendiri lantaran susah terbaca.

Pentingnya kemampuan menulis dengan tangan dan kemajuan teknologi (mengetik dengan *keyboard*) tentu tak dapat dipertentangkan. Keduanya sama-sama penting. Masih banyak aktivitas dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menulis dengan tangan.

Maka solusi terbaik agar anak tidak kesulitan menulis adalah menjauhkan mereka dari akses kepada gawai. Beri batasan akses jika anak sudah telanjur sering memegang gawai dan gantilah dengan aktivitas menarik lainnya, terutama kegiatan yang melibatkan keterampilan menulis.

Membacakan buku

Gadis manis 4,5 tahun itu membolak-balik buku bergambar 24 halaman. Mulutnya komat-kamit seperti membaca tiap kalimat yang tertera di dalamnya. Ekspresi wajahnya tampak lucu tiap mengucapkan "Laut itu luas sekali" yang berjumlah tujuh kalimat.

Dia Kirana, anak saya, dan tidak sedang membaca buku. Sebab ia belum bisa membaca. Sejumlah kalimat yang diucapkannya memang sesuai dengan isi buku, tapi bagi yang sudah membaca buku berjudul *Lautkah Ini?*[13] karya Kusumadewi Yuliani dan illustrator Anna Triana, akan langsung tahu bahwa banyak ketidaksesuaian bacaan dilakukannya. Sebab, memang, yang diucapkannya berdasarkan ingatan saat saya membacakan buku itu kepadanya beberapa kali.

Kirana membaca buku. Foto: Winy

Saya berani bertaruh, kalimat yang digunakannya adalah hasil membacakan buku oleh saya, bukan istri saya. Itu kelihatan pada pengucapan "Laut itu luas sekali" dimana kata "luas" dibaca panjang "luuuas" dengan ekspresi dan gerak wajah yang selalu berbeda.

Menonton video yang direkam istri saya pada awal Agustus 2016 itu memberi saya beberapa pelajaran. *Pertama*, anak menyimak

dan menghafal apa yang disampaikan orang yang membacakan buku, termasuk intonasi dan ekspresinya. *Kedua*, akan muncul keinginan anak untuk secara mandiri membaca buku yang sudah berkali-kali disimaknya.

Saya dan istri sejak awal memancang komitmen bahwa kami akan mendekatkan buku kepada Kirana sedini mungkin. Di usia setahun, ia punya buku yang terbuat dari kain. Di usia 2 tahun, kami membelikannya buku bersampul tebal. Setahun kemudian, ia punya banyak buku yang tiba-tiba muncul di rumah saya[14].

Tujuan kami membacakan buku bukan agar ia bisa membaca, melainkan supaya ia mencintai kegiatan membaca. Bagi kami, bisa membaca di usia sebelia itu tidaklah wajib. Biarlah nanti dia mulai serius belajar membaca dan berhitung saat duduk di bangku SD kelas I.

Kami bukan tipe orang tua yang beranggapan sedini mungkin bisa membaca akan membuat anak jadi orang hebat—lebih cepat bukan berarti lebih baik. Kami menganggap sebaiknya sedini mungkin anak mencintai kegiatan membaca. Sebab, yang kami tahu, anak bisa membaca di usia balita kebanyakan bukan keinginan dirinya, melainkan kedua orang tuanya. Mereka diajari membaca dengan harapan bisa mudah masuk SD. Pragmatis sekali.

Harapan itu cukup mendasar. Dulu banyak SD yang mengadakan tes baca-tulis-hitung (calistung) untuk seleksi masuk. Siswa yang tidak lulus tes akan gugur dan orang tua harus susah payah mencari sekolah lain yang mau menerima anaknya. Sehingga saat duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), banyak orang tua 'memaksa' guru TK/PAUD untuk mengajari anak-anaknya membaca, padahal TK/PAUD dilarang mengajarkan calistung. Kondisi ini berjalan cukup lama. Meskipun kemudian aturan seleksi berdasarkan calistung sudah dihapus pemerintah, praktik itu masih diterapkan di sejumlah daerah[15].

Mendekatkan anak pada buku sedini mungkin berarti menanamkan bibit kecintaan membaca buku ke dalam diri mereka. Bibit itu akan tumbuh subur jika orang tua terus merawatnya. Salah satu caranya dengan melakukan interaksi bersama buku secara intensif. Jika anak belum bisa membaca, bacakan buku kepadanya. Setelah bisa membaca, ajak mereka berdiskusi tentang isi buku. Setelah mahir dan rajin membaca, minta mereka menganalisis dan menyimpulkan isi buku. Proses ini mengiringi beberapa fase hidup mereka yaitu anak-anak, remaja, hingga dewasa.

Variasi kegiatan ini tidak hanya berdampak pada kefasihan anak dalam memahami ilmu. Lebih dari itu, membaca dan mendiskusikan buku dapat menumbuhkan kedekatan psikologis antara anak dan orang tua.

Ketika dibacakan buku, anak merasa perhatian orang terdekatnya penuh kepadanya. Waktu seolah-olah hanya untuk dirinya. Dalam kondisi ini, mereka akan mencurahkan seluruh perhatiannya demi kegiatan yang membuatnya nyaman dan menjadi pusat perhatian. Mereka berusaha menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Kelak dua keterampilan ini sangat membantu mereka dalam memahami semua pelajaran di dalam dan luar kelas.

Lalu berapa durasi yang diperlukan untuk membacakan buku kepada anak? Susan Frankenberg, menyarankan cukup 10 menit. Setiap hari. Anda bisa melakukannya menjelang anak tidur siang atau malam hari. Atau di waktu-waktu nyaman untuk Anda berdua. Yang terpenting kegiatan ini dilakukan setiap hari. Anda bisa berkolaborasi dengan pasangan (suami/istri) jika diterpa kesibukan. Atau meminta anak sulung Anda membacakan buku kepada adiknya.

Sepuluh menit, barangkali, waktu yang pendek bagi Anda. Durasi itu jauh lebih pendek jika dibandingkan keasyikan Anda menonton televisi, berselancar di dunia maya, berdiskusi dengan teman di media sosial, atau sekadar ngobrol *ngalor-ngidul* dengan teman di kafe. Jadi, tak ada alasan sama sekali bagi Anda untuk tidak

membacakan buku kepada anak 10 menit saja setiap hari. Itu pun kalau Anda masih sayang pada anak Anda.

Tentu saja, saat membacakan buku, Anda tak perlu memasang alarm atau *timer* yang jika berbunyi kegiatan membaca harus berhenti. Sepuluh menit sekadar patokan bahwa itu waktu minimal Anda membacakan buku. Padahal, realitasnya, tanpa terasa Anda akan menghabiskan waktu lebih dari itu saat berinteraksi dengan anak. Saya sendiri pernah menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam saat membacakan buku berjudul *The Waterhole* karya Graeme Base[16]. Buku besar (*big book*) ini tak hanya menyajikan gambar binatang yang eksotis, melainkan teka-teki gambar kamuflase binatang yang membuat kami bekerja keras untuk menemukannya.

Kegiatan membacakan buku dapat membantu anak memahami tata bahasa. Menurut Jim Trealease dalam bukunya *Read-Aloud Handbook*, tata bahasa lebih mudah dipahami daripada diajarkan. Cara memahaminya mirip seperti anak terserang flu: ia terpapar terhadapnya.

Praktik berbahasa yang kita contohkan, mulai dari ungkapan kata, cara pengucapan, dan gestur tubuh yang mengiringinya memberinya pemahaman akan pengertian sebuah kata. Anak menjadi tahu bagaimana sebuah kata digunakan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Ia belajar memahami dan memaknai teks melalui cerita yang didengarnya.

Anak yang terbiasa terpapar (mendengar) teks lambat laun akan menguasai keterampilan berbicara. Era di mana komunikasi menjadi basis layanan membutuhkan orang-orang yang piawai berkomunikasi. Semakin banyak anak mendengar kosakata, semakin banyak pula perbendaharaan kata yang memenuhi memori otaknya. Kata-kata itu akan menjadi amunisinya dalam berkomunikasi melalui ucapan dan tulisan.

Lalu muncul pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk membacakan buku? Biasanya orang-orang menjawab: menjelang

tidur. Itu tidak masalah, terlebih bagi orang tua yang pagi hingga sore bekerja di luar rumah. Nilai-nilai karakter melalui cerita yang dibacakan diharapkan mengendap di alam bawah sadar anak bersama dengan waktu tidurnya. Anak melahap cerita dalam kondisi rileks sehingga tidurnya lelap.

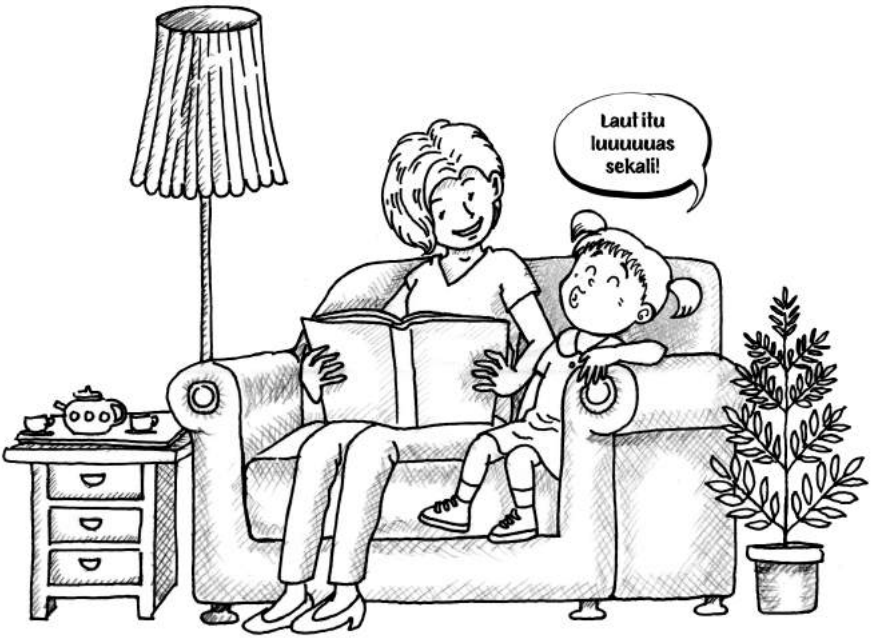

Namun, sebaiknya, waktu membacakan buku divariasikan, misalnya di siang dan malam hari usai makan, atau di kala santai. Kelebihan membacakan buku di waktu bukan menjelang tidur adalah ruang cukup longgar untuk mendiskusikan konten bacaan. Kita bisa bertanya pada anak tentang materi buku yang tidak dimengerti, atau pesan yang disampaikan oleh cerita. Jangan tanyakan hal-hal tersebut pada anak yang akan tidur sebab, bisa jadi, ia kesulitan menjawab karena otaknya beranjak istirahat atau malah sebaliknya ia merespon sehingga akhirnya tidak bisa tidur.

Saya tidak habis pikir dengan respon beberapa teman di grup *Whastapp* atas usulan saya agar menyempatkan membacakan buku kepada anak 10 menit per hari. Mereka berdalih tak punya waktu karena jam kerja yang padat: pulang sering malam, sering perjalanan dinas ke luar kota, dll.

Problemnya, saya kira, bukan pada kesibukan kerja, melainkan kemauan dan cara memulainya. Kalau mau membacakan buku kepada anak, tentu mereka akan memotong waktu membaca *Whatsapp*, membuat status di akun media sosial, menelepon teman, atau menonton televisi di rumah.

Kegiatan membacakan buku dapat dilakukan bergantian dengan pasangan. Atau, kalau memang jam kerja padat dan melelahkan, lakukan di hari libur. Tidak ada alasan bagi orang tua, sesibuk apapun pekerjaannya, tidak punya waktu untuk membacakan buku kepada anak di rumah. Tujuan kita bekerja adalah membahagiakan anak, bukan? Sehingga jangan sampai pekerjaan kita membuat anak tidak bahagia.

Dengan menjalankan program *Read Aloud* (membacakan buku dengan suara nyaring), menyediakan materi bacaan, dan memperkenalkan sikap positif dalam membaca dan menulis, menurut Susan Frankenberg, kita telah memberikan pengaruh luar biasa pada kemampuan baca dan belajar anak.

Membuat perpustakaan di rumah

Ketika buku anak-anaknya mulai banyak, berantakan, dan berada di tempat yang tidak seharusnya, Abdiansyah tahu apa yang harus dilakukan. Ia pergi ke tukang kayu pinggir jalan, memilih peti bekas pengepakan barang elektronik, dan membawa pulang dua kotak kayu jenis Jati Belanda itu.

Setiba di rumah, Abdi memodifikasi peti kayu sedemikian rupa. Peti pertama, berukuran 75 x 50 x 50 cm, digunakan untuk menyimpan buku pelajaran. Peti kedua, berukuran 125 x 50 x 75 cm, dipakai untuk menyimpan buku-buku nonteks pelajaran.

Kedua peti memiliki fungsi yang sama. Bagian dalam peti untuk menyimpan buku. Bagian luar permukaannya dijadikan sebagai meja belajar.

Kotak Kayu. Foto: Sherina

Awal mula kisah peti kayu ini saya dapat dari cerita ketiga anak Abdi yang semuanya penulis: Sherina Salsabila, Queen Aura, dan Princeyla Aughea. Saya mewawancarai mereka masing-masing dalam rentang 2012 –2015, ketika mereka menjadi peserta *Workshop* Finalis LMC tingkat SD/MI: Sherina pada 2012[17], Queen pada 2013 dan 2014, dan Princeyla pada 2015. Saat saya tanya ihwal dukungan orang tua terhadap minat menulis, ketiganya menyebut kreativitas ayah mereka membuat peti kayu. Bahkan, cerita pendek Queen berjudul *Meja-meja Cantik Papa* (2013) diambil dari pengalaman berkesannya itu[18].

Kreativitas Abdi tak sampai di situ. Ketika koleksi buku anak-anaknya semakin banyak, ia kembali ke tukang kayu pinggir jalan, membeli kayu jati Belanda, dan membuat rak buku. "Mereka ingin dibuatkan rak buku yang lebih bagus. Bukunya dipajang agar bisa dilihat kalau teman-temannya datang," kata Abdi. Dua peti tadi tidak dibuang, melainkan digunakan untuk menyimpan buku pelajaran lama.

Rak buku diletakkan di ruang tamu. Seringkali teman-teman sekolah datang ke rumah, perpustakaan mini itu selalu jadi pusat kegiatan mereka.

Pada akhirnya, memang, kemauan dan kreativitas orang tua dituntut dalam hal ini. Namun, bagi yang memiliki uang lebih, membeli rak buku di toko menjadi pilihan lain yang juga baik. Rak bukupun tak harus kelihatan mewah. Asal dapat menampung buku dan mudah diakses anak-anak, sudah cukup.

Perpustakaan menjadi bagian dari aktivitas harian anak-anak. Ia menjadi pusat kegiatan dan interaksi. Tempat anak-anak mengisi dan mengasah otaknya. Sarana berbagi pengalaman dan wawasan melalui diskusi-diskusi kecil di sela canda dan keriangan.

Perpustakaan juga dapat ditempatkan sebagai bagian dari sahabat keluarga. Orang tua dapat menjadikan perpustakaan sebagai muara bagi berbagai persoalan yang dihadapi semua anggota keluarga. Beragam pertanyaan seputar kehidupan dirujuk jawabannya kepada buku-buku di perpustakaan. Terlebih dalam proses pencarian informasi, orang tua melakukan diskusi. Pembiasaan itu akan mengarahkan anak pada pengertian bahwa segala sesuatu ada ilmunya dan perpustakaan adalah tempat bertanya.

Jika diimajinasikan, perpustakaan rumah adalah tempat kumpul orang-orang hebat; psikolog, koki, ahli gizi, ahli keuangan keluarga, guru, ilmuwan, penyair, negarawan, bahkan presiden. Bila ingin membuat makanan lezat, cari resepnya di perpustakaan. Andai bingung mengatur keuangan, tanya ahlinya di perpustakaan. Jika hati galau, sambangi psikolog di perpustakaan.

Ada hubungan dekat antara kepemilikan perpustakaan rumah dengan prestasi siswa di bidang kepenulisan. Rata-rata pemenang LMC adalah anak-anak kutu buku yang memiliki perpustakaan di rumahnya.

Joni Ariadinata, bekas tukang becak yang kini menjadi sastrawan dan juri LMC, mengungkapkan kekagumannya pada

salah seorang finalis LMC. Dalam sesi wawancara, ia bertanya pada seorang siswa berapa jumlah buku yang sudah dibaca dalam setahun terakhir. "Dia menjawab, di rumah kami, kami memiliki sebuah perpustakaan dengan jumlah mungkin antara seribu atau dua ribu buku karena saya tidak bisa menghitungnya, dan saya setahun ini sudah membaca sekitar 300 buku," ucapnya menirukan perkataan anak itu[19].

Yang membuat Joni tercengang adalah pertanyaan yang terlontar dari anak itu kemudian. Katanya, "Kalau Bapak, tahun ini berapa buku yang sudah Bapak baca?"

BAB VII
Pemerintah Daerah

Sulit membangun peradaban
tanpa budaya tulis dan baca.
(*T.S. Eliot, Penyair Inggris*)

Penerbitan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti berdampak masif. Gerakan literasi di berbagai daerah semakin meluas. Di sebagian daerah yang gerakan literasinya sudah berjalan seperti Surabaya, di mana Pemerintah Daerahnya lebih dulu aktif membuat regulasi, atmosfer kebangkitan literasi semakin terasa. Sementara daerah lain yang kebijakannya belum banyak menyentuh aspek literasi, menemukan 'cantolannya' dalam penyusunan regulasi.

Cantolan ini penting untuk pembuatan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota, Surat Edaran Dinas Pendidikan, dan pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gairah literasi jajaran Pemda kian terasa setelah Ditjen Dikdasmen mempublikasikan buku-buku panduan GLS, menyelenggarakan Workshop GLS yang diikuti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan LPMP se-Indonesia, serta Bimbingan Teknis yang ditujukan kepada pengawas, guru, dan kepala sekolah semua jenjang pendidikan.

Bentuk perhatian dan komitmen Pemda pada literasi juga ditunjukkan dengan deklarasi Provinsi/Kabupaten/Kota literasi di sana-sini. Literasi menjadi istilah seksi, menjadi nama generik bagi beragam kegiatan sosial-kemasyarakatan yang melibatkan buku dan partisipasi publik.[1]

Gejolak positif literasi ini menjadi sebab Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) memberikan penghargaan kepada Anies Baswedan sebagai *Literacy Promotor of The Year* 2016. Anies dipandang berjasa menciptakan iklim kondusif bagi gerakan masif literasi di lingkup sekolah, masyarakat, dan keluarga melalui penerbitan Permendikbud. Payung hukum itu menyuburkan tunas-tunas gerakan literasi di negeri ini.[2]

Kemendikbud kemudian menyelenggarakan Anugerah Literasi Prioritas[3]. Penghargaan ini diberikan kepada 19 kabupaten/kota mitra USAID PRIORITAS. Ke-19 daerah itu yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya (Aceh), Kabupaten Bireuen (Aceh), Kabupaten

Labuhanbatu (Sumatera Utara), Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten), Kota Cimahi (Jawa Barat), Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah), Kabupaten Demak (Jawa Tengah), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kabupaten Lumajang (Jawa Timur), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan).[4]

Anugerah Literasi Prioritas. Foto: Billy

Ke-19 kabupaten/kota tersebut dipilih dari 92 kabupaten/kota mitra USAID PRIORITAS melalui seleksi enam kriteria, yaitu (1) Program literasi dipayungi dengan Peraturan Bupati/Wali Kota atau Keputusan Bupati/Wali Kota atau Surat Edaran Bupati/Wali Kota, (2) Ada anggaran yang jelas di APBD untuk pembiayaan program literasi, (3) Ada Tim dan Koordinator yang jelas untuk mengawal pelaksanaan program, (4) Sekolah-sekolah mitra/diseminasi menerapkan kegiatan 15 menit membaca, (5) Ada program yang jelas

tentang suplai buku ke sekolah, dan (6) Ada program pelatihan guru dan sekolah dalam pengembangan literasi.

Setidaknya ada 19 indikator yang dicakup dalam program-program yang dijalankan ke-19 kabupaten/kota. Indikator-indikator itu kemudian diklasifikasi ke dalam lima komponen.[5]

Pertama, Publikasi dan Sosialisasi, terdiri atas enam indikator, yakni Publikasi, Sosialisasi dan Koordinasi (Soskor), Kampanye, Program, Monitoring dan Evaluasi, dan Deklarasi. *Kedua*, Penguatan Pelaku/Pegiat Literasi, terdiri atas lima indikator, yaitu Pelatihan, Lomba, Duta Baca, Jambore, dan Penghargaan. *Ketiga*, Penyediaan Bahan Bacaan, terdiri atas dua indikator, yaitu Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). *Keempat*, Penguatan Kelembagaan, terdiri atas empat indikator, yaitu Peraturan, Anggaran, Fasilitas, dan Tim Seleksi. *Kelima*, Pelibatan Publik, terdiri atas dua indikator, yaitu Pelibatan Publik dan Kerja sama.

Publikasi dan Soskor

Agar dikenal khalayak luas, program literasi dipublikasi melalui beragam media massa, baik cetak (koran, majalah, tabloid), elektronik (televisi, radio), maupun internet (laman berita, blog, media sosial). Pemda dapat menggandeng media lokal sebagai mitra, misalnya dengan membeli ruang halaman media cetak yang diisi tiap pekan, mengagendakan diskusi literasi (*talkshow*) rutin di radio, atau mengirim siaran pers ke redaksi media tiap menggelar kegiatan literasi.

Publikasi juga dapat dimulai dengan memberdayakan aset yang dimiliki. Di Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, 200 mobil Dinas Pendidikan ditempeli stiker kampanye membaca. Masyarakat yang dilewati mobil-mobil itu dapat membaca kampanye literasi yang tertempel di badan mobil. Selain itu, spanduk

gerakan 15 menit membaca dipasang disemua sekolah yang berdiri di Kabupaten Sidrap.

Konten publikasi tidak sekadar kebijakan tentang literasi. Publikasi dapat berupa penerbitan karya siswa, guru, dan pegiat literasi baik berbentuk fiksi maupun nonfiksi. Konten dapat diarahkan pada eksplorasi sejarah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan sejarah daerahnya. Judulnya, antara lain, *Selayang Pandang Sejarah Labuhanbatu; Bunga Rampai Labuhanbatu, Di tanah aku dibuai;* dan *Macan dari Pesisir*. Penerbitan buku bertema lokal dapat mengenalkan warga kepada asal-usul, adat istiadat, dan ajaran leluhur sehingga membuat mereka makin memahami dan mencintai daerahnya.

Penerbitan karya tulis berupa buku merupakan bentuk penghargaan literasi oleh Pemda kepada masyarakat. Tidak sekadar menerbitkan, Pemda juga mendistribusikannya ke tempat-tempat yang mudah diakses masyarakat seperti perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, Taman Bacaan Masyarakat, dan toko buku. Sosialisasi dan eksplorasi karya berupa bedah buku dan seminar juga dapat dilakukan dengan menggandeng penerbit, komunitas literasi, dan pegiat literasi. Dengan begitu, ide-ide dan pengalaman berharga seseorang dapat dipelajari dan dicontoh orang lain.

Cara lain tak kalah ampuh agar literasi terpublikasi dan berjalan masif adalah dengan mengumpulkan semua pemangku kepentingan literasi dalam sebuah musyawarah besar. Dalam acara tersebut, Pemda dapat menyosialisasikan program literasinya, mendengar tanggapan dan masukan peserta, serta menggalang komitmen bersama untuk memajukan literasi. Bisa saja musyawarah menghasilkan rekomendasi dan program kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama.

Kabupaten Bandung Barat, misalnya, pada 2015,

menyelenggarakan rembuk pegiat literasi. Rembuk ini mempertemukan para pemangku kepentingan literasi di kabupaten tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Kementerian Agama, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, USAID PRIORITAS, Perpuseru Coca-Cola Foundation, perwakilan sekolah, perwakilan perpustakaan desa, dan perwakilan TBM. Rembuk membincangkan pentingnya gerakan literasi di Kabupaten Bandung Barat.

Penguatan Pelaku Pegiat Literasi

Sumber daya pelaku dan pegiat literasi harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, dirancang agar berjalan berkesinambungan tanpa jeda. Hal ini dilakukan mengingat literasi merupakan program jangka panjang. Semangat orang-orang yang terlibat di dalamnya pun harus terus dijaga. Caranya, dengan menyelenggarakan beragam acara secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi mereka, di antaranya melalui penyelenggaraan pelatihan, lomba, dan jambore literasi. Pengakuan eksistensi pelaku/pegiat literasi dapat diwujudkan melalui pemilihan duta baca dan pemberian penghargaan.

Di Blitar, Jawa Timur, sampai akhir 2016, sebanyak 3.352 Kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah dari 455 SD/MI dan SMP/MTs mengikuti pelatihan pengembangan program budaya baca di sekolah dan pengintegrasian literasi dalam pembelajaran. Pelatihan yang didanai oleh APBD dan dana mandiri ini menggunakan modul Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah USAID PRIORITAS. Pelatihan juga diikuti dengan pendampingan sekolah untuk meningkatkan keterampilan literasi.

Untuk menguji kemampuan, memacu kreativitas, mengeksplorasi inovasi, dan meningkatkan daya saing, diperlukan

penyelenggaraan kompetisi literasi. Melalui ajang lomba literasi, antarpelaku/pegiat literasi dapat saling unjuk kemampuan dan berbagi pengalaman.

Kabupaten Sidoarjo menggelar beragam kompetisi yang melibatkan guru dan siswa, di antaranya kompetisi karya tulis guru dan siswa, lomba perpustakaan sekolah, lomba mendongeng, lomba baca cerita dan baca puisi, lomba jurnalistik cilik, dan lomba mengulas buku. Sementara di Kabupaten Tangerang digelar lomba menulis cerita rakyat, lomba bercerita dan drama, dan lomba baca puisi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Wajo menyelenggarakan lomba penerapan budaya baca tingkat Gugus-Kecamatan dan Kabupaten.

Ada baiknya, Pemda juga menyelenggarakan jambore literasi dalam kurun waktu tertentu, misalnya tiap semester atau setahun sekali. Dalam jambore, pegiat/pelaku literasi dapat berbagi pengalaman mengelola kegiatan. Agar lebih meriah, jambore dapat pula diisi dengan aneka lomba literasi.

Kabupaten Bandung Barat menggelar jambore dengan melibatkan perwakilan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan TBM. Kabupaten Sidenreng Rappang mengadakan kemah bahasa dengan peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia, diisi dengan lomba menulis, mendongeng, dan baca puisi.

Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Pengelolaan Data Elektronik Kota Cimahi mengadakan Jambore Cimahi Reading Habit (CRH). Pesertanya yaitu siswa-siswi SD/MI peserta CRH yang telah membaca dan meresume minimal 30 buku dalam satu tahun. Acara diisi dengan kegiatan *outbond* dan permainan menarik (*fun games*).

Sebagai bentuk apresiasi, Pemda dapat mengadakan pemilihan duta baca baik di tingkat sekolah maupun kabupaten sebagaimana dilakukan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Bandung Barat melakukan pemilihan duta baca di tingkat kecamatan dan melakukan pembinaan kepada siswa terpilih. Duta baca dipilih

berdasarkan kemampuan siswa membaca dan mengapresiasi buku.

Bentuk apresiasi lain yaitu dengan memberikan penghargaan kepada pelaku/pegiat literasi berprestasi. Bupati Banyuwangi memberikan penghargaan kepada duta literasi, pegiat literasi, penulis muda, dan penulis yang memiliki dedikasi. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bireun memberikan sertifikat kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tiga judul buku bacaan per bulan serta kepada sekolah yang memiliki desain sudut baca yang bagus.

Penyediaan bahan bacaan

Buku adalah "bahan bakar" literasi. Keberadaannya sangat penting dalam gerakan literasi. Pemda wajib menyediakan betapapun sulitnya. Tidak sekadar menyediakan, Pemda juga harus memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengaksesnya.

Kemudahan itu bisa dimulai dari pengelolaan Perpustakaan Daerah. Di Kota Cimahi, jam operasional layanan perpustakaan pada Senin-Jumat dimulai pukul 08.00 – 17.00 dan Sabtu 08.00 – 14.00. Tidak hanya melakukan kegiatan pinjam-kembali buku, perpustakaan juga memberikan bantuan pengembangan perpustakaan, lomba pengelolaan perpustakaan, dan bimbingan teknis kepada pengelola perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan, dan TBM.

Di Sragen, Jawa Timur, Perpustakaan Daerah (Perpusda) memberikan layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan pelatihan pengelolaan perpustakaan SD dan SMP. Pada 2016, dibangun perpustakaan sekolah di 11 titik dengan bujet Rp120 juta per perpustakaan untuk bea bangunan dan mebelair. Di tahun yang sama, Perpusda bekerja sama dengan sebuah penerbit besar mengadakan Sragen Book Fair di bulan Agustus.

Di Banjarnegara, Perpusda membuka gerai di alun-alun pada hari Ahad. Masyarakat yang menikmati suasana Hari Bebas

Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dapat sekalian membaca buku. Selain itu, Perpusda juga membuka perpustakaan keliling mengunjungi sekolah dan madrasah.

Jika Perpusda dikelola oleh Pemda, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dikelola oleh warga/pegiat literasi. Biasanya, memang, di mana-mana, ada saja individu atau kelompok masyarakat yang berinsiatif mengelola TBM—meskipun pada awal pendiriannya tidak diniatkan sebagai TBM.

Pemda mesti melihat hal itu sebagai bentuk perhatian masyarakat kepada pembangunan literasi di daerahnya. Makanya TBM yang sudah ada harus dirangkul dan digandeng, bahkan disokong pendanaan, serta dilibatkan dalam program literasi daerah.

Lumajang memiliki perkembangan menarik terkait perhatian Pemda terhadap TBM. Pada 2014, 205 rumah baca berdiri, 60 di antaranya termasuk kategori perpustakaan desa. Pada 2015, 20 desa memiliki perpustakaan. Tahun berikutnya, sepuluh perpustakaan berbasis teknologi informasi alias perpustakaan digital.

Yang unik, di tiap desa, TBM berhubungan dengan sekolah. Sekolah tidak perlu takut defisit buku. Jika perpustakaan sekolah kekurangan buku, TBM bisa meminjamkan koleksinya ke sekolah.

Perhatian Pemda terhadap TBM menginspirasi para pengelola kafe untuk menghadirkan perpustakaan di salah satu sudut ruangannya. Di satu sisi, langkah ini dapat dipandang sebagai bentuk dukungan kepada Pemda atas program literasi. Di sisi lain, untuk menarik minat pengunjung.

Di Banyuwangi, TBM didirikan di tempat-tempat wisata dan area terbuka hijau. Sebab di sanalah masyarakat bersosialisasi dan beraktivitas. Mendekatkan buku kepada masyarakat dengan menghadirkannya di tempat mereka beraktivitas, merupakan langkah strategis membangun budaya membaca.

Penyediaan bahan bacaan, ke depan, harus diikuti dengan penggusuran paradigma lawas tentang akses terhadap buku: buku

tidak hanya tersimpan di perpustakaan yang dikelola dengan pola pinjam-kembali yang ketat, melainkan dihadirkan di pusat-pusat keramaian tempat masyarakat bersosialisasi. Kehadiran negara (Pemda) direpresentasikan dengan keberadaan buku yang selalu dekat dengan aktivitas masyarakat, di manapun dan kapanpun.

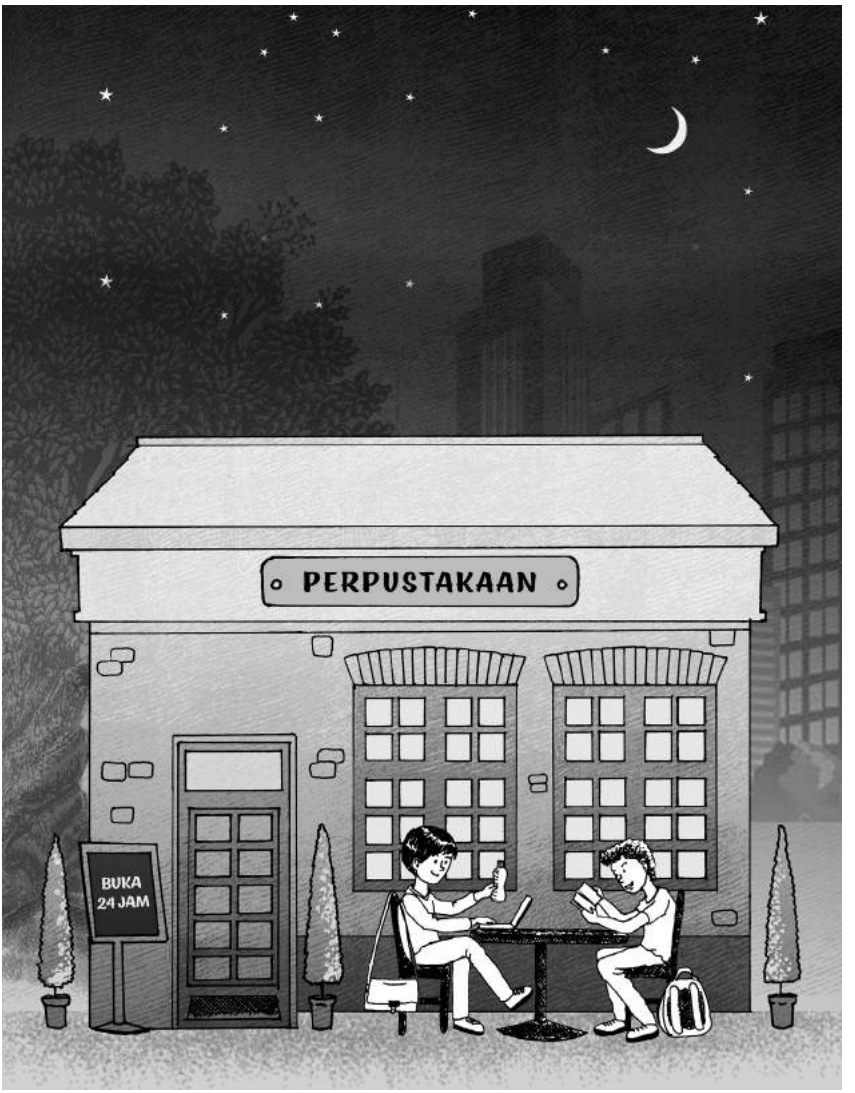

Penguatan kelembagaan

Gerakan literasi berdiri kokoh jika ditopang dengan infrastruktur yang kuat. Sebagai negara hukum, regulasi merupakan infrastruktur utama. Pemda wajib membuat peraturan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan beragam program literasi di daerahnya.

Inisiatif pertama harus diambil oleh Bupati/Wali Kota. Peraturan Bupati/Wali Kota itu kemudian dikokohkan dengan penerbitan regulasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), misalnya Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan.

Untuk menyiapkan Lumajang sebagai Kabupaten Literasi, Bupati As'at Malik menerbitkan SK Bupati tentang Tim Penyelenggara Lumajang Berliterasi. Dinas Pendidikan kemudian mengokohkannya dengan menerbitkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang tentang Pembiasaan Membaca dan Menulis Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Lumajang tertanggal. Kemudian menyusul penerbitan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang tentang Budaya Baca di lingkungan Kementerian Agama.

Hal senada dilakukan Bupati Tasikmalaya. Untuk mendukung deklarasi Kabupaten Tasikmalaya Membaca pada 19 Desember 2016, diterbitkan Instruksi Bupati Tasikmalaya tentang Gerakan Tasikmalaya Membaca. Peraturan ini lalu dilengkapi dengan pembuatan Susunan Tim Kerja Pelaksana Gerakan Tasikmalaya Membaca. Dinas Pendidikan mengeluarkan Instruksi Kadisdik yang menekankan bahwa sekolah menjadi pusat budaya membaca.

Infrastruktur signifikan berikutnya adalah anggaran. Pemda mengalokasikan dana penyelenggaraan program literasi dalam APBD.

Kabupaten Bandung Barat, tiap tahun, menambah alokasi dana untuk mendukung gerakan literasi. Pada 2014, digulirkan

bantuan dana operasional bagi perpustakaan desa sebesar Rp10 juta per perpustakaan desa. Pada 2015, dianggarkan Rp1 miliar untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi para pegiat literasi tingkat desa. Pada tahun yang sama, dana Rp235 juta digelontorkan untuk melatih duta-duta baca tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Pada 2016, anggaran untuk bimtek pegiat literasi tingkat desa meningkat menjadi Rp1,5 miliar. Untuk pelatihan budaya baca kepada para fasilitator di 16 kecamatan, dana dianggarkan sebesar Rp360 juta.

Sidenreng Rappang tidak mau kalah. Pada APBD 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk pengadaan buku bacaan. APBD juga menganggarkan biaya untuk pelatihan budaya baca bagi sekolah percontohan, pelatihan bagi pengawas untuk monitoring dan evaluasi program budaya baca, pelatihan budaya baca bagi sekolah percontohan, dan dukungan dana kepada TBM sebesar Rp50 juta.

Pemkab Sragen, pada 2016, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembelian buku nonteks pelajaran di 38 SD. Pemkab Serang pada 2015 mengalokasikan Rp2 miliar untuk pengadaan buku dan perpustakaan. Pada tahun berikutnya, 2016, dialokasikan Rp150 juta untuk pengadaan buku fiksi, referensi, dan sastra adiluhung.

Penyaluran dana bantuan hendaknya berada dalam bingkai tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dananya bisa diaudit, transparan, dan bebas korupsi.

Pengadaan buku juga sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas konten buku. Buku harus bebas dari muatan pornografi, paham ekstremisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. Maka diperlukan tim seleksi yang bertugas menyeleksi buku-buku yang didapat—dibeli maupun sumbangan donor—dan beredar di sekolah.

Biereun dapat dijadikan contoh. Pemda Biereun membentuk

Tim Literasi Kabupaten. Tugasnya yaitu menyeleksi buku yang disumbangkan oleh pihak donor.

Pemenuhan fasilitas literasi oleh Pemda diarahkan dalam rangka menguatkan kelembagaan struktural. Pemerintah Kota Cimahi, contohnya, membuat sudut baca di kantor lurah, kantor camat, dan puskesmas, selain membenahi sekolah sebagai lingkungan baca.

Sementara Pemkab Lumajang memperkuat eksistensi perpustakaan dengan beragam fasilitas seperti mobil keliling dan komputer. Perpustakaan desa dilengkapi perangkat teknologi informasi dan menjadikannya sebagai mitra sekolah dalam penyediaan buku.

Pelibatan Publik

Ciri gerakan literasi adalah pelibatan publik. Tidak bisa disebut gerakan literasi jika tidak melibatkan pemangku kepentingan literasi lainnya, seperti pegiat literasi, pengelola TBM, akademisi, LSM, dunia industri, pengawas, kepala sekolah, guru, dan siswa. Termasuk instansi birokrasi di daerah antara lain SKPD, perpustakaan daerah, Balai Bahasa, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Pemda harus merangkul dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan agar dapat berkontribusi dalam sebuah gerakan literasi bersama. Kelompok masyarakat yang bergiat mengembangkan literasi didukung, baik dengan sokongan dana maupun pemberian fasilitas lainnya.

Pemkab Bandung Barat, dalam program Kabupaten Bandung Barat Membaca (Kabaraca), menyinkronkan tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Kantor Kementerian Agama, dan Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah (KPAD). Di Kota Cimahi, Kantor Arsip Perpustakaan dan

Pengelolaan Data Elektronik (KAPPDE) menggandeng LSM dalam melaksanakan lomba mendongeng untuk melestarikan dongeng di kalangan siswa. Di Banyuwangi, Gerakan Sedekah Buku di sekolah melibatkan orang tua murid dan dunia industri (melalui tanggung jawab sosial perusahaan—*Corporate Social Responsibility*). Di Maros, distributor buku dilibatkan dalam pengadaan buku bacaan di sekolah. Di Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan menyelenggarakan program Sastrawan Masuk Sekolah (SD&SMP) untuk melestarikan dan mengembangkan cerita rakyat, cerpen, dan novel. Sedangkan di Aceh Barat Daya, para Prajurit Pendekar Baca TNI terjun ke lapangan dengan motor pintar menyambangi warga masyarakat, buah kerja sama Pemda dan Komando Distrik Militer 0110 Aceh Barat Daya.

Agar dampak gerakan literasi juga menjangkau masyarakat yang lebih luas dan spesifik, Pemda dapat menjalin kerja sama dengan beragam instansi. Pemkab Lumajang memperluas program budaya baca ke lingkungan lembaga pemasyarakatan. Tiap bulan, buku dipasok ke lapas untuk dibaca para narapidana. Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga diajak kerja sama membangun budaya baca di lingkungan desa dan rumah tangga.

Untuk menambah koleksi Perpustakaan Daerah dan perpustakaan sekolah, Pemkab Blitar menggandeng perbankan. Penerbit juga diajak kerja sama untuk menerbitkan karya siswa dan guru. Untuk melestarikan budaya lokal, Dinas Pariwisata digandeng dengan mengadakan Lomba Tutur bertema cerita rakyat.

Di Sidenreng Rappang, mobil perpustakaan keliling milik KPAD menyambangi sekolah setiap hari. Namun mobil perpustakaan itu tidak bisa menjangkau sekolah di pelosok desa. Pemkab kemudian menjalin kerja sama dengan Komando Distrik Militer 1420 melalui pengadaan motor baca. Motor baca berkeliling ke pelosok desa yang tidak terjangkau mobil perpustakaan keliling.

Gerakan Literasi di Serdang Bedagai

Di antara kabupaten lain di negeri ini, gerakan literasi di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, melaju lebih kencang. Soekirman, Bupati Sergai, menaruh perhatian besar pada gerakan literasi. Ia memandang pembangunan literasi sebagai keniscayaan jika ingin memiliki sumber daya manusia yang bagus.

Kekayaan alam Sergai yang melimpah, terutama di sektor perkebunan, membuat Soekirman khawatir: mudah mendapatkan uang, mudah pula melupakan pendidikan. Kekayaan sumber daya alam membuat warganya terlena. Mereka berpikir, jika mudah mendapatkan uang, maka sekolah bukanlah kebutuhan. Lagi pula, akhir orang bersekolah adalah mencari uang, bukan?

Itulah kenapa, Soekirman berkesimpulan, daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah berbanding lurus dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusianya (IPM). Sebaliknya, daerah dengan sumber daya alam pas-pasan, IPM-nya tinggi. Kuncinya di pendidikan.

Soekirman, Bupati Serdang Bedagai. Foto: Billy

Soekirman ingin mengubah persepsi itu. Dengung literasi yang menggema pada 2015 disambut dengan suka cita. Ia yakin,

literasi adalah jawaban atas kegelisahannya.

Agar gerakan literasi berjalan solid, sosialisasi dan koordinasi (Soskor) lebih dulu dilakukan secara masif di lingkungan internal Pemda. Soekirman menggelar Soskor dengan melibatkan DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, KPAD, serta para Camat. Soskor itu dilanjutkan dengan melibatkan perangkat desa yaitu kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Soskor dilakukan untuk membangun kesamaan persepsi dan sudut pandang dalam memahami gerakan literasi.

Setelah dirasa solid, ia menggunakan strategi 3K (Kebijakan, Kelembagaan, Kebersamaan) dalam membumikan gerakan literasi di daerahnya[6]. Kebijakan, ditempuh dengan penerbitan Peraturan Daerah yang mendukung literasi melalui Gerakan Budaya Membaca dan dukungan dana melalui APBD. Kelembagaan, berupa penguatan pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan pelaku literasi, seperti perpustakaan daerah, sekolah, dan desa, melalui program-program inovatif. Kebersamaan, dengan menyatukan para pemangku kepentingan literasi dalam beragam kegiatan bersama.

Deklarasi Gerakan Budaya Baca digelar pada 26 November 2015. Sekitar 10 ribu siswa, guru, orang tua murid, dan jajaran Pemda terlibat. Mereka berhasil memecahkan Museum Rekor Indonesia dan Dunia kategori Membaca Hening dan Menulis Resensi Buku.

Agar fondasi gerakan literasi berdiri kokoh, Soekirman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Gerakan Budaya Baca. Perda ini kemudian diikuti peraturan turunannya, yaitu Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Budaya Baca, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penunjukan Tim Pendamping Program Budaya Baca.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Edaran tentang pembuatan jurnal literasi setiap minggu di semua

sekolah. Tidak mau kalah, Kepala Kantor Kementerian Agama Sergai juga membuat Surat Edaran tentang program literasi madrasah.

Agar semua program berjalan lancar, APBD diarahkan untuk mendukung pengadaan bahan bacaan, rehabilitasi perpustakaan sekolah, dan kampanye budaya baca secara berkesinambungan tiap tahun.

Pada APBD 2016, anggaran dialokasikan untuk pengadaan buku referensi, program pengembangan budaya baca, dan pembinaan perpustakaan. Melalui APBD 2017, dianggarkan buku referensi untuk SD dan SMP serta *workshop* GLS untuk Kepala SMP.

Setelah Soskor digelar, deklarasi dilaksanakan, regulasi diterbitkan, dan dukungan dana dianggarkan melalui APBD, langkah selanjutnya yang dilakukan Soekirman adalah kampanye literasi secara masif dengan melibatkan partisipasi publik. Langkah-langkah yang ditempuh di antaranya: (1) bekerja sama dengan Komite Sekolah dan wali murid serta alumni sekolah dalam aksi sumbang buku, (2) memanfaatkan bantuan CSR dari perusahaan di sekitar sekolah dalam program sumbang buku, (3) melibatkan organisasi pemuda dan mahasiswa sebagai Duta Baca Serdang Bedagai, (4) membentuk relawan Mahasiswa Penggerak Literasi, (5) mendesain lokasi wisata pantai mangrove Sei Nipah Kecamatan Perbaungan dan Wisata Arung Jeram Ancol Kecamatan Sipispis menjadi 'Kawasan Wisata Literasi', (6) menggandeng KNPI menjadi Pemuda Penggerak Literasi, dan (7) mendorong pembentukan Forum Masyarakat Literasi Serdang Bedagai.

Kerja sama dengan instansi lain juga dilakukan, di antaranya dengan USAID PRIORITAS dalam program gerakan budaya baca, dengan penerbit dalam kegiatan lomba literasi, dan dengan KPAD dalam pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling yang rutin berkunjung ke sekolah. Penulis lokal juga diundang dalam kegiatan bedah buku.

Soekirman juga membangun fasilitas literasi. Sekolah dan madrasah dilengkapi dengan sudut baca tiap kelas, pondok baca, dan pohon baca. TBM dan perpustakaan kampung direvitalisasi. Jumlah armada mobil perpustakaan keliling pada KPAD ditambah. Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliah (MDTA), sebagai tempat kegiatan membaca Alquran bagi pelajar muslim, direvitalisasi. Perpustakaan daerah di Kecamatan Sei Rampah, Teluk Mengkudu, dan Perbaungan dilengkapi sistem otomasi yang memungkinkan masyarakat meminjam buku cukup melalui aplikasi ponsel.

Untuk membekali para warga sekolah mengenai keilmuan dan praktik baik literasi, sejumlah pelatihan digelar. Pelatihan itu menyasar Kepala SD dan SMP, pustakawan sekolah, pelajar yang berkecimpung di dunia jurnalistik, dan pembinaan kepada siswa yang berprestasi di bidang literasi. Pernah pula diselenggarakan bedah aksara Batak dengan mengundang sastrawan Saut Poltak Tambunan yang diikuti siswa SMA dan SMK—Saut mendapat penghargaan Hadiah Sastra Rancage pada 2015 untuk novelnya yang berjudul *Si Tumoing: Manggorga Ari Sogot* dan *Si Tumoing: Pasiding Holang Padimpos Holong*.

Guna memacu kreativitas, inovasi, dan interaksi antarsiswa, digelar sejumlah lomba, di antaranya lomba menulis artikel, pidato, menulis cerita pendek, membaca puisi, mendongeng, bercerita Bahasa Inggris, membaca Alquran, dan cerdas cermat.

Menyadari era ini adalah zaman di mana masyarakatnya butuh sosok teladan dan idola, Pemkab Serdang Bedagai menginisiasi pemilihan teladan literasi di beberapa tingkatan. Di tingkat sekolah, dilakukan seleksi duta baca. Biasanya duta baca dipilih berdasarkan banyaknya jumlah buku yang dibaca siswa dalam kurun waktu tertentu. Pemilihan duta baca di tingkat kabupaten juga dilakukan dengan melibatkan organisasi pemuda dan mahasiswa.

Perpustakaan juga direvitalisasi melalui penyelenggaraan beragam kegiatan literasi. Kapasitas pustakawan ditingkatkan

melalui pelatihan. Lomba-lomba literasi digelar di perpustakaan. Buku-buku bacaan diadakan melalui penganggaran dari Dinas Pendidikan maupun KPAD.

Cakupan layanan perpustakaan diperluas. Tiap hari, KPAD memberi layanan kepada sekolah/madrasah melalui pepustakaan keliling. Perpustakaan Desa dan TBM dibina dan diberi bantuan berupa buku bacaan. Perpustakaan kampung dan masjid direvitalisasi agar lebih berdaya.

Mengumpulkan para penggiat literasi dalam sebuah acara bersama juga dilakukan. Guru PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK diundang mengikuti jambore. Kegiatan di luar ruangan ini memberi semangat baru bagi gerakan literasi yang memiliki ciri melibatkan semua pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk penghargaan dan kerja sama dengan para pengelola TBM dan Perpustakaan Desa, Pemda melakukan revitalisasi keduanya melalui KPAD. TBM baru dibentuk di daerah-daerah yang belum memiliki TBM. Sekolah pun didorong untuk bekerja sama dengan TBM yang ada di sekitarnya. Dukungan Pemda kepada penggiat literasi merupakan hal esensi mengenai hubungan pemerintah-masyarakat dalam konteks gerakan literasi.

Program literasi digulirkan, mengakomodasi kreativitas dan inovasi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Program itu antara lain: (1) revitalisasi MDTA sebagai kegiatan membaca bagi siswa muslim, (2) 15 menit membaca sebelum memulai pelajaran setiap hari di seluruh sekolah/madrasah, (3) seminggu sekali presentasi hasil bacaan di sela pembelajaran di seluruh sekolah/madrasah, (4) seminggu sekali presentasi hasil tulisan di sela pembelajaran pada sekolah/madrasah mitra USAID PRIORITAS, (5) seminggu sekali menggelar kegiatan mendengar terbimbing diikuti presentasi hasil yang didengarnya di sela pembelajaran, khususnya di sekolah/madrasah mitra USAID PRIORITAS, (6) pihak sekolah/madrasah mengundang wali murid, pejabat desa/kelurahan, dan pejabat

kecamatan sebagai narasumber kegiatan literasi, (7) penerapan buku bacaan berjenjang di 176 SD/MI mitra USAID PRIORITAS, (8) arisan buku, yaitu gerakan pengumpulan uang sejumlah Rp.2000/ siswa/bulan untuk dibelikan buku-buku bacaan oleh pihak sekolah. Program dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Komite Sekolah, (9) pidato Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris siswa SMP, SMA, SMK selama 10 menit setiap Senin usai upacara bendera, (10) membaca kitab suci bagi siswa-siswi SMP, SMA, SMK setiap Jumat sebelum memulai pelajaran, dan (11) membaca Alquran (ayat-ayat pendek) bagi pelajar madrasah setiap Sabtu sebelum memulai pelajaran.

Karya yang sudah dibuat, terutama karya tulis berprestasi, dipublikasikan secara luas ke media. Ini sebagai bentuk penghargaan kepada pencapaian penggiat literasi agar mereka terus meningkatkan kualitas karyanya. Pada 2016, Dinas Pendidikan menerbitkan buku berjudul *Puisi-puisi di Hamparan Umroh Tanah Bertuah; Renungan Insan Pendidikan Serdang Bedagai.*

Prestasi masyarakat Sergai di bidang literasi ditandai dengan banyaknya kompetisi yang berhasil dimenangkan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun mancanegara. Prestasi itu di antaranya Juara 1 lomba cipta puisi tingkat provinsi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2015, juara 1 lomba cerita bergambar tingkat nasional pada FLS2N tahun 2015, dan juara 1 lomba pantun internasional di Brunei Darussalam. Penghargaan juga diterima berupa Rekor MURI untuk kategori Menulis Resensi Buku oleh Pelajar Terbanyak pada 2015.

Terkait peredaran buku di sekolah, agar kualitasnya terjaga dan terbebas dari unsur-unsur negatif, dilakukan seleksi kelayakan buku. Tim Pengembang Kurikulum dilibatkan dalam proyek ini.

Sebagai sarana evaluasi dan memperoleh masukan guna peningkatan kinerja, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah keniscayaan. Di Sergai, Dinas Pendidikan dan Kantor

Kementerian Agama aktif memonitoring pelaksanaan program budaya baca di sekolah dan madrasah. Hasil monev kemudian diolah oleh Tim Pendamping Program Budaya Baca. Tim ini yang juga menyusun indikator pencapaian program budaya baca di Sergai.

Satu hal penting yang dilakukan Soekirman dalam penggalakan budaya literasi di daerahnya adalah bahwa ia menjadi teladan literasi. Ia seorang Bupati yang menulis. Hingga awal 2017, ia telah menerbitkan delapan buku. Ia pun menerima penghargaan Hadiah Sastra Rancage 2017 untuk Sastra Batak atas cerita pendeknya yang berjudul *Parlombu-lombu* (Si Gembala Sapi).

Kolaborasi

Salah satu kunci utama keberhasilan menjalankan gerakan literasi adalah kolaborasi. Tiada literasi tanpa kolaborasi. Pemda bersama seluruh pemangku kepentingan berjalan seiring, meletakkan gerakan literasi sebagai tujuan bersama: semua yang bergabung akan dapat untung.

Di Nusa Tenggara Timur, kolaborasi itu telah berjalan. NTT adalah provinsi yang memiliki banyak daerah kategori tertinggal. Dari 21 kabupaten dan satu kota, ada 18 kabupaten yang dinyatakan tertinggal[7].

Salah satu problem daerah tertinggal adalah akses masyarakat terhadap pendidikan begitu sulit. Kondisi ini tidak meluruhkan berbagai pemangku kepentingan di NTT untuk bahu-membahu membangun gerakan literasi. Dinas Pendidikan Provinsi menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, balai bahasa, dan lembaga swadaya masyarakat—LSM asing di antaranya *Save the Children*, *Plan International*, dan *Christian Child Foundation*.

Para guru yang tergabung dalam Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (SM3T), Guru Garis Depan, dan Indonesia Mengajar juga digandeng. Menurut Minhajul Ngabidin, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NTT, kolaborasi dengan para guru muda dilakukan, selain dedikasi mereka tinggi, juga karena para guru aktif menulis dan menyebarkan pengalaman mereka kepada masyarakat luas.[8]

Minhajul menjadikan kantornya sebagai markas SM3T dan Indonesia Mengajar. Ia membentuk forum diskusi, mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membincangkan dan merumuskan pola gerakan.

Selain mendorong para guru untuk menulis dan membukukan karya, penggalangan buku dilakukan dengan menghubungi orang-

orang NTT yang ada di Pulau Jawa. Dari mereka, donasi buku digalang. Buku-buku dari Jawa yang dikirim ke NTT kemudian disortir dan didistribusikan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil.

BAB VIII

Penutup

Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.
(Ali *bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin* IV)

Dalam bukunya *Suara dari Marjin* (2017), Sofie Dewayani dan Pratiwi Retnaningdyah menyebut literasi seperti *fashion*. Ia hiruk pikuk di suatu masa dan kembali sepi ketika masa itu telah mencapai klimaksnya.

Kondisi ini semestinya tidak menjadi hantu yang ditakuti. Bahkan sebaiknya dijadikan introspeksi sejauh mana gerakan literasi pada 'suatu masa' mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi lebih literat.

Kemendikbud melalui Gerakan Literasi Nasional berupaya mengelaborasi gerakan literasi dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perubahan pola pikir dan perilaku subjek di ketiga ranah tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kinerja pemerintah. Selama ini, dalam konteks keaksaraan yang diwujudkan sekian lama pada beragam program nasional seperti wajib belajar dan pemberantasan buta aksara, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat tidak menjadi parameter keberhasilan. Program dianggap berhasil jika penyandang buta aksara berkurang drastis.

Kini, setelah 'resmi' menjadi program pemerintah, gerakan literasi memikul tanggung jawab besar tidak hanya meneruskan pengurangan penyandang buta aksara, melainkan mengusung perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat abad 21. Pola pikir yang dimaksud adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skills*) seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Sasaran perubahan tidak lagi menyempit di kalangan orang-orang yang kurang pendidikan. Orang-orang berpendidikan (mengenyam bangku sekolah) menjadi sasaran utama perubahan karena di kepala merekalah roda peradaban berputar. Pelaku kerusakan, di abad ini, bukanlah berasal dari orang-orang miskin tidak berpendidikan. Sebaliknya, penyumbang kerusakan terbesar terhadap ekosistem bumi dan kehidupan sosial-masyarakat adalah orang-orang miskin moral namun berpendidikan.

Gerakan literasi yang bercirikan pelibatan semua pemangku

kepentingan berjalan selaras dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang juga berupaya menarik keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Tripusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang selama ini tidak menemukan realisasi efektif, kini mendapat wadah yang juga perlu terus diuji efektivitasnya. Pintu sekolah dibuka lebar bagi kontribusi beragam unsur masyarakat untuk mewarnai sekolah.

Sekolah, akhirnya, menjadi sentral aktivitas di antara tripusat pendidikan itu. Sebab masyarakat dan kebanyakan keluarga Indonesia masih menyerahkan pendidikan anak-anak kepada sekolah. Sekolah masih dianggap sebagai tempat efektif dalam membentuk nilai-nilai baik dalam diri anak. Dengan demikian, beragam aktivitas dan kebijakan di sekolah sedianya berimbas pada perubahan di lingkup keluarga dan masyarakat.

Interaksi ketiga lingkup itu di sekolah harus membawa perubahan yang riil terhadap pola pikir dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Melalui gerakan literasi di sekolah, misalnya, bagaimana budaya membaca juga merembet ke keluarga siswa dan masyarakat di sekitar sekolah.

Momen interaksi sekolah, keluarga, dan masyarakat juga mesti dimanfaatkan untuk menyelesaikan problem dilematis yang selalu dihadapi anak: perbedaan nilai antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebab, patut diakui, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah mengalami kesenjangan dengan realitas yang terjadi di keluarga dan masyarakat. Karakter yang hendak ditanamkan dalam diri anak haruslah selaras di antara ketiganya. Dengan demikian, anak dapat lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai baik ke dalam dirinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Memasuki tahun ke-3 setelah penerbitan Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti pada 2015, geliat literasi sudah terasa di mana-mana. Pencanangan kabupaten/kota literasi oleh kepala daerah, yang dikhawatirkan sekadar seremonial belaka, lambat laun menunjukkan realita positif ketika kegiatan komunitas literasi

di masyarakat didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Buku-buku karya siswa dan guru serta kolaborasi keduanya bermunculan, seperti novel, kumpulan puisi, cerpen, dan esai, memenuhi stan pameran literasi yang diselenggarakan sekolah dan Pemda.

Di internal Satgas GLS sendiri, kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun tim, menunjukkan realitas yang menggembirakan. Forum-forum diskusi literasi dipadati pengunjung.

Di Bandung, *workshop* literasi yang rutin diadakan Sofie Dewayani, selalu menyisakan peserta dalam daftar tunggu. Di Purwakarta, pada akhir Agustus 2017, peserta pelatihan *read aloud* yang diisi oleh Roosie Setiawan mencapai 377 orang dari target 100 guru. Di Jakarta, dua acara Sarasehan Literasi Sekolah (SLS) yang diadakan di Perpustakaan Kemendikbud, pesertanya selalu membeludak.[1] Konsep SLS berupa perayaan literasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan kolaboratif menghasilkan banjir permintaan penyelenggaraan di tempat-tempat luar Jakarta dan luar Jawa.

Di luar kegembiraan tersebut, masih banyak yang perlu dilakukan agar perubahan substansial berdampak kepada siswa, guru, dan kegiatan pembelajaran di kelas. Di lapangan, misalnya, masih ada sekolah rujukan yang hanya menempel bahan kaya teks dan membuat sudut baca kelas seadanya untuk sekadar memenuhi daftar periksa indikator sekolah literasi. Atau penuhnya jurnal membaca siswa menjadi kebanggaan tanpa diselingi kegiatan diskusi hasil bacaan. Ada pula guru yang mencukupkan diri sebagai teladan membaca namun melupakan inovasi dalam pembelajaran di kelas.

Literasi boleh saja seperti *fashion* yang timbul-tenggelam di tengah dinamika masyarakat yang senantiasa berubah, tetapi gerakan literasi harus terus berdenyut dan dirasakan oleh semakin banyak orang. Ia merasuk dalam setiap pola pikir dan perilaku warga sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan satuan pendidikan.*

Catatan Kaki

BAB I

[1] Dua kisah ini dikutip dari tayangan program televisi *Kick Andy* yang ditayangkan Metro TV pada pertengahan 2008. Orang-orang itu berubah karena terinspirasi pada kisah sejumlah tokoh di dalam novel *Laskar Pelangi* karya Andrea Hirata. Novel *Laskar Pelangi* cetakan I terbit pada September 2005.

[2] Ungkapan Paulo Freire ini dikutip dalam buku berjudul *We Make The Road by Walking* terbitan Transbook, Jakarta 2011. Prof. H.A.R. Tilaar, dalam kata pengantarnya di buku ini, mengaku terkejut dengan adanya buku ini yang merangkum hasil diskusi antara Paulo Freire, yang sudah dikenal global, dengan Myles Horton, pendidik asal Amerika Serikat, yang namanya tidak cukup dikenal di lingkungan akademisi Amerika Serikat. Padahal gerakan pedagogik Horton, tulis Tilaar, telah lebih 30 tahun mendahului gerakan Freire di Brazil.

[3] Pembuatan film *Ayat-Ayat Cinta* menelan biaya Rp 10 miliar. Dalam empat bulan, tiket terjual Rp 48 miliar. Selama empat pekan film diputar, film ditonton 2 juta orang. Sutradara Hanung Bramantyo membuat film *Ayat-ayat Cinta* selama 1,5 tahun. MD Pictures menggandakan pita film sebanyak 100 kopi, mengalahkan film kelas utama Holywood yang digandakan 65-70 kopi, dan film nasional 20-30 kopi.

[4] Mengenai survei Unesco, ada cerita lucu dari seorang mahasiswi di Tasikmalaya. Mahasiswi ini mengikuti lomba karya tulis ilmiah di kampusnya dan meraih juara 2. Dalam tulisan itu, saat membahas minat baca masyarakat Indonesia, ia mengutip survei Unesco 2012 dari sebuah harian nasional. Kebanyakan tulisan di internet tentang minat baca juga menggunakan survei Unesco dengan sumber dari harian itu. Saya bertanya apakah dia punya dokumen Unesco 2012. Katanya, ia tidak punya. Ia lalu bercerita, gara-gara tidak punya dokumen itu, dosennya menyebut karya ilmiahnya belum ilmiah. Sang dosen menganggap data Unesco yang dijadikan referensi penulisan merendahkan Indonesia. Ia mengaku dimarahi habis-habisan oleh sang dosen. Hingga tulisan ini dibuat, saya sendiri belum berhasil mendapatkan dokumen Unesco itu, baik dari laman Unesco sendiri, mencari melalui *Google*, bertanya kepada akademisi dan pegiat literasi, serta pejabat di Perpustakaan Nasional.

BAB II

[1] Sambutan pada Diskusi Terpumpun Gerakan Literasi Sekolah di Jakarta, 1 – 3 Februari 2016. Inilah cikal-bakal Hamid mendorong lahirnya Gerakan Literasi Sekolah di Ditjen Dikdasmen. Ia mengawal proses terbentuknya GLS dengan selalu menghadiri berbagai pertemuan Satgas GLS yang dibentuknya.

[2] Sebelumnya, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 banyak dialokasikan untuk membangun unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil. Imbasnya, angka partisipasi sekolah dasar pada akhir 1980 mencapai hampir 100%.

[3] Unit kerja di lingkungan Ditjen Dikdasmen yaitu Sekretariat Ditjen, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (PSD), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK), dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK).

[4] Draf ini dikawal oleh beberapa personel di luar Direktorat PSD yaitu Sofie Dewayani (Yayasan Litara), Roosie Setiawan (Reading Bugs Indonesia), dan Wien Muldian (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud). Belakangan ketiganya bergabung dalam Satgas GLS. Draf ini sangat terasa akademis.
Pertemuan ini menyepakati bahwa panduan umum dibuat oleh Sekretariat Ditjen (Setditjen) dan panduan khusus dibuat oleh perwakilan tiap direktorat. Dari Setditjen, saya ditugaskan membuat panduan umum. Berdasarkan masukan dari pimpinan agar panduan umum dibuat dengan bahasa yang ringan, saya mengelaborasi draf literasi SD yang penuh teori akademis hingga menjadi lebih mudah dicerna. Satu hal baru yang saya masukkan dalam draf ini, yang tidak ada dalam draf SD, adalah sekolah mewajibkan siswa membaca buku sastra. Saya ingat inilah yang diperjuangkan sastrawan Taufiq Ismail sejak lama. Meski kemudian panduan umum mengalami banyak polesan (bahasa saya khas jurnalistik) dari para akademisi, saya bersyukur pewajiban membaca buku sastra kepada siswa tetap ada di buku panduan umum.

[5] Sekolah yang dikunjungi yaitu SD Negeri Bubutan IV Surabaya, SMP Negeri 1 Surabaya, SMA Negeri 5 Surabaya, SMK Negeri 1 Surabaya, dan SLB Galuh Handayani Surabaya.

[6] Hamid sempat berguyon bahwa ia "kabur" dari Jakarta setelah mendampingi Mendikbud Anies Baswedan menjalankan kegiatan

di Senayan. Hal ini menunjukkan keseriusan Hamid mengawal program literasi sekolah yang dirintisnya. Sebelum sambutan, diperdengarkan lantunan puisi oleh Nurunnisa Sholeha, siswi SMA Negeri 5 Surabaya. Penampilan seni di acara formal Kementerian sangat jarang dilakukan.

Narasumber acara ini beragam, yaitu dari Perpustakaan Nasional diwakili Nurcahyo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhwan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Emi Emilia, Staf Khusus Mendikbud Ahmad Rizali, dan Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Pangesti Wiedarti. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma bertindak sebagai moderator.

[7] Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku I dan II diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, pada 10 – 12 Desember 2015 dan 20 – 22 Juni 2016. Sedangkan Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku III – V digelar di Jakarta pada 1 – 3 Agustus 2016, 25 – 27 Agustus 2016, dan 18 – 19 Januari 2017. Partisipan yang hadir berasal dari kalangan internal Kemendikbud (Ditjen Dikdasmen, Ditjen PAUD dan Dikmas, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Puskurbuk, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan) dan eksternal Kemendikbud (Penerbit, Ikapi, Perpustakaan Nasional, akademisi, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pegiat literasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat). Tiap acara menghasilkan draf Penjenjangan Buku. Pada Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku V, Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy membuka acara. Acara ditutup oleh Kepala Puskurbuk Dr. Awaludin Tjalla sekaligus menerima hasil draf Penjenjangan Buku untuk ditindaklanjuti.

[8] Narasumber DPPB I yaitu Dr. Widyastuti Purbani, M.A. (Universitas Negeri Yogyakarta), Dr. Riama Maslan Sihombing, M.Sn. (Institut Teknologi Bandung), Pangesti Wiedarti, M.Appl., Ph.D (Universitas Negeri Yogyakarta), Dr. Bambang Wasito Adi, MSc (Universitas Negeri Sebelas Maret), Nung Atasana (Ikapi), Dr. Rahmat Hidayat (Universitas Gadjah Mada), Dr. Maman Suryaman, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta), Fourgelina (Yayasan Literasi Anak Indonesia). Fourgelina menjelaskan sistem penjenjangan buku yang dikembangkan YLAI.

[9] Belakangan, pilihan ini memang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada akhir 2016. Pada DPPB V di Jakarta, Dosen UIN Sunan Ampel Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah menyampaikan, dari tiga variabel yang diteliti (usia, jenjang pendidikan, kompetensi membaca), kompetensi membaca diyakini sebagai dasar yang tepat untuk menjenjangkan buku.

[10] Narasumber DPPB II yakni Dr. Felicia N. Utorodewo (Universitas Indonesia), Dr. Fairul Zabadi (Badan Bahasa), Supriyatno, M.A., Sri Hidayati, M.Si., dan Pangesti Wiedarti, M.Appl., Ph.D (Universitas Negeri Yogyakarta). Fairul Zabadi menjelaskan penjenjangan buku bahan bacaan cerita rakyat yang digunakan Badan Bahasa. Supriyatno menyampaikan prosedur penilaian buku nonteks pelajaran yang diterapkan Puskurbuk. Sri Hidayati menjelaskan penjenjangan dalam literasi dan kurikulum.

[11] Narasumber dari Puskurbuk yaitu Supriyatno, Kepala Bidang Perbukuan, dan Sri Hidayati, Kepala Bidang Kurikulum. Ada pertanyaan peserta yang mengemuka, bagaimana dengan buku yang laris di pasaran seperti *Laskar Pelangi*, apakah boleh beredar di sekolah? Supriyatno menjelaskan, ia sempat menanyakan hal itu

pula kepada Mendikbud Anies Baswedan. Kata Anies, kalau tidak memenuhi ketentuan Permendikbud Nomor 8/2016 itu, buku selaris apapun di pasaran tetap dilarang masuk sekolah. Sebab tak semua buku laris bagus dibaca oleh peserta didik.

[12] Narasumber DPPB III adalah Prof. Nizam (Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud), Prof. Zaki Su'ud (Badan Standar Nasional Pendidikan), Pangesti Wiedarti, M.Appl., Ph.D. (Universitas Negeri Yogyakarta), Prof. Kisyani (Universitas Negeri Surabaya), Sofie Dewayani, Ph.D. (Institut Teknologi Bandung), Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D. (Universitas Negeri Surabaya), Wien Muldian, S.S. (Wakil Ketua Satuan Tugas GLS), Fourgelina (Yayasan Literasi Anak Indonesia), dan Amanda Casimira (Provisi Edukasi). Zaki Su'ud menjelaskan mekanisme penilaian buku teks pelajaran yang dilakukan BSNP. Di akhir sesi, seluruh peserta yang berasal dari unsur Puskurbuk, Badan Bahasa, Perpustakaan Nasional, pengurus Ikapi, penerbit, dan penulis diberi kesempatan mengungkapkan pandangannya terhadap sistem Penjenjangan Buku dan dunia perbukuan Indonesia.

[13] Narasumber DPPB V yaitu Prof. Nizam (Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud), Prof. Kisyani (Universitas Negeri Surabaya), Dr. Evi Fatimatur Rusydyah (UIN Sunan Ampel Surabaya), Bambang Trim (Ikapi), dan Lucya Andam Dewi (Ikapi). Kisyani, yang 3 bulan sebelumnya berkunjung ke Inggris, menjelaskan sistem penjenjangan buku yang digunakan di Inggris. Evi menjelaskan sistem penjenjangan buku yang dibuat oleh tim peneliti UIN Sunan Ampel Surabaya.

[14] Tiga uji publik digelar di Jakarta dalam waktu berdekatan. *Pertama*, 1 – 3 Februari 2016, melibatkan perwakilan LPMP Banten, LPMP DKI Jakarta, dan LPMP Jawa Barat. *Kedua*, 5 Februari 2016,

melibatkan sejumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kepala SMAN 5 Surabaya turut hadir. *Ketiga*, 15 Februari 2016, melibatkan guru-guru dari sejumlah daerah. Dua acara pertama diselenggarakan oleh Ditjen Dikdasmen, turut dihadiri Hamid Muhammad. Acara terakhir digelar Staf Khusus Mendikbud Bidang Pendidikan Ahmad Rizali.

[15] Pada pertengahan 2016, terbit buku *Manual Pendukung Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah; untuk Jenjang SMP*. Buku ini menjabarkan secara praktis langkah-langkah pelaksanaan GLS di sekolah. Walaupun ditujukan untuk jenjang SMP, satuan pendidikan lain juga dapat menggunakannya dengan sedikit penyesuaian. Dalam sejumlah kesempatan rapat, Wien Muldian, Wakil Ketua Satgas GLS, menyampaikan bahwa kelak masyarakat dan sekolah didorong untuk membuat sendiri buku-buku manual yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungannya. Pembuatan buku manual melibatkan guru, pegiat literasi, dan unsur lainnya sehingga semua merasa terlibat atas program yang direncanakan bersama. Kemendikbud sekadar membuat panduan yang bersifat umum dan garis besar program.

[16] Keragaman ini diawali dari pelibatan sejumlah individu dalam pembuatan Panduan GLS dan Desain Induk GLS. Sofie Dewayani, Ph.D. (Ketua Yayasan Litara Bandung), Roosie Setiawan (Pendiri Reading Bugs Indonesia), dan Wien Muldian (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud) membantu Direktorat Pembinaan SD menyusun panduan SD. Prof. Kisyani dan Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D., dua dosen dari Universitas Negeri Surabaya, membantu Direktorat Pembinaan SMP menyusun panduan SMP. Sementara Pangesti Wiedarti, M.Appl., Ph.D., (dosen Universitas Negeri Yogyakarta) membantu menyusun Desain Induk dan menyunting semua panduan direktorat. Perwakilan tiap direktorat,

termasuk Sekretariat Ditjen, terdiri dari empat orang berlatar belakang staf, pejabat eselon IV, dan pejabat eselon III.

[17] Selasa malam, 26 Januari 2016, bersama seorang teman, saya bergerilya mencetak *dummy* panduan GLS di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tepat tengah malam, Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad menelepon saya, memastikan semua *dummy* panduan selesai. Dari semua panduan, hanya Panduan GLS SMP yang pengerjaannya, atas keinginan Satgas GLS SMP, dikerjakan pihak lain. Hamid menginstruksikan agar saya juga mencetak panduan SMP, setidaknya sebagai dokumen cadangan (*back up*). Saya kembali ke kantor Gedung E lantai 5 Senayan, mengambil fail dan menyempurnakan desain, kemudian meluncur ke percetakan di kawasan Gandaria. Instruksi Hamid benar. Besoknya, Panduan SMP yang dibuat pihak lain mengalami kesalahan teknis fatal. Panduan SMP yang saya cetak akhirnya terpakai.

[18] Angkatan I digelar di Yogyakarta, (28 – 30 April 2016), angkatan II di Bekasi (12 – 14 Mei 2016), angkatan III di Yogyakarta (23 – 25 Mei 2016), angkatan IV di Tangerang Selatan (26 – 28 Mei 2016), dan angkatan V di Bandung (29 – 31 Mei 2016).

[19] Pada Workshop GLS angkatan I, narasumber eksternal Kemendikbud yaitu Ikhwan, Wakil Kepala SMA Negeri 3 Yogyakarta, dan Sigit Priyo Sembodo, M.M., Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Narasumber *Workshop* GLS angkatan II yaitu Een Rohaeni, Wakil Kepala SMKN 13 Bandung; Tini Sugiartini, guru SMKN 13 Bandung; dan Hartoyo, M.Pd., Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Narasumber *Workshop* GLS angkatan III yakni Sri Maryati, Kepala SD Negeri Purworejo Kaliurang, D.I. Yogyakarta, dan Abram Badu, Kepala Dinas Pendidikan Kota

Gorontalo. Narasumber *Workshop* GLS angkatan IV adalah Tri Yoseph Pamadi, Kepala SMPLB Pangudi Luhur Jakarta, dan Minhajul Ngabidin, M.Si., Kepala LPMP Nusa Tenggara Timur. Narasumber *Workshop* GLS angkatan V ialah Siti Sa'ariah Kamila, Wakil Kepala SMPN 1 Margahayu Kabupaten Bandung, dan Khairizal, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Riau.

[20] Rapat Koordinasi dan Sinergi mengundang sejumlah rektor dari perguruan tinggi yang sebelumnya telah menyelenggarakan dan mendukung kegiatan literasi. Diundang pula Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perhubungan; Kementerian Agama; Kementerian Keuangan; dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Transmigrasi. Kementerian yang disebut terakhir diharapkan dapat membantu rehabilitasi sekolah dan pembangunan Ruang Kelas Baru dengan mengedepankan sekolah sebagai lingkungan kaya literasi.

[21] Perwakilan Kemendagri yang datang dalam rapat menunjukkan antusiasme. Katanya, Kemendagri selalu berusaha mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Caranya, dengan memberikan penghargaan atas prestasi di bidang tertentu. Adipura merupakan salah satu penghargaan Pemerintah yang kemudian mendorong Pemda mengalokasikan APBD, membuat regulasi, dan membangun infrastruktur agar wilayahnya terjaga kebersihannya. Anugerah Adiliterasi diharapkan mampu mendorong Pemda melakukan ketiga hal di atas dalam rangka mendukung gerakan literasi di daerah.

[22] Pada Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, komponen pembiayaan untuk pengembangan perpustakaan hanya menyebut

pembelian buku teks pelajaran. Permendikbud ini terbit pada 11 Desember 2014 sebelum hadirnya kebijakan tentang literasi sekolah (didasarkan pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang terbit pada 11 Juli 2015). Komponen pembiayaan untuk pengembangan perpustakaan dalam Permendikbud No. 161 Tahun 2014 yaitu: (1) Buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru, (2) Langganan publikasi berkala, (3) Akses informasi *online*, (4) Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan, (5) Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan, (6) Pengembangan database perpustakaan, (7) Pemeliharaan perabot perpustakaan, (8) Pemeliharaan dan pembelian AC. Sedangkan pada Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (terbit 31 Desember 2015), yang berisi Juknis BOS Tahun Anggaran 2016, komponen pembiayaan untuk pengembangan perpustakaan bertambah dua jenis: (1) Buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar sesuai dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 dan (2) Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik *offline* maupun *online*. Sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasi satuan pendidikan.

[23] Rincian tentang buku pengayaan dan buku referensi lebih maju disebut dalam Peraturan Dirjen Dikdas Nomor 144/C/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2015. Pada lampiran II Perdirjen yang terbit pada 31 Maret 2015 itu dirinci tentang ketentuan pembelian buku pengayaan dan buku referensi, yaitu (1) buku yang dibeli adalah buku baru (minimal cetakan tahun 2014), (2) pengadaan buku pengayaan minimal 840 judul, buku referensi 10 judul, dan

buku panduan pendidikan 12 judul, (3) buku bukanlah buku teks pelajaran, tidak dilengkapi dengan evaluasi, tidak serial berdasarkan tingkatan kelas, terkait dengan sebagian atau salah satu Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar, dapat dimanfaatkan pembaca lintas jenjang pendidikan, cocok sebagai bahan pengayaan, dan rujukan. Buku yang dapat dibeli adalah buku yang telah lulus penilaian dari Puskurbuk antara tahun 2008 s.d. 2014, Badan Bahasa untuk Kamus Bahasa Indonesia, Kemenag antara tahun 2008 s.d. 2014 untuk buku pengayaan yang materinya terkait dengan pendidikan agama. Ketentuan ini diikuti oleh Perdirjen Dikdasmen Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang terbit pada 25 Januari 2016.

BAB III

[1] Conrad William Watson, Professor School of Business and Management Institut Teknologi Bandung dan Profesor (Emeritus) School of Anthropology and Conservation, University of Kent United Kingdom, menulis opini di harian *Kompas* bertajuk 'Cerita Fiksi dan Pendidikan Karakter' edisi Rabu, 12 Oktober 2016. Untuk menjelaskan pengaruh cerita fiksi pada manusia dari zaman purba hingga sekarang, ia mengutip penelitian Robin Dunbar, guru besar antropologi-biologi di Universitas Oxford Inggris.

[2] Seperti diceritakan oleh Rokhani Cahyaning Pratiwi, guru SMA Negeri 1 Balen Bojonegoro, Jawa Timur, di laman Ditjen Dikdasmen Kemendikbud (dikdasmen.kemdikbud.go.id). Diunggah pada 11 Juli 2016. Keputusan ini diambil setelah para guru mengevaluasi pelaksanaan program 15 menit membaca yang dianggap tidak maksimal. Sebagian guru yang mengajar di jam pertama juga kecewa

sebagian waktunya dipotong untuk kegiatan 15 menit membaca.

[3] Infografis Gerakan Literasi Sekolah yang dipublikasikan oleh Satgas GLS Kemendikbud pada 2016 menyebutkan empat cara membaca. Namun guru dapat berkreasi dengan mengelaborasi keempat cara membaca tersebut atau menerapkan metode lain sesuai kebutuhan dan situasi kelas, misalnya dengan menggunakan alat musik atau bermain teater. Guru harus paham bahwa semua metode membaca diplih dengan tujuan agar siswa nyaman belajar. Cara membaca merupakan sarana untuk membawa suasana menyenangkan dalam diri siswa sebelum memasuki pembelajaran inti. Uraian selanjutnya mengenai empat cara membaca diambil dari Infografis GLS yang dipublikasikan pada 2016.

[4] Sri Maryati menceritakan pengalamannya menerapkan kegiatan literasi di sekolahnya pada saat menjadi narasumber dalam *Workshop* Gerakan Literasi Sekolah Angkatan III di Yogyakarta, Selasa, 24 Mei 2016.

[5] Saat berbincang dengannya di sela sebuah pelatihan bagi guru bahasa dan sastra Indonesia di Banjarmasin pada awal Oktober 2016, saya mengusulkan padanya agar tulisan siswa dikumpulkan dan dibukukan. Karya yang dibukukan dan dibaca banyak orang akan menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk terus menulis.

BAB IV

[1] Dikutip dari buku berjudul *Agar Anak Anda Tertular "Virus" Membaca* karya Paul Jennings, 2006. Judul asli buku yang diterjemahkan oleh penulis buku anak Ary Nilandari ini adalah *The Reading Bug and How You Can Help Your Child to Catch It*. Hernowo, dalam kata pengantar buku ini, menjelaskan kenapa ia memilih menggunakan

kata "virus" ketimbang "kutu buku". Katanya, istilah "kutu buku" telanjur dimaknai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dingin dan tidak gaul. Penggunaan istilah "virus" dapat menarik orang tua dan guru untuk menularkan semangat membaca kepada anak-anak.

[2] Disampaikan dalam *Workshop* Pemaparan Hasil Evaluasi Paruh Waktu (*Midline Study*) Program Penguatan Literasi Kelas Awal Sekolah Dasar di Wilayah Pinggiran dan Terpencil di Tanah Papua. Acara digelar di Hotel Atlet Century Park Jakarta, 13 Juli 2017. Disimpulkan pula bahwa kelas yang memajang hasil karya siswa dan bahan ajar juga memiliki siswa dengan kemampuan membaca yang lebih baik. Program ini mengambil sampel di sejumlah sekolah yang berada di enam kabupaten di Papua dan Papua Barat yaitu Biak, Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Manokwari, dan Sorong.

[3] Pada 27 Januari 2017, di stan pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Depok, Jawa Barat, saya bertemu dengan Kiswanti. Ia masih ingat pertemuannya dengan Rusmaidah. Ia berbagi pengalaman dan ide terkait pengembangan literasi di sekolah.

[4] Pernyataan ini dikutip dari paparan Widyastuti Soerojo, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), berjudul "Denormalisasi Industri Rokok: Pendekatan Pencegahan Epidemi Tembakau di Indonesia" pada Simposium Denormalisasi Industri Rokok dalam rangkaian acara Kongres Nasional IAKMI XIII di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3-5 November 2016. Paparannya juga memuat pengakuan industri rokok multinasional dalam dokumen internalnya, yaitu (1) "Saya yakin apa yang kita jual adalah nikotin". [Philip Morris Memo, 1980], (2) "Sangat sedikit konsumen yang sadar efek nikotin, yaitu: sifatnya yang adiktif dan bahwa

nikotin adalah racun." [Brown & Williamson memo by H.D Steele, 1978], (3) Mengapa orang merokok? "...agar tenang, karena rasanya nikmat, untuk menyibukkan tangan, tetapi alasan utama orang terus merokok adalah mereka sulit untuk berhenti." [Philip Morris, internal presentation, 1984].

[5] Secara spesifik, berdasarkan rilis *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region* edisi ke-3 (2016), 10% perokok dunia atau 122,4 juta orang dewasa berada di Asia Tenggara, di mana setengahnya tinggal di Indonesia. Dari angka itu, perokok Indonesia kebanyakan remaja berusia 10-19 tahun.

Pencapaian "prestasi" tersebut dapat dirunut sepanjang 18 tahun terakhir. Perokok baru berusia 10-14 tahun hampir meningkat selama 18 tahun (1995-2013). Perokok baru berusia 15-19 tahun meningkat 13,6% pada 2010-2013. Jumlah total perokok baru berusia antara 10-19 tahun adalah 16,4 juta per tahun, atau 45.000 perokok remaja di bawah 19 tahun per hari.

[6] Yang memilukan dari video ini adalah pengungkapan kisah bocah yang dikenal sebagai bayi perokok bernama Aldi Rizal. Video bocah 2 tahun itu viral pada 2010 dan mencengangkan warga dunia. Aldi tinggal di sebuah desa nelayan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat mengandung, ibu Aldi mengaku merokok setengah bungkus per hari. Di usia 18 bulan, Aldi diberi rokok oleh ayahnya dan terus merokok sampai ketagihan: kalau tidak diberi rokok, Aldi akan sangat marah dan membenturkan kepalanya ke dinding, merasa pusing dan sakit bila belum mengisap rokok.

[7] Peringatan bahaya merokok tertera pada kemasan rokok. Sampai 1996, tertera: "Peringatan Pemerintah: Merokok Dapat Merugikan Kesehatan". Pada 1996 – 1999: "Peringatan Pemerintah: Merokok Dapat Berbahaya Bagi Kesehatan". Pada 1999 – 2001: "Peringatan Pemerintah: Merokok Dapat Menyebabkan Kanker, Serangan

Jantung, Impotensi dan Gangguan Kehamilan dan Janin". Pada 2002-2013: "Merokok Dapat Menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi dan Gangguan Kehamilan dan Janin". Desember 2013 – Sekarang: "Peringatan: Merokok Membunuhmu". Mulai 24 Juni 2014, pada kemasan rokok wajib dicantumkan grafis berupa lima gambar: (1) Gambar Kanker Mulut. Tulisan: Merokok sebabkan kanker mulut, (2) Gambar orang merokok dengan asap yang membentuk tengkorak. Tulisan: Merokok membunuhmu, (3) Gambar kanker tenggorokan. Tulisan: Merokok sebabkan kanker tenggorokan, (4) Gambar orang merokok dengan anak di dekatnya. Tulisan: Merokok dekat anak berbahaya bagi mereka, (5) Gambar paru-paru yang menghitam karena kanker. Merokok sebabkan kanker paru-paru dan bronchitis kronis. Namun gambar grafis itu hanya 40% dari bagian permukaan depan dan belakang bungkus rokok. Angka ini jauh lebih kecil daripada Thailand dan Brunei Darussalam (85%) serta Laos dan Myanmar (75%).

[8] Secara regulasi, upaya melindungi remaja dari bahaya merokok sudah ada. Pada 3 November 2014, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Turunan regulasi terkait Program Indonesia Sehat dijabarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pasal 3 peraturan ini menyebutkan 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, salah satunya yaitu, "Anggota keluarga tidak ada yang merokok." Pelaksana program ini adalah puskesmas, yang salah satu kegiatannya adalah melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Diharapkan, regulasi ini segera diterapkan dengan melakukan rehabilitasi terhadap anggota keluarga (orang

tua dan anak) yang menjadi perokok.

Regulasi berikutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah. Permendikbud ini melarang beragam aktivitas terkait rokok di lingkungan sekolah, termasuk memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok.

[9] Beberapa hari menjelang peringatan Hari Tanpa Asap Rokok Sedunia 31 Mei 2015, saya mengirim surat elektronik (*e-mail*) kepada Mendikbud Anies Baswedan. Dalam surat itu, saya meminta kepadanya untuk membuat gerakan masif melindungi pelajar dari bahaya merokok, misalnya dengan "…mengimbau pihak sekolah agar mengawasi dan melarang siswa merokok—juga guru atau kepala sekolah merokok di lingkungan sekolah. Atau mengimbau orang tua dan masyarakat agar menjaga siswa supaya tidak merokok. Atau melarang toko/minimarket dan warung asongan menjual rokok kepada pelajar." "Degradasi karakter mulia oleh perilaku merokok," tulis saya, "akan terus berlangsung jika tidak ada gerakan yang melawannya. Saya sangat yakin, gerakan yang dilakukan Mas Menteri akan membuat perubahan besar di masyarakat."

Sehari kemudian ia membalas surat dan menyampaikan bahwa ia sedang antusias menggodok peraturan tentang larangan merokok di sekolah. Pada akhir Desember 2015, terbit Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Saya tidak berani mengklaim bahwa Permendikbud itu terbit atas desakan saya.

[10] Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. Peraturan

ini terbit pada 17 Oktober 2014. Salah satu realisasi regulasi ini adalah penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat tiap tahun dengan melibatkan empat kementerian terkait.

[11] Dikutip dari laman *www.rappler.com* edisi 25 Mei 2016 berjudul "Sepasang Tangan Mungil di Ladang Tembakau". Laporan penelitian *Human Rights Watch*, menurut tulisan ini, menyebutkan separuh dari pekerja anak yang diwawancarai mengalami setidaknya satu gejala yang konsisten dengan keracunan nikotin akut saat bekerja di pertanian tembakau, seperti mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Anak-anak mengalami gejala ini ketika membuang bunga dan daun busuk dari tanaman tembakau, memanen tembakau, membawa daun yang telah dipanen, membungkus dan menggulung daun, menyiapkan daun tembakau untuk pengeringan, dan saat bekerja di gudang pengeringan serta merawat tembakau kering. Nikotin terdapat di semua bagian tanaman dan daun tembakau dalam semua tahapan produksi. Saat berinteraksi dengan tembakau, kulit mereka menyerap nikotin yang, dalam jangka pendek, menyebabkan keracunan nikotin akut yang disebut penyakit akibat daun hijau tembakau atau *Green Tobacco Sickness*. Nikotin mengandung zat racun dan paparan nikotin berdampak buruk jangka panjang bagi perkembangan otak. Hingga kini, perlindungan terhadap pekerja anak di sektor berbahaya seperti perkebunan tembakau tidak ada.

BAB V

[1] Kondisi ini terungkap pada Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku II yang diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, 22 Juni 2016. Puskurbuk hanya fokus menilai buku-buku yang dikirimkan oleh penerbit.

[2] Buku ini bertajuk *Judul-judul Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik; yang Memenuhi Syarat Kelayakan sebagai Sumber Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah Tahun* 2011 *s.d. Tahun* 2015. Dalam Kata Pengantar buku tersebut, sampai September 2011, sebanyak 2.895 judul buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidik lulus penilaian dan dinyatakan layak digunakan sebagai sumber belajar. Pada penilaian tahun 2011 gelombang II, buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidik yang lulus penilaian berjumlah 3.391 judul. Pada 2015, buku yang dinilai dan dinyatakan layak digunakan berjumlah 5.039 judul buku; buku sastra sebanyak 121 judul, buku pengayaan pengetahuan 2.482 judul, buku pengayaan keterampilan 604 judul, buku pengayaan kepribadian 1.136 judul, buku referensi 321 judul, buku panduan pendidik 341 judul, dan buku Pendidikan Anak Usia Dini 34 judul.

[3] Angka ini merujuk pada survei Ikapi yang tertuang dalam buku *Industri Penerbitan Buku Indonesia: Dalam Data dan Fakta* yang diterbitkan oleh Ikapi pada 2015. Jumlah judul diambil dari judul yang terdaftar dalam catatan resmi toko buku dan pengajuan ISBN di Perpustakaan Nasional. Dari data yang dipaparkan, dalam setahun, 66% penerbit menerbitkan buku dengan tiras 3.000 eksemplar per judul, 19% penerbit menerbitkan 5.000 eksemplar per judul, 12% penerbit menerbitkan 10.000 eksemplar per judul, dan hanya 3% penerbit yang menerbitkan 15.000 eksemplar per judul. Penerbit buku anak dan buku sekolah mencetak dalam tiras yang lebih besar daripada buku untuk orang dewasa dan buku perguruan tinggi (hal. 20).

[4] *Ikhtisar Data Pendidikan* 2016/2017, diterbitkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud. Pada tahun ajaran 2016/2017, jumlah siswa SD mencapai 25.618.078 orang, SMP 10.145.416 orang, SMA 4.659.542

orang, SMK 4.682.913 orang, dan SLB 121.244 orang. Total siswa Indonesia di pendidikan formal pada tahun ajaran 2016/2017 adalah 49.833.002 orang[4]. Jika ditambah dengan siswa madrasah sebanyak 9.252.437, maka potensi pasar siswa Indonesia adalah 59.085.439.

[5] Dari 1.328 penerbit, tercatat 711 penerbit yang aktif memproduksi buku, yaitu menerbitkan sekurangnya 10 judul buku per tahun. Sekitar 70%-nya berada di Pulau Jawa.
Sedangkan penerbit bukan anggota Ikapi berjumlah 109 penerbit; Jakarta 35 penerbit (32%), Jawa Barat 27 penerbit (25%), Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur 47 penerbit (43%). Di luar Jawa, tidak ada.

[6] Disampaikan saat memberikan sambutan pada Diskusi Terpumpun Penjenjangan Buku I pada 11 Desember 2015. Thamrin juga ingin perwakilan Ikapi menjangkau 122 kabupaten yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai daerah tertinggal.

[7] Dari sekian wewenang dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertera dalam Bab IV UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, salah satu hal penting yang harus segera direalisasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi adalah memfasilitasi tumbuhnya toko buku di wilayahnya. Pemda dapat menggandeng Ikapi dan pihak swasta untuk membangun toko buku dengan memberikan berbagai kemudahan (insentif). Pemda bisa pula melalui Badan Usaha Milik Daerah menjalankan usaha percetakan dan penjualan buku yang mengakomodasi penulis lokal dan mengeksplorasi konten lokal.

[8] Lampiran 2 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 menyebutkan bahwa penyediaan buku pengayaan dan buku referensi dapat juga dilakukan dengan mengusulkannya kepada dinas pendidikan/ kantor Kemenag kabupaten/kota, membeli buku murah, atau mengunduh buku elektronik yang hak ciptanya milik pemerintah.

[9] Sri Maryati menyampaikan cerita ini saat menjadi narasumber Workshop GLS angkatan III di Yogyakarta, 24 Mei 2016. Kendati dapat sumbangan buku dari orang tua, Sri masih merasa kekurangan buku. Sudut baca mengoleksi 100 buku per kelas. Dengan jumlah siswa 30 orang per kelas, dalam waktu 3 bulan semua anak sudah membaca semua buku yang ada di kelas.

[10] *Industri Penerbitan Buku Indonesia: Dalam Data dan Fakta*, Ikapi, Jakarta: 2015, hal. 23. Sayang, dari 20% penerbit itu, persentase judul buku yang sudah dikonversi menjadi buku digital masih sangat rendah.

BAB VI

[1] Dikutip dari laman *http://health.detik.com* edisi 8 Juli 2013 berjudul "Studi: Membaca Bisa Memperlambat Penurunan Kekuatan Otak". Penelitian ini melibatkan 294 orang reponden berusia di atas 55 tahun. Setiap 6 tahun sampai meninggal (rata-rata hingga berusia 89 tahun), mereka diberi tes kognitif. Mereka menjawab kuesioner berisi pertanyaan seputar aktivitas membaca buku, menulis, dan partisipasi kegiatan lain terkait rangsangan memori pada masa kanak-kanak, remaja, usia pertengahan, dan usia saat ini. Setelah responden meninggal, tim dokter memeriksa otak mereka untuk mengetahui apakah ditemukan bukti tanda-tanda fisik terjadi demensia (penurunan fungsi otak).

[2] Dikutip dari laman *http://www.bbc.com* edisi 12 September 2013 berjudul "Manfaat Membaca untuk Kesenangan". Partisipan penelitian ini berjumlah 6.000 anak berusia 16 tahun yang lahir dalam satu minggu (data berdasar lembaga survei *The 1970 British Cohort Study*). Setelah hasil tes dianalisis, ternyata 14,4% anak-anak yang gemar membaca untuk kesenangan lebih baik menguasai matematika dan 9,9% lebih mudah memahami kosa kata daripada anak-anak yang jarang membaca.

[3] Dikutip dari *http://www.republika.co.id* edisi 2 Oktober 2015 berjudul "Ini Anjuran Stimulasi untuk Delapan Kecerdasan Anak".

[4] LMC tingkat SD/MI dan SMP/MTs diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (kini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) sejak 2011. *Workshop* ini merupakan bagian dari seleksi naskah tahap ke-3. Narasumber *Workshop* adalah para sastrawan dan akademisi di antaranya Taufiq Ismail, Jamal D. Rahman, dan Suminto A. Sayuti.
Tiap tahun jumlah peserta selalu meningkat. Cerpen para juara dibukukan. Di akhir cerpen, penulis menuliskan latar belakang dan pesan cerpen serta pengalamannya berinteraksi dengan buku. LMC tidak lagi diadakan sejak 2016.

[5] Wawancara dengan Helena pada 11 November 2013 di Bogor saat ia mendampingi Queen, putri keduanya, mengikuti *Workshop* LMC. Setahun sebelumnya saya mewawancarai Sherina, putri sulungnya, di tempat yang sama.

[6] Pada 10 Oktober 2012 sore, di sela *Workshop* LMC, Sherina sedang melamun di bagian belakang ruang acara ketika teman-temannya kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Saya mendatangi dan mewawancarainya untuk keperluan pemuatan berita di laman

Ditjen Dikdas. Ia tampak bersemangat dan antusias. Tak disangka, besoknya ia menyandang predikat sebagai juara I Lomba LMC tingkat SD/MI.

[7] Wawancara dengan Abdiansyah pada 22 September 2016.

[8] Saya tidak terlibat dalam penulisan dua sinetron ini, melainkan beberapa rekan saya. Saya ditugaskan membuat beberapa episode awal skenario sinetron baru yang akan dijual ke PH lain. Saya hanya bertahan 3 bulan di tempat ini.

[9] Penelitian dilakukan pada Maret-April 2015. Populasi penelitian ini adalah semua program siaran yang ditayangkan di 15 stasiun televisi nasional yaitu ANTV, Global, Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, TVOne, TVRI, RTV, Sindo TV, Kompas TV dan Net. pada rentang waktu jam 05.00 – 24.00 selama dua bulan. Dari sekitar 9.000 program siaran, diambil sampel 45 program siaran. Ke-45 program itu diklasifikasikan ke dalam sembilan kategori program siaran: berita, sinetron/FTV/film, *variety show*, *talkshow*, religi, budaya/wisata, *infotainment*, komedi, dan anak-anak. Hasilnya, indeks kualitas program acara berita adalah 3,58; sinetron 2,51; *infotainment* 2,34; *variety show* 2,68; *talkshow* 3,78; religi 4,1; wisata/budaya 4,09; komedi 3,13; dan anak-anak 3,03. Hanya program acara religi dan wisata/budaya yang dinilai berkualitas, yaitu indeks di atas 4.

[10] Dikutip dari artikel di laman *http://nasional.kompas.com* berjudul "Survei Litbang Kompas: Televisi, Dua Sisi Mata Uang" yang dimuat pada Rabu, 30 Maret 2016.

[11] Dikutip dari laman *theguardian.com* edisi 24 April 2007.

[12] Dikutip dari laman *http://www.republika.co.id* edisi 11 Agustus 2016 berjudul "Layar Sentuh Pengaruhi Kemampuan Anak Menulis". Anak-anak dari daerah Queensland, menurut tes NAPLAN, mendapatkan hasil rata-rata terendah kedua untuk siswa di tahun ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9. Sementara hal tes nasional memperlihatkan terjadinya penurunan hasil tes menulis pada siswa tahun ke-7 dan ke-9.

[13] Diterbitkan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia. Buku ini bercerita tentang perjalanan dua tetes air, Aira dan Aura, yang jatuh ke bumi (hujan). Sejumlah tempat mereka lewati yaitu sawah, kolam, parit, sungai, muara, dan laut. Secara keseluruhan, buku ini bercerita tentang siklus air, mulai dari air turun ke bumi (hujan) hingga air naik ke langit (menguap). Cerita lebih hidup karena didukung dengan ilustrasi yang bagus.

[14] Istri saya membeli paket buku berharga jutaan secara sembunyi-sembunyi. Ia pernah minta saya membelikan paket buku itu namun saya menolak dengan alasan keuangan. Ia kemudian membeli dengan model arisan bersama teman-temannya. Uangnya diambil dari anggaran bulanan kami. Saya hanya geleng-geleng kepala, menghargai tekadnya yang ingin membelikan Kirana buku bagus dan berkualitas.

[15] Pada 23 April 2009, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar. Surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia itu tegas melarang seleksi masuk SD dilakukan dengan tes calistung. Anak TK juga dilarang diberikan

pelajaran calistung secara langsung dan tidak boleh diberi pekerjaan rumah (PR).

[16] Ilustrasi buku ini, selain bagus, juga menawarkan ide brilian: sejumlah binatang digambar secara kamuflase berada di sejumlah tempat; di batang dan daun pohon, air, bahkan di tubuh binatang. Cerita buku ini terinspirasi dari perjalanan Graeme melintasi Kenya dan Tanzania. Saya lupa kapan dan di mana membeli buku terbitan Gramedia Maret 2006 ini. Seingat saya, buku itu dibeli jauh hari sebelum saya kali pertama membacakannya kepada Kirana.

[17] Pada 10 Oktober 2012, Sherina bercerita pada saya bagaimana ia mengagumi kreativitas ayahnya. Ia menyebut peti itu sebagai peti harta karun. "Karena papa kami kreatif, ia membuatkan rumah kami nyaman buat buku-buku."

[18] Queen, sebagaimana kakaknya Sherina, piawai meramu pengalaman keseharian dengan imajinasi hingga menjadi sebuah cerita yang menarik. Begini komentarnya saat saya wawancara pada 11 November 2013, "Perabotan meja belajar anak itu yang dibuat ayah pertama kalinya. *Meja Cantik Papa* adalah kisah nyata saya bersama Ayah. Cerita yang sebenarnya yang digabung dengan imajinasi saya. Saya beri judul *Meja-meja Cantik Papa* agar membuat orang penasaran membacanya karena memang ada meja-meja yang cantik?"

[19] Joni menceritakan pengalaman berkesannya ini sebelum menyampaikan hasil penilaian dewan juri LMC di Bogor, Jawa Barat, pada 13 November 2014.

BAB VII

[1] Literasi akhirnya masuk sebagai lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V tahun 2016 terbitan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Literasi, dalam KBBI, diartikan sebagai: (1) kemampuan menulis dan membaca dan (2) pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu.

[2] Penghargaan diserahkan saat pembukaan *Indonesia International Book Fair* yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 28 September 2016. Acara dihadiri Mendikbud RI Muhadjir Effendy, Menteri Pelajaran Malaysia Datuk Seri Mahdzir Khalid, dan beberapa perwakilan negara peserta IIBF 2016. Anies (menjabat Mendikbud pada 26 Oktober 2014 – 27 Juli 2016) menyatakan yang berhak menerima penghargaan itu adalah para pegiat literasi, ia hanya mewakili. Yang dilakukannya saat menjabat Mendikbud, katanya, adalah memang kewajiban yang harus dilakukan Kemendikbud. Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti ini menjadi dasar program GLS. Ia pun membentuk Gerakan Literasi Nasional, wadah koordinasi bagi semua unit utama di lingkungan Kemendikbud dalam menyelenggarakan kegiatan literasi.

[3] Acara diselenggarakan di Graha Utama Gedung Ki Hadjar Dewantara lantai 3, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017. Sebelum acara penghargaan, Bupati/Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan penerima Anugerah Literasi Prioritas diundang menghadiri program televisi *Delapan Puluhan* yang disiarkan langsung oleh stasiun TVRI pada Ahad malam, 19 Maret 2017. Acara yang dipandu presenter kondang Helmy Yahya itu dimaksudkan sebagai bagian dari promosi (gratis) GLS di media massa. Orang dibalik keberhasilan program ini adalah Pangesti Wiedarti, Ketua Satgas GLS. Ia mengolaborasi pertemanannya

dengan Helmy Yahya, program *Delapan Puluhan* TVRI, USAID PRIORITAS, dan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.

[4] Sejak 2013, USAID PRIORITAS melakukan pendampingan SD/MI dan SMP/MTs di 92 kabupaten/kota. Dari 92 kabupaten/kota itu, terdapat 19 kabupaten/kota di tujuh provinsi yang dinilai memiliki iklim literasi yang positif.

[5] Buku *Panduan Anugerah Literasi Prioritas*, Ditjen Dikdasmen, 2017. USAID PRIORITAS mengumpulkan laporan ke-19 kabupaten/kota berisi program dan kebijakan yang telah berjalan dan menyerahkannya kepada Ditjen Dikdasmen untuk diolah sebagai dasar pemberian penghargaan. Pangesti Wiedarti, Ketua Satgas GLS, mengelompokkan beragam program dan kebijakan tersebut ke dalam 19 indikator (ia melakukan pengelompokan ini dalam waktu 4 hari). Lima komponen yang membingkai ke-19 indikator itu diambil dari pengelompokan kegiatan literasi pada Laporan Gerakan Literasi Nasional Tahun 2016. Dalam analisis penilaian statistik, Satriyo Wibowo, anggota Satgas GLS yang mendalami ilmu statistik, menciptakan istilah 'Indeks Pembangunan Literasi' (IPL). Indeks inilah yang menjadi dasar untuk membuat urutan pencapaian prestasi ke-19 kabupaten/kota.

[6] Wawancara dengan Soekirman usai Anugerah Literasi Prioritas di Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

[7] berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.

[8] Minhajul Ngabidin menceritakan pengalamannya membangun kolaborasi literasi saat berbagi pengalaman di acara 'Berbagi Praktik Baik' pada *Workshop* Gerakan Literasi Sekolah yang diselenggarakan

Ditjen Dikdasmen Kemendikbud di Tangerang Selatan, Banten, pada 27 Mei 2016. Ia sangat antusias membangun gerakan dengan para guru SM3T dan GGD. Menurutnya, mereka membawa kekinian dan kebaruan luar biasa. "Dengan menggandeng mereka, banyak hal yang bisa dilakukan," katanya. Banyak guru yang sudah punya buku dan tulisan yang diterbitkan, baik fiksi maupun nonfiksi. Kemampuan itu yang diberdayakan dalam menunjang kegiatan literasi di NTT.

BAB VIII

[1] Sarasehan Literasi Sekolah I diadakan pada 21 Mei 2017. Ada tujuh kegiatan yang dilakukan secara paralel (secara bersamaan di dua ruangan berbeda) dari pukul 09.00 – 17.00. *Pertama*, Dialog Literasi Sekolah bertema 'Sekolah sebagai Taman Literasi' yang mendiskusikan kegiatan GLS di sekolah dari berbagai sudut pandang peserta; pegiat literasi, guru, pengawas, orang tua, pengelola TBM, dan mitra. *Kedua*, Unjuk Karya Literasi, menghadirkan siswa berprestasi juara Festival Literasi PKLK dari SMPLB Pangudi Luhur Jakarta. Acara dipandu oleh Ali Muakhir, penulis ratusan judul buku dan penggiat buku bacaan anak. *Ketiga*, Inspirasi Literasi berupa pemutaran film *Tatalu* karya Vudu Abdul Rahman, guru SD penggerak Rumah Pustakan Percisa Tasikmalaya, dan berbagi pengalaman penyelenggaraan kegiatan literasi di Tasikmalaya. *Keempat*, Musikalisasi Puisi dengan menampilkan Rumpaka Percisa Tasikmalaya bersama Baroedak Tangkal Kopi. *Kelima*, Diskusi dan Peluncuran Buku berjudul Suara dari Marjin: Literasi sebagai Praktik Sosial yang ditulis oleh Sofie Dewayani dan Pratiwi Retnaningdyah, dengan pembahas Prof. Djoko Saryono, dosen Universitas Negeri Malang. *Keenam*, Pelatihan Literasi *Read Aloud* bertema 'Strategi Membacakan Buku kepada Anak' oleh Roosie

Setiawan, pendiri komunitas Read Aloud Indonesia. *Ketujuh*, Menghidupkan Buku dengan tema "Aku, Kau, dan Buku", berupa pentas seni oleh peserta acara.

Sarasehan Literasi Sekolah II diadakan pada 16 September 2017. Belajar dari penyelenggaraan SLS I di mana peserta ingin mengikuti semua acara sehingga sebagian mondar-mandir pindah ruangan, maka pada SLS II ini, acara dilaksanakan secara berurutan (tidak paralel). Ada lima kegiatan yang digelar. *Pertama*, Dialog Literasi bertema 'Kegiatan Literasi yang Menyenangkan'. Selain diskusi, peserta dipersilakan ke pentas berbagi pengalaman literasi. *Kedua*, Inspirasi Literasi berisi pemutaran video dan presentasi kegiatan literasi di SD Negeri Rorotan 05 Cilincing Jakarta Utara yang didampingi oleh *Save the Children*. *Ketiga*, Unjuk Karya Siswa dan Diskusi Proses Kreatif menghadirkan dua siswi SD Negeri Rorotan 05 Cilincing Jakarta Utara merupakan ajang bagi siswa-siswi di sekolah yang didampingi *Save the Children*. *Keempat*, Pelatihan Literasi berupa pelatihan pembuatan video kegiatan 15 menit membaca. Narasumbernya adalah Omar Aryaindra, sutradara film animasi *Adit Sopo Jarwo* produksi MD Animation. *Kelima*, Diskusi Literasi mengangkat tema 'Penguatan Perpustakaan Sekolah sebagai Pusat Sumber Belajar yang Menyenangkan'.

Yang unik dalam SLS II adalah jumlah peserta yang membeludak, melebihi kuota. Peserta yang mendaftar daring dibatasi hingga 160 orang, namun yang datang banyak pula yang belum mendaftar. Padahal publikasi hanya melalui media sosial *Facebook* dan *Whatsapp* mulai H-4. Mereka datang dari Jakarta, Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Kabupaten Serang, Cilegon, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang. Saat Dirjen Hamid Muhammad menyampaikan sambutan, banyak peserta berdiri di bagian belakang. Dalam kegiatan ini, *Asia Foundation* membagikan 20-an paket buku (satu paket dibungkus dalam satu kardus besar) kepada perwakilan sekolah yang datang.

Semua peserta juga dapat buku.
Acara SLS tidak dipungut biaya alias gratis dan terbuka untuk umum. Acara ini mengedepankan gerakan literasi sebagai perayaan dan tempat berbagi.

Daftar Pustaka

Clark, C. & K. Rumbold. (2006). *Reading for pleasure: A research overview*. UK: National Literacy Trust.

Dewayani, Sofie & Pratiwi Retnaningdyah. 2017. *Suara dari Marjin: Literasi sebagai Praktik Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Dewayani, Sofie. 2016. *Panduan Pemilihan Buku Nonteks Pelajaran untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.

Ericksen, Michael, etc. 2015. *The Tobacco Atlas: Fifth Edition*. USA: American Cancer Society. Inc.

Frankenberg, Susan. *Read Aloud Magic*. Bakrie Telecom Tbk.

Gong, Gol A & Agus M. Irkham. 2012. *Gempa Literasi; Dari Kampung untuk Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Haryadi, Rohmat. 2008. *Saat Bioskop Jadi Majlis Taklim: Sihir Film Ayat-ayat Cinta*. Jakarta: Hikmah.

Hernowo. 2007. *Aku Ingin Bunuh Harry Potter! (Edisi yang Diperluas)*. Bandung: Dar! Mizan.

Ikapi. 2015. *Industri Penerbitan Buku Indonesia: Dalam Data dan Fakta*. Jakarta: Ikapi.

Jennings, Paul. *Agar Anak Anda Tertular "Virus" Membaca*. 2006. Bandung: Penerbit MLC.

Karni, Asrori S. 2008. *Laskar Pelangi: The Phenomenon*. Jakarta: Hikmah.

Kasali, Rhenald. 2016. *Self Driving; Menjadi Driver atau Passengger?*. Jakarta: Mizan.

Laksono, Kisyani, dkk. 2016. *Manual Pendukung Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah: Untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.

Lian,Tan Yen dan Ulysses Dorotheo. 2016. *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region*. Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance.

Horton, Myles & Paulo Freire. 2011. *We Make the Road by Walking*: Percakapan tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial. Jakarta: TransBook.

Pilgreen, Janice L. 2000. *The SSR Handbook: How to Organize and Manage a Sustained Silent Reading Program*. Australia: Boynton/Cook Publisher.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun* 2016/2017. Jakarta: Kemendikbud.

Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2016. *Judul-judul Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik; yang Memenuhi Syarat Kelayakan sebagai Sumber Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah Tahun* 2011 *s.d. Tahun* 2015. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.

Trelease, Jim. 2008. *Read-Aloud Handbook; Mencerdaskan Anak dengan Membacakan Cerita Sejak Dini*. Jakarta: Hikmah.

Wiedarti, Pangesti, dkk. 2016. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.

Internet:

http://emispendis.kemenag.go.id

http://www.cancer.org

http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

http://www.rappler.com

http://health.detik.com

http://www.bbc.com

http://www.republika.co.id

Regulasi:

UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Inpres Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa.

Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Perdirjen Dikdasmen Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

Peraturan Dirjen Dikdas Nomor 144/C/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2015.

Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

Profil

PENULIS

Sejak kuliah hingga kini, Billy Antoro konsisten bergelut di dunia literasi (kepenulisan). Aktif di penerbitan kampus Universitas Negeri Jakarta, ia pernah diamanahi sebagai pemimpin redaksi Majalah *Didaktika* (2002) dan Tabloid *Transformasi* (2004). Sebulan usai wisuda 2006, ia bekerja sebagai reporter di Majalah *Event Guide* dan setahun kemudian menjadi redaktur di Majalah *Spiritual Community*. Akhir 2008, ia bergabung dengan sebuah Rumah Produksi (*Production House*) dan menjadi penulis skenario lepas untuk sebuah acara yang diputar di TVRI.

Pada 2009, ia bergabung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola (meliput dan menulis) laman Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (sekarang Ditjen Dikdasmen), membuat buletin, dan majalah. Sejak 2010, ia meliput dan menerbitkan buletin (kemudian majalah) untuk ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, dan Olimpiade Sains Nasional.

Dalam organisasi kepenulisan, Billy bergabung dengan Forum Lingkar Pena (FLP) DKI Jakarta pada 2002. Pada 2007 – 2009, ia diamanahi sebagai Ketua FLP DKI Jakarta. Mulai 2015 – 2017, ia menjadi pengurus Badan Pengurus Pusat FLP Divisi Jaringan Wilayah.

Billy juga pernah menjadi guru 'terganteng' di PAUD Nusa Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Februari 2008 – akhir 2010. Di sini ia dengan bahagia mengajar Bahasa Inggris dan mendongeng bagi para bocah calon pemimpin bangsa.

Ia ikut mengawal lahirnya program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Ditjen Dikdasmen sejak akhir 2015. Pada 2017, Billy diamanahi sebagai Sekretaris Satuan Tugas GLS. Kini Billy tengah menempuh program magister Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta.

Nama	: Billy Antoro
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 10 April 1980
Alamat	: Jl. KH. Mas Mansyur No. 42 RT:06/11 Kunciran Indah Pinang Tangerang 15144
Sur-el	: billy.antoro@gmail.com
Telepon/WA	: 081284096776
Facebook	: Billy Antoro

KELUARGA

• Istri	: Winy Purtini
• Anak	: Kirana Aisha Izzatunnisa (lahir 19 Januari 2012)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Permata Bunda Duren Sawit Jakarta Timur (1985 – 1986)
- SD Negeri 05 Duren Sawit Jakarta Timur (1986 – 1992)

- SMP Negeri 194 Duren Sawit Jakarta Timur (1992 – 1995)
- SMK Telkom Sandhy Putra Jakarta (1995 – 1998)
- Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Teknik Elektro (1999 – 2006)

KARYA TULIS

- Buku *Panduan Praktis Gerakan Literasi Sekolah* (Ditjen Dikdasmen, 2017)
- Buku Antologi Esai *Jejak-jejak Mas Gagah #2* (Pipiet Senja Publishing House, 2015)
- Buku Antologi Esai 27 *Wajah Guruku* (Luxima, April 2014)
- Buku *Remaja Puber Remaja Super* (Tinta Medina, 2011). Ditulis bersama Erawati HW
- Buku *Pelangi di Ujung Gerimis* (terbit mandiri, Januari 2010)
- Buku Antologi Cerpen *Gadis Kota Jerash* (LPPH, Desember 2009)
- Buku Antologi Cerpen *Suparman Pulang Kampung* (LPPH, Mei 2007)
- Buku Antologi Esai *Ketika 'Aa' Menikah Lagi* (LPPH, Februari 2007)
- Buku Antologi Cerpen *Lebih Baik Aku Tak Masuk Surga* (LPM Didaktika, April 2006)
- Buku Antologi Cerpen *Kupu-kupu dan Tambuli* (DKJ&FLP, Februari 2006)
- Buku Antologi Cerpen *Badman: Bidin!* (LPPH, Desember 2005)
- Buku Antologi Esai *Jatuh Bangun Cintaku* (LPPH, November 2005)
- Buku Novel *Gue Bukan Bintang di Langit* (LPPH, April 2005)
- Buku Antologi Esai *Matahari Tak Pernah Sendiri 2* (LPPH, Desember 2004)

ILUSTRATOR & DESAINER GRAFIS

Nama	: Tri Isti
Tempat, tanggal lahir	: Gunungkidul, 4 Juni 1981
Alamat	: Jl. Kramat IV No. 123, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur
Sur-el	: tri.isti@kemdikbud.go.id
Telepon/WA	: 081385876706
Pendidikan Terakhir	: S1
Pekerjaan	: PNS

KARYA ILUSTRASI & LAYOUT BUKU

- *Penjual Koran Bernama Kasim* (Feminagroup, 2009)
- *Merayakan Ulang Tahun* (Feminagroup, 2009)
- *Ikut Ibu Bekerja* (Feminagroup, 2009)
- *Ikut Ayah ke Kandang Kuda* (Feminagroup, 2009)
- *Gunting Rambut Kres -kres* (Feminagroup, 2009)
- *Cerita Pohon Jati*, 15 Naskah Terbaik Lomba Menulis Cerita Anak (LMCA) Tahun 2011, Kemendikbud 2011
- *Lentera Kelam Tiga Puluh Februari*, 15 Naskah Terbaik Lomba Menulis Cerita Remaja (LMCR) Tahun 2011, Kemendikbud 2011

- *Pelangi Untuk Jingga*, 13 Naskah Terbaik LMCA 2012, Kemendikbud 2012
- *Cheng Ho di Balik Etalase Budaya Semarang*, 15 Naskah Terbaik LMCR 2012, Kemendikbud 2012
- *Seuntai Puisi untuk Adikku*, 13 Naskah Terbaik LMCA 2013, Kemendikbud 2013
- *Air Mata Dayang Sumbi*, 15 Naskah Terbaik LMCR 2013, Kemendikbud 2013
- *Betapa Hebatnya Dia*, 15 Naskah Terbaik LMCA 2014, Kemendikbud 2014
- *Tarian Salju Karaban*, 15 Naskah Terbaik LMCR 2014, , Kemendikbud 2014
- *Mencari Ujung Pelangi*, 10 Cerpen Pemenang LMCA Tahun 2015, Kemendikbud 2015
- *Piala di Atas Dangau*, 10 Cerpen Pemenang LMCR Tahun 2015, Kemendikbud 2015